



**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 22 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMONGAN
2006**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN 2002 - 2012**

LAPORAN PENDAHULUAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan 2002-2006 merupakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 6 Tahun 2002 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang harus dijabarkan kedalam Rencana Jangka Pendek Tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2006;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pertimbangan menimbang huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
9. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 104);
10. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor ; 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
11. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut RKPD, adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP, adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Pusat;
5. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut RENSTRADA, adalah Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 sebagai pedoman perencanaan taktis dan strategis.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten dalam jangka 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RENSTRADA Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta dukungan Pemerintah Pusat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- **VISI DAN MISI DAERAH**
- **GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH**
- **ISU DAN MASALAH MENDASAR**

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006

BAB V : RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

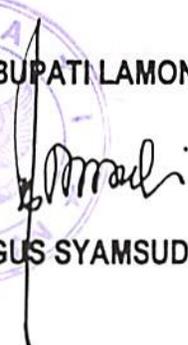
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2006

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 29 Juni 2005


Pj. BUPATI LAMONGAN

AGUS SYAMSUDDIN

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 29 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

Ttd

ENA S. SOEMARNA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI G

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	I. 1
A. Latar Belakang	I. 2
⇒ Visi dan Misi Daerah	I. 2
⇒ Gambaran Kondisi Umum Daerah	I. 2
⇒ Isu dan Masalah Mendasar	I. 11
B. Maksud dan Tujuan	I. 14
C. Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I. 14
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN	II. 1
A. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2004	II. 1
B. Lingkungan Eksternal dan Internal	II. 3
C. Tantangan Pokok	II. 3
D. Prospek Ekonomi 2005-2006	II. 4
BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006	III. 1
BAB IV : RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006	IV. 1
BAB V : RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN	V. 1
BAB VI : PENUTUP	VI. 1

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2006.

RKPD merupakan penjabaran tahun ke lima (tahun terakhir) dari Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 yang merupakan rencana jangka menengah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan nasional, dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, meletakkan RKPD sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2006 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro dan secara rinci dijabarkan dalam bidang-bidang pembangunan disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Lamongan. Bagi Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja dijabarkan pemerintah Kabupaten Lamongan berkewajiban untuk memedomani sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber, khususnya pada Dinas-dinas sektoral sebagai kepanjangan tangan dari Dinas-dinas sektoral Propinsi Jawa Timur dalam mengemban pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

A. LATAR BELAKANG

VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002, tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 tertuang Visi Daerah sebagai berikut :

" Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maju, rukun, damai, adil dan berakhlak mulia "

Untuk mendukung tercapainya Visi Daerah tersebut telah ditetapkan Misi Daerah sebagai berikut :

1. Perwujudan keharmonisan masyarakat yang didukung dengan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
2. Perwujudan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, kelautan, industri dan perdagangan;
4. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi utamanya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar;
5. Peningkatan keseimbangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi;
6. Peningkatan kualitas keseimbangan pelayanan masyarakat melalui penyediaan jasa publik yang transparan, responsive dan bertanggungjawab serta profesional;
7. Penjaminan terhadap masyarakat atas keamanan ketertiban dan ketentraman;

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Politik

Pembangunan politik di Kabupaten Lamongan secara umum sudah semakin baik, hal ini ditandai dari proses demokratisasi telah berjalan pada jalur dan arah yang benar. Demikian pula antusiasme masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, walaupun masih terlihat adanya ancaman kebebasan berekspresi, masih kuatnya budaya kekerasan dan politik uang.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis, maka adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistem multi partai yang mengikuti Pemilu, serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, menjadi modal yang sangat penting dalam mewujudkan proses demokratisasi kedepan. Demikian pula, dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan tertib diharapkan dapat terbentuk Pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka pemberdayaan politik untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik yang semakin konstitusional, demokratis, langkah-langkah yang diambil adalah meningkatkan frekwensi, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Pusat, Ormas, Orpol, LSM, Perguruan Tinggi, Media Massa untuk ikut membantu memantapkan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dan disamping itu mengadakan forum koordinasi dan konsultasi secara berkala dalam pertemuan Muspida.

Hukum

Kondisi penegakan hukum di Lamongan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditegaskan. Produk hukum seperti Peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi dari Otonomi Daerah agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan kurun waktu 5 tahun 2000-2004 yaitu dengan Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang hukum serta penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum; Menerbitkan Peraturan Daerah sebanyak 102 buah telah disahkan; Keputusan Bupati sebanyak 6.239 buah; Instruksi Bupati sebanyak 16 buah; Perjanjian Kerjasama sebanyak 62 buah; Buku Lembaran Daerah sebanyak 790 buah; Sosialisasi Perda sebanyak 8 buah; Penegakkan Perda (PPNS) sebanyak 3 buah dan Bintek PPAT sebanyak 1 buah;

Keamanan dan Ketertiban

Kondisi sosial politik, infra struktur dan supra struktur politik di Kabupaten Lamongan cukup mantap, sehingga tercipta stabilitas politik yang dinamis dan

terkendali. Meskipun selama 5 (lima) tahun perkembangan suhu politik di berbagai daerah agak sedikit memanas sebagai akibat dari krisis multi dimensi. Suhu politik di Kabupaten Lamongan sampai saat ini masih tetap terkendali dan masih dalam batas wajar serta tidak mengganggu stabilitas politik daerah yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.

Dalam pelaksanaan pembinaan umum selama kurun waktu 2000-2004 telah mampu mewujudkan kondisi daerah yang cukup mantap dan stabil berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat yang membidangi keamanan, ketertiban dan ketentraman serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat yang semakin sadar dalam menciptakan suasana tertib dan aman di lingkungan masing-masing.

Sosial dan Budaya

Kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk-bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian.

Upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas dan rendahnya daya saing. Disamping itu dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman dan menegaskan peran kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan bangsa secara bersama-sama.

Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir (1999 s/d 2003) struktur perekonomian Kabupaten Lamongan masih belum banyak mengalami perubahan yaitu masih ditopang utama oleh sektor primer (khususnya oleh sektor pertanian). Meski demikian peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, sedangkan sektor tersier (khususnya sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Rata-rata selama 5 (lima) tahun (1999 s/d 2003), sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 45,79 % terhadap total PDRB Kabupaten Lamongan, kemudian berturut-turut setelah sektor pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel & restoran (16,95 %) dan sektor jasa-jasa (16,59 %).

Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Lamongan tersebut terhadap total nilai PDRB ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap total nilai PDRB Propinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 21,95 %.

Selama 5 (lima) tahun terakhir peranan sektor primer khususnya pertanian menunjukkan kecenderungan menurun, yakni dari 46,38 % pada tahun 1999 menjadi 44,43% pada tahun 2003 terhadap total nilai PDRB. Pada periode yang sama sektor tersier (perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 41,31 % pada tahun 1999 menjadi 42,90 % pada tahun 2003.

Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 sebesar Rp. 1,232 triliun atau naik sebesar 3,68 % dibandingkan tahun 2002, dimana sebesar Rp. 547,43 milyar disumbangkan oleh sektor pertanian.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lamongan dapat ditinjau juga melalui total nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang lebih dikenal sebagai nilai PDRB. Perkembangan nilai total PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan yang semakin meningkat juga ditunjukkan pada nilai PDRB perkapita, yang bisa digunakan sebagai indikasi terjadinya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat produktifitas masyarakat Lamongan. Pada tahun 2003 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.032.526,96 atau naik sebesar 3,38 % dibandingkan tahun 2002 yang hanya sebesar Rp. 998.763,76

Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 mencapai 3,68%. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir (1999 s/d 2003) menunjukkan pola kecenderungan yang semakin meningkat. Namun demikian pencapaian tersebut masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kecuali pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999.

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang masih besar ditopang oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata Jawa Timur. Persoalan struktural yang dialami oleh sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian pada tahun 2003 yaitu hanya sebesar 1,12 % paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya yang memberikan nilai

pertumbuhan rata-rata diatas 5 % kecuali industri pengolahan yang hanya sebesar 2,27%.

Tenaga kerja

Memperoleh kesempatan kerja merupakan dambaan bagi setiap keluarga, oleh karena itu dalam setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama secara kompetitive di dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Problematika penyediaan lapangan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan sulit untuk teratasi dalam kurun waktu yang cepat. Ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap tersedianya lowongan kerja, disamping Sumber Daya Manusia yang kurang memenuhi standart yang dibutuhkan, juga sangat terbatasnya lowongan kerja, bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang ada.

Memang dalam penyediaan lapangan kerja tidak saja menjadi tanggungjawab Pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia swasta. Namun demikian kita patut prihatin bila hal ini terus berlangsung dan tidak kunjung teratasi. Berdasarkan angka pencari kerja data statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2004 ada 4.028 orang yang dalam kategori pencari kerja dan pengangguran tidak ketara (mumi) ada sebanyak 21.866 orang. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2004 yang mencapai 3,87 % diharapkan berimplikasikan terhadap peningkatan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah:

Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah menunjukkan kemajuan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk Lamongan sebesar 1.224.812 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,62 % dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, namun yang harus diwaspadai adalah dampak dari jumlah penduduk yang terus berkembang akan dihadapkan pada permasalahan kepadatan penduduk serta daya dukung wilayah yang terbatas. Bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk Lamongan pada tahun 2003 sebesar 675,6 orang per km².

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin ternyata jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 598.572 jiwa dan perempuan berjumlah 626.240 jiwa.

Adapun pengendalian dan mobilitas penduduk dilakukan berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang serasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melalui Program Keluarga Berencana dan Transmigrasi. Perolehan peserta KB baru dan aktif berdasarkan mix kontrasepsi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 peserta KB baru mencapai 20.504 orang dan terus bertambah dan pada tahun 2004 sampai dengan kondisi akhir bulan Agustus telah terdaftar sebanyak 22.022 orang, sedangkan jumlah peserta tertinggi ada di tahun 2001 mencapai angka 25.930 orang dan terbanyak pada jenis kontrasepsi suntik.

Perkembangan peserta KB aktif secara kumulatif dapat disampaikan bahwa tahun 2004 ini telah mencapai 215.158 orang dari angka sebelumnya tahun 2000 yang hanya mencapai 204.529 orang. Sedangkan untuk perkembangan usia kawin pertama perempuan dari tahun ke tahun masih dominan pada kelompok usia sampai dengan 20 tahun. Berdasarkan hasil pendataan keluarga versi BKKBN pada tahun 2003 sebanyak 345.443 KK untuk keluarga prasejahtera ada 171.124 KK, keluarga sejahtera tahap I 42.200 KK, Keluarga Sejahtera tahap I sebanyak 32.888 KK, keluarga Sejahtera tahap II 71.473 KK dan Keluarga Sejahtera tahap III plus ada sebanyak 27.758 KK.

Sementara itu kualitas pendidikan masih diprioritaskan pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun atau pendidikan masyarakat minimal setara dengan pendidikan di tingkat SLTP. Untuk mencapai hal tersebut masih dijumpai beberapa kendala/hambatan yang ditandai dengan tingkat putus sekolah atau DO masih tinggi walaupun sudah ada penurunan, Angka Buta Huruf (ABH) untuk penduduk usia 10 tahun ke atas masih tinggi, walaupun persentasenya menurun yaitu tahun 2004 sebesar 15.077 orang atau masih ada 1.23 % dari jumlah penduduk Lamongan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2004 sebesar 99,84 %, Angka Partisipasi SLTP (13-15 tahun) pada tahun 2004 menjadi 78,8 %, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU/MA pada tahun 2004 54,27 %.

Kualitas Angkatan Kerja masih didominasi oleh Angkatan Kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pengangguran terdidik.

Pembangunan kesehatan memiliki arti yang sangat strategis mengingat berkaitan langsung dengan penyiapan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan dibidang kesehatan adalah terciptanya hidup sehat bagi setiap

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dan tujuan pembangunan nasional.

Kemajuan dibidang kesehatan, jangkauan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas tahun 2003 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2002, jumlah kunjungan rawat jalan meningkat dari 647.670 orang pada tahun 2002 menjadi 650.765 orang pada tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2004 telah mencapai 604.556 orang jumlah kunjungan rawat inap di Puskesmas meningkat dari 8.386 penderita tahun 2002 menjadi 8.393 penderita tahun 2003 sedangkan tahun 2004 mencapai 17.652 orang, pelayanan UGD tahun 2003 meningkat dari 3.490 kasus menjadi 3.568 kasus, sedangkan tahun 2004 ada 10.132 kasus. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari tahun ketahun meningkat seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik mutu maupun jangkauan, walaupun diikuti pula bermunculannya balai pengobatan klinik swasta sebagai mitra kerja.

Pada tahun 2003 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat 1,72 % dibanding tahun 2002. dimana tahun 2002 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.273 persalinan (88,70 %) dari sasaran persalinan sebanyak 20.601 persalinan, sedangkan pada tahun 2003 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.080 persalinan (90,42 %) dari sasaran persalinan sebanyak 19.996 persalinan, sedangkan untuk tahun 2004 telah mencapai 17.204 persalinan (84,46 %).

Kematian perinatal (0-7 hari) pada tahun 2002 sebanyak 95 bayi (4,86 permil) dari 19.547 kelahiran hidup dan pada tahun 2003 menurun menjadi 91 bayi (4,60 permil dari 19.793 kelahiran hidup, sedangkan untuk tahun 2004 kematian perinatal sebanyak 52 bayi dari 17.671 kelahiran hidup.

Jangkauan pelayanan melalui RSUD, rawat jalan meningkat dari 44.820 orang tahun 2002 menjadi 53.078 tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2004 rawat jalan mencapai 65.529 orang, Rawat Inap tahun 2003 sebanyak 4.877 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2002 yang mencapai 4.900 orang, sedangkan untuk tahun 2004 rawat inap mencapai 5.274 orang, pelayanan rujukan dari bawah mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2002. pada tahun 2002 ada 12.787 kasus meningkat menjadi 16.954 kasus di tahun 2003 dan kondisi tahun 2004 telah mencapai 22.321 rujukan. Hal ini disebabkan disamping adanya peningkatan koordinasi antara puskesmas dan RSUD, juga adanya perbaikan manajemen serta perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana.

Dari kondisi tersebut, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan oleh adanya peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Dalam periode 1996-2002 dimana usia harapan hidup sebesar 66,43 tahun menjadi 67,33 tahun pada tahun 2003 dan 70,55 tahun pada tahun 2004.

Kesenjangan Antar Wilayah

Hasil analisa disparitas ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun (1999 s/d 2003) terjadi peningkatan kesenjangan kondisi perekonomian antar wilayah kecamatan. Peningkatan kesenjangan ekonomi ini ditandai dengan nilai indeks wiliamson. Pada tahun 1999 indeks wiliamson sebesar 0,275 meningkat menjadi 0,309 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan terjadinya pemusatan aktivitas ekonomi secara spesial pada wilayah kecamatan-kecamatan tertentu.

Sedangkan hasil analisa disparitas pada masing-masing Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kesenjangan kondisi perekonomian antar wilayah kecamatan dalam SSWP I memberikan nilai tertinggi berturut-turut diikuti kecamatan dalam SSWP II, SSWP III dan kesenjangan terendah pada SSWP IV.

Adapun hasil analisa tipologi daerah memberikan klasifikasi pencapaian pembangunan daerah pada masing-masing wilayah kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. **Daerah Cepat Maju Cepat Tumbuh** dicapai oleh 4 (empat) kecamatan yaitu Lamongan, Babat, Deket dan Brondong. Ke-empat wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah kecamatan yang mempunyai pencapaian pembangunan daerah paling maju di Kabupaten Lamongan;
2. **Daerah Berkembang Cepat** dicapai oleh 4 (empat) kecamatan yaitu Sukorame, Sarirejo, Sekaran dan Maduran. Kecamatan-kecamatan tersebut selama lima tahun terakhir (1999 s/d 2003) memberikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten;
3. **Daerah Maju Tertekan**, dicapai oleh 6 (enam) kecamatan yaitu Pucuk, Sukodadi, Kedungpring, Tikung, Glagah dan Paciran. Kecamatan-kecamatan tersebut tergolong maju tetapi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang lambat, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten. Hal ini mungkin disebabkan oleh terhambatnya perkembangan sektor-sektor basis yang menopang perekonomian masing-masing wilayah tersebut;

4. **Daerah Relatif Tertinggal**, dicapai oleh 13 (tiga belas) kecamatan yang sebagian besar di wilayah selatan dan wilayah Bengawan Jero, yaitu antara lain Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Laren dan Solokuro;

Secara umum berdasarkan hasil analisa potensi wilayah menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah sebagian besar wilayah di Kabupaten masih besar ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan/penggalan) selanjutnya diikuti oleh sektor tersier.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan bagi sumber daya alam yang mengalami kerusakan terus dikembangkan, walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan nasional. Demikian pula gerakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang secara terpadu dilakukan pada wilayah pesisir, laut dan perairan tawar potensial. Disamping itu upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus dilanjutkan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan antar lain melalui peningkatan teknologi proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan diareal bekas penambangan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih besar.

Agama

Kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh suburnya kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura dan vihara, semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing, serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Langkah kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain menjalin kerukunan antar umat beragama dengan pembentukan forum komunikasi antar umat beragama, kerukunan antar etnis melalui pembentukan forum-forum hubungan dan kerukunan antar etnis, pemantapan hubungan sosial melalui forum silaturahmi antar tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan seperti praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian pula ada kecenderungan makin rapuhnya etika dan nilai-nilai agama, yang ditandai oleh perilaku permisif yang tak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa akhlak mulia menurun dan sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara pemahaman atas ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

ISU DAN MASALAH MENDASAR

Berbagai Kebijakan Pembangunan telah di tempuh oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan Pembangunan di berbagai bidang telah kelihatan hasilnya. Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih tersisa banyak hal yang harus segera ditangani mengingat begitu banyaknya permasalahan dan kompleksnya segala urusan yang ada di tengah-tengah masyarakat seiring pula dengan meningkatnya tuntutan masyarakat itu sendiri.

Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat belum secara optimal tercukupi dan diperhatikan, kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan akan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman yang layak huni, Air Bersih, Pertanahan dan kebutuhan akan hak menyuarkan pendapat.

Apabila kita cermati ada permasalahan mendasar yang perlu diangkat sebagai isu daerah sehingga kedepan daerah dapat mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, permasalahan mendasar tersebut antara lain :

Kemiskinan

Berbagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, namun angka kemiskinan tidak kunjung turun, berdasarkan data yang ada pada tahun 2003 Lamongan masih memiliki 73.788 Rumah Tangga Miskin dari 293.944 Rumah Tangga yang ada, sedangkan penyebarannya sebagian besar banyak berada di tingkat pedesaan.

Pengangguran

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka seiring pula bertambahnya kompleksitas permasalahan Kependudukan. Permasalahan pengangguran adalah menjadi masalah Nasional yang cukup berat. Disamping bertambahnya peningkatan Angkatan kerja baru pada setiap tahunnya, pemulangan TKI ilegal, PHK yang selalu membengkak akibat multi krisis, serta SDM yang sangat rendah, menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Pada tahun 2004 di Lamongan masih ada tercatat sebanyak ± 21.000 orang pengangguran.

Kesenjangan Antar Wilayah

Pelaksanaan pembangunan telah dijalankan sesuai program dan kebijakan Daerah, potensi dan Sumber Daya Manusia setiap wilayah sangat dominan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di setiap wilayah yang ada. Akibat dari itu pulalah yang berdampak pada perkembangan wilayah menjadi kurang balance bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, walaupun prinsip azas pemerataan juga telah dikembangkan. Untuk membedah perekonomian di wilayah diantaranya adalah adanya suatu upaya daerah secara sungguh-sungguh untuk menuntaskan jalan poros desa dan meneruskan pembangunan pasar desa potensial sebagai embrio tumbuhnya pusat-pusat perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun ke tahun memang pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, namun perlu kita sadari bersama bahwa pertumbuhan tersebut masih didominasi dari sumbangan sektor pertanian. Lamongan memang sebagai daerah agraris dan sebagian masyarakatnya adalah petani, sektor pertanian adalah sektor andalan daerah, tapi perlu disadari bahwa sektor ini pertumbuhan ekonominya sangat lambat, karena sudah pada fase kulminasi dan sangat kecil kemungkinannya untuk diharapkan dapat berkembang, sehingga perlu peningkatan sistem pertanian agribisnis dan teknologi pasca panen. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita perlu menggali dan mengembangkan potensi-potensi lain di luar Pertanian antara lain Industri, Perdagangan, Pariwisata, Permukiman dan lain sebagainya.

Investasi Rendah

Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Seiring dengan krisis multi dimensi yang berujung pada tingkat krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi rendah, sangat berdampak pada ketersediaan dana swadaya masyarakat sebagai penopang dana-dana pembangunan khususnya yang bersifat stimulan di tingkat wilayah dan desa.

Sedangkan investasi dari swasta khususnya pemilik modal terhadap proyek-proyek pembangunan yang harus melibatkan unsur swasta dan pengusaha sampai saat ini masih sangat rendah atau stagnan walaupun ada peningkatan bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat Lamongan dalam hal pengembangan industri masih tergolong sebagai daerah industri pemula.

Rendahnya investasi ini banyak disebabkan dari ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, jaminan kepastian hukum, dan pelayanan birokrasi yang masih lemah. ✓

Sumber Daya Alam Atau Lingkungan Hidup

Sebagai akibat dari berbagai aktivitas baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat selaku pelaksana dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri, sangat berpengaruh pada ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan keberadaan Lingkungan Hidup yang memadai. Akibat itu semua sangat berdampak pada ketersediaan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang rendah. Untuk itu suatu kerjaan yang berat bagi Daerah, khususnya pengelolaan di lingkungan hutan yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani, karena dampak yang ditimbulkan secara otomatis daerah ikut menanggung akibatnya, sementara hasil produk hutan Lamongan tidak ikut merasakan. Sedangkan untuk sumber-sumber lain, seperti Galian batu kapur, Dolomit, Air bawah tanah, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lain-lain secara rutin telah dilakukan koordinasi lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pengawasan.

Stabilitas Politik dan Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan mendasar di era reformasi adalah adanya tuntutan akan keterbukaan disemua lini dan level khususnya mengenai informasi, keterlibatan masyarakat menjadi hal utama dalam setiap aktivitas. Tuntutan akan kesejahteraan masyarakat menjadi isu penting yang dimunculkan pada setiap event, yang akan berdampak pada kerawanan sosial dan pada ujungnya akan berpengaruh pada tingkat keamanan dan ketertiban apabila kita tidak pandai-pandai memenejnya.

Akibat dari kemajuan di bidang Ekonomi yang berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat, sangat berdampak pula pada perubahan perilaku dan budaya masyarakat yang selalu minta dilayani. Pergeseran paradigma ini perlu disikapi oleh Birokrasi, agar kita siap dengan segala konsekuensinya.

Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2004 yang ada di APBD sebanyak Rp. 413.414.598.007,84, dibelanjakan sebanyak Rp. 415.059.538.274,00, sehingga terjadi devisit anggaran. Dari dana tersebut untuk

belanja publik baik rutin maupun pembangunan sebanyak Rp.305.852.534.848,00, merupakan dana yang sangat terbatas bila harus dialokasikan untuk kebutuhan 1.224.812 jiwa penduduk Lamongan Tahun 2003. Untuk itu kedepan tidak ada lagi yang harus diharapkan kecuali menggali potensi Daerah sendiri melalui berbagai terobosan serta adanya upaya kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pinjaman pada pihak ketiga agar dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dalam menyusun rencana, program dan kegiatan/ proyek pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam skala prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten Lamongan, Dunia Usaha dan Masyarakat. Adapun tujuan konkritnya adalah :

1. Mengetahui hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan .
2. Agar seluruh program/kegiatan/proyek disusun terfokus dan tepat sasaran.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun RAPBD tahun anggaran 2006.

C. PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan adalah merupakan bagian dari Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan partisipatif (SMPP) yang dalam tataran di era reformasi dan otonomi daerah ini pendekatan yang dipakai adalah lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk diantaranya keterlibatan dalam proses Penyusunan Kebijakan maupun dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Daerah.

RKPD yang dalam penyusunannya didasari oleh Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah suatu wujud dari sebuah konsep perencanaan yang terintegreted mulai perencanaan yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi sampai pada tingkat kabupaten dengan melibatkan multi stake holder yang ada di daerah. Untuk itu dalam proses penyusunan RKPD sudah barang tentu diawali dari Penjaringan Aspirasi

Masyarakat, yang dipadukan dengan Rencana kerja (Renja-renja) Unit Satuan kerja Perangkat Daerah serta mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dalam Forum Musrenbang di Tingkat Desa dan Musrenbang Kecamatan. Masukan dari beberapa narasumber tersebut merupakan referensi dalam penyusunan draft awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan di tingkat tim penyusun baru dilakukan pembahasan melalui Forum Musrenbang Kabupaten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Sinkronisasi Perencanaan Usulan Proyek Tahun Anggaran 2006.

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tersebut telah kami susun dalam format dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

- ⇒ **Visi Dan Misi Daerah**
- ⇒ **Gambaran Kondisi Umum Daerah**
- ⇒ **Isu Dan Masalah Mendasar**

B. Maksud Dan Tujuan

C. Proses Dan Sistematika Penyusunan RKPD

Bab II : Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Lamongan

Bab III : Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV : Rancangan Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006

Bab V : Rancangan Kerja Dan Pendanaan

Bab VI : Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN

A. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2004

Memasuki tahun 2005, perekonomian Kabupaten Lamongan dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Sebagai bagian integral dari perekonomian regional Jawa Timur dan perekonomian nasional Indonesia dari sisi eksternal, masih lemahnya pertumbuhan volume perdagangan/ distribusi terkait dengan tingkat persaingan global. Sementara itu disisi internal, tantangan yang ada juga tak kalah beratnya. Hal ini tercermin pada kondisi makro ekonomi yang belum sepenuhnya stabil sebagaimana tergambar dari masih tingginya inflasi dan fluktuatifnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini sudah barang tentu memungkinkan juga mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Lamongan. Namun demikian kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan secara umum ditentukan pula oleh faktor-faktor lokal seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan kewirausahaan.

Sejalan adanya berbagai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal oleh pemerintah pusat, dan seiring itu pula dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah serta didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang cukup terkendali membawa dampak yang positif bagi perkembangan makro ekonomi Kabupaten Lamongan di tahun 2004. Kondisi makro ekonomi Kabupaten Lamongan yang relatif stabil meskipun fluktuatif, dengan inflasi yang cenderung menurun. Pada tahun 1999 inflasi mencapai 9,42 % dan selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi 6,13 %. Dengan menurunnya inflasi diharapkan perekonomian Kabupaten Lamongan tumbuh lebih cepat.

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 10,44 % dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 3.913.125.940.000,- meningkat menjadi sebesar Rp. 4.321.843.630.000,- di tahun 2004. Sedangkan berdasarkan harga konstan PDRB mengalami peningkatan dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.232.194.950.000,- meningkat menjadi Rp. 1.282.242.320.000,- pada tahun 2004, dengan demikian diperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,06%, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,68%.

Berdasarkan tingkat struktur ekonomi yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan besar yakni sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan galian), sektor

sekunder (sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih serta konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa). Kondisi struktur ekonomi Kabupaten Lamongan belum terjadi pergeseran yang signifikan, meskipun peranan sektor primer cenderung menurun dan sektor sekunder maupun tersier cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa peranan sektor primer selama 5 (lima) tahun terakhir semakin menurun yakni dari 53,42% pada tahun 2000 menjadi 47,92 % pada tahun 2004 terhadap total PDRB. Pada periode yang sama sektor sekunder meningkat dari 9,63% pada tahun 2000 menjadi 9,87 % pada tahun 2004, demikian pula sektor tersier meningkat dari 36,95 % pada tahun 2000 menjadi 42,21 % pada tahun 2004.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang meningkat dari tahun ke tahun dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan 3 (tiga) sektor utama yang membentuk PDRB Kabupaten Lamongan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 22,76% meningkat dibanding tahun 2003 yang mencapai sebesar 20,08%. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,58% meningkat dibanding tahun 2003 yang sebesar 5,94%. Serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 5,8% meningkat bila dibandingkan tahun 2003 yang mencapai sebesar 5,04%.

Apabila dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Lamongan sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membentuk PDRB-ADHK Kabupaten Lamongan tahun 2004 masing-masing sebesar 0,7 %, 17,93% dan 6,14%.

Perkembangan 3 (tiga) sektor tersebut, yang semakin membaik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi tahun 1997 akan mendorong kembali gairah ekonomi Kabupaten Lamongan. Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan juga bergantung pada ketiga sektor tersebut disamping sektor utama sektor pertanian. Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan yang secara total pangsanya pada tahun 2004 kontribusinya mencapai sebesar 66,52 % dari total PDRB Lamongan.

Indikator lain untuk mengetahui kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita maupun income perkapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB perkapita Kabupaten Lamongan terus membaik. Pada tahun 2004 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp. 3.550.325,-

meningkat 8,27 % dibanding tahun 2003 yang mencapai Rp. 3.279.033,-. Sedangkan income perkapita Kabupaten Lamongan berdasarkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 mencapai Rp. 3.368.549,- atau meningkat 8,27 % dibanding tahun 2003 yang mencapai Rp. 3.111.146,-.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

Akselerasi perekonomian Kabupaten Lamongan tahun 2005 s/d 2006 akan banyak dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal, meliputi : (1) Meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang menciptakan peluang usaha lebih besar dan menuntut daya saing perekonomian yang lebih tinggi; (2) Dampak krisis ekonomi nasional meskipun dirasakan berangsur membaik, namun demikian potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari fluktuasinya nilai tukar rupiah.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan dalam dua tahun mendatang, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang diharapkan berlangsung secara aman, tertib dan kondusif, dengan diikuti kapasitas politik yang mantap; (2) Kepala Daerah terpilih secara langsung oleh rakyat, memiliki dorongan yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan kapabel, yang pada gilirannya akan menciptakan tatanan perekonomian yang lebih mantap; (3) Tumbuh dan berkembangnya pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui introduksi teknologi dan pemberdayaan sumberdaya manusia.

C. TANTANGAN POKOK

Dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2004, kondisi ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2005-2006. Tantangan-tantangan pokok tersebut antara lain :

- ⇒ Mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan harapan agar pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- ⇒ Mengoptimalkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

D. PROSPEK EKONOMI 2005-2006

Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Badan Pusat Statistik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan masing-masing mencapai 4,04% dan realisasinya sedikit di atas angka kisaran tersebut yakni 4,06 %. Lebih tingginya angka realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tersebut antara lain disumbangkan oleh semua sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 %, kecuali sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 1,08 % dan 2,23 %. Oleh karena sektor pertanian memiliki kontribusi sangat besar dalam struktur perekonomian daerah, sedangkan pertumbuhannya kecil, maka secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2004 sebesar 4,06 %.

Sumber pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2005 dan 2006, jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar dibandingkan dengan tahun 2004. Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan tetap memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Sedangkan sektor-sektor yang melambat pertumbuhannya (sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan jasa-jasa) diharapkan dapat segera dilakukan pembenahan-pembenahan internal dan eksternal serta terobosan kebijakan baik dari tingkat nasional, provinsi terlebih oleh tingkat daerah agar dapat segera menemukan solusi untuk mengatasi menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut.

Sementara itu, pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) yang akan dilaksanakan 30 Juni 2005 diharapkan menjadikan stimulus bagi perekonomian Kabupaten Lamongan terutama pada sektor perdagangan dan pertanian mengingat tingginya aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat dalam dinamika kehidupan dewasa ini.

Khusus sektor pertanian, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend pertumbuhan yang terus menurun. Pada tahun 2000 dicapai pertumbuhan 2,38 %, sedangkan pada tahun 2004 menurun mencapai angka pertumbuhan 1,08 %. Kondisi ini ditinjau dari aspek tujuan pembangunan telah sejalan dimana salah satu tujuan pembangunan di bidang ekonomi adalah adanya pergeseran struktur ekonomi yakni dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006

Penentuan skala prioritas pembangunan di daerah berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dan acuan pokok penyusunan perencanaan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat mencakup Agenda, Sasaran dan Skala Prioritas Pemerintah Pusat serta Kebijakan dan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur, disamping tetap melihat potensi daerah dan akar masalah di daerah serta berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun-tahun yang lalu, dengan tetap memperhatikan masukan dari aspirasi masyarakat mulii Stake Holder yang ada di daerah sebagai wujud dari pola pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Mendasari terhadap beberapa aturan dan kebijakan yang harus dipedomani tersebut sebagai frame di dalam kerangka penetapan Skala Prioritas Daerah, maka untuk membangun Lamongan kedepan khususnya jangka pendek pembangunan 1 (satu) tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2006 dapat disampaikan sebagai berikut :

- A. Meningkatkan rasa aman dan damai melalui :**
 - 1. Peningkatan rasa aman dan harmonisasi antar kelompok
 - 2. Pengembangan kebudayaan yang bernilai luhur
 - 3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas
- B. Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum melalui :**
 - 1. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk
 - 2. Penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia
 - 3. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- C. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui :**
 - 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
 - 2. Menciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional melalui pembinaan karier yang bersih dari intervensi politik
- D. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :**
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan pajak-pajak dan retribusi daerah dari berbagai sektor
 3. Optimalisasi pengelolaan badan-badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku
- E. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah melalui :**
1. Melanjutkan pembangunan dermaga penyeberangan antar pulau (ASDP)
 2. Melanjutkan pengembangan Lamongan Integrated Sorbase (LIS)
 3. Melanjutkan pembangunan Zona Kawasan Wisata WBL – Goa Maharani
 4. Merealisasikan pembangunan DOK Perkapalan
- F. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan melalui :**
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
 3. Peningkatan perlindungan sosial
 4. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga
 5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- G. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui :**
1. Pembangunan Pusat Agribis Hasil Bumi di Babat
 2. Merealisasikan Intake Kanan Bengawan Jero, Ring Dike Rawa Jabung, pengendalian banjir dan intruksi air laut Kuro Barage
 3. Mewujudkan ketersediaan air baku dari potensi Kali Lamong
 4. Pengembangan Agribis Bidang Pertanian di Wilayah Selatan
 5. Pengembangan Kawasan Industri dan Permukiman Wilayah Lamongan Timur Selatan,antisipasi melubernya pengembangan Surabaya Barat Selatan (Surabaya Metropolitan Area)
 6. Merealisasikan Peluang Infestasi di Kabupaten Lamongan (Hotel, Kawasan Perdagangan, One Stop Service, dll)

7. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah, bantuan pendanaan dan pemasarannya
8. Membedah perekonomian desa melalui akses jalan poros desa dan pasar desa

H. Meningkatnya kualitas infra struktur melalui :

1. Memperbaiki kondisi kualitas sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten
2. Merealisasikan pembangunan Gerdu Induk PLN dan Instalasi Air Bersih di Pantura
3. Mewujudkan Jalur Lingkar Selatan Pantura untuk mengatasi kemacetan
4. Mewujudkan Jalur Lingkar Utara Lamongan (Ring Road Utara)
5. Mewujudkan Jalur Lingkar Selatan Babat (Ring Road Lintas Wilayah Lamongan - Bojonegoro) dan Pembangunan terminal baru Babat
6. Memfasilitasi masuknya sarana Kereta Api Komuter
7. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
8. Perluasan kapasitas infrastruktur
9. Meningkatnya partisipasi swasta
10. Peningkatan akses kapital penduduk dalam pembangunan dan perbaikan rumah
11. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum pada masyarakat
12. Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi

I. Menurunnya jumlah penduduk miskin melalui beberapa program yang terintegreted melalui :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Revitalisasi pertanian
3. Pemberdayaan Koperasi dan PKM
4. Peningkatan kemampuan IPTEK
5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan
6. Pemantapan stabilitas ekonomi inakro

J. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah melalui :

1. Pembangunan perdesaan
2. Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah

K. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam melalui :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara efisien, adil dan berkelanjutan.
2. Mencegah kerusakan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
3. Memulihkan kondisi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

BAB IV RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH

Perkembangan Pendapatan Daerah sangat ditentukan kondisi ekonomi, dan perkembangan fiskal pemerintah, serta kebijakan Pemerintah Daerah. Namun demikian kebijakan Pemerintah Pusat sangat mewarnai terhadap perkembangan Pendapatan Daerah, hal ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap alokasi Pemerintah Pusat.

Rata-rata Pemerintah Daerah hanya memiliki proporsi 7 persen kapasitas fiskalnya terhadap seluruh pendapatan daerah, hal ini bisa ditunjukkan adanya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah total Pendapatan Daerah DI Kabupaten Lamongan.

Untuk itu dalam mengurangi ketergantungan fiskal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mendorong untuk melakukan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Melihat kondisi diatas, estmasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen. Adapun tingkat estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 dapat disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini :

**TABEL 1
PROSENTASI ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

APBD	2004	2005	2006*)
Pendapatan Asli Daerah	12,10%	3,71%	14,00%
Dana perimbangan	4,13%	5,21%	9,00%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-29,77%	-21,74%	0,00%
Pendapatan Daerah	2,29%	3,73%	9,09%

Proyeksi kenaikan 9,09 persen Pendapatan Daerah tersebut, berasal dari beberapa komponen, yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 diproyeksikan mengalami kenaikan 14 persen apabila dibandingkan dengan kondisi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2005. Kenaikan tersebut karena memperhitungkan kondisi pada Perubahan Pendapatan Asli Daerah yang diestimasikan mengalami kenaikan kurang lebih 2 milyar, atau mengalami kenaikan sebesar 7 %, sehingga apabila dibandingkan dengan kondisi APBD Tahun 2005, estimasi tahun 2006 didapat 14 persen.
2. Dana Perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan 9 persen, dengan memperhatikan tingkat kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Perimbangan Pemerintah Propinsi.
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami kenaikan karena komponen ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat esensial.

Adapun besaran kuantitatif estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 dapat dikemukakan sebagai berikut :

TABEL 2
ESTIMASI KUANTITATIF
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006
Pendapatan Asli Daerah	34.864.317.550,00	36.156.457.550,00	41.218.361.607,00
Dana perimbangan	346.711.247.000,00	364.791.247.000,00	397.622.459.230,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	20.150.948.000,00	15.770.000.000,00	15.770.000.000,00
Pendapatan Daerah	401.726.512.550,00	416.717.704.550,00	454.610.820.837,00

B. ESTIMASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pembangunan pada Pemerintah. Sebagai suatu kebijakan maka besaran belanja sangat dipengaruhi oleh besaran kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan didasarkan pada estimasi Pendapatan Daerah diatas, prosentase kenaikan pada Belanja Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3
PROSENTASI ESTIMASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006*)
Belanja	5,72%	-1,75%	7,22%
Aparatur Daerah	0,02%	-9,89%	5,81%
Belanja AU	6,85%	4,93%	7,00%
Belanja O dan P	8,94%	-11,37%	-5,00%
Belanja Modal	-23,37%	-71,26%	3,00%
Pelayanan Publik	7,92%	1,16%	7,67%
Belanja AU	2,84%	1,00%	7,00%
Belanja O dan P	19,37%	-28,55%	-5,00%
Belanja Modal	-19,89%	-20,22%	2,00%
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	52,18%	25,04%	20,00%
Belanja Tidak Tersangka	-18,01%	110,71%	-50,00%

Sedangkan estimasi kuantitatifnya dapat disajikan pada Tabel 4, dibawah ini :

TABEL 4
ESTIMASI KUANTITATIF
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006
Belanja	436.288.089.500,00	428.663.173.665,00	459.609.546.943,55
Aparatur Daerah	114.948.407.800,00	103.581.190.765,00	109.599.870.590,55
Belanja AU	85.214.857.800,00	89.415.847.765,00	95.674.957.108,55
Belanja O dan P	9.384.498.310,00	8.317.372.600,00	7.901.503.970,00
Belanja Modal	20.349.051.690,00	5.847.970.400,00	6.023.409.512,00
Pelayanan Publik	321.339.681.700,00	325.081.982.900,00	350.009.676.353,00
Belanja AU	191.676.092.700,00	193.595.097.900,00	207.146.754.753,00
Belanja O dan P	35.754.832.000,00	25.545.932.000,00	24.268.635.400,00
Belanja Modal	30.671.912.000,00	24.471.430.000,00	24.960.858.600,00
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	60.436.845.000,00	75.569.523.000,00	90.683.427.600,00
Belanja Tidak Tersangka	2.800.000.000,00	5.900.000.000,00	2.950.000.000,00

BAB V

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN

Kompleksitas Permasalahan yang dihadapi oleh daerah, menuntut adanya kreativitas dari Penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk lebih jeli dalam mengembangkan daya kreatif dan inovatif untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Permasalahan mendasar yang perlu dan tetap harus diwaspadai dan diperhatikan adalah adanya pergeseran budaya dan perilaku masyarakat yang lebih cenderung hanya menuntut hak-haknya selaku warga masyarakat, dibandingkan dengan pemenuhan terhadap kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat.

Kemajuan pembangunan dibidang teknologi informasi yang cukup pesat, melalui transparansi di berbagai bidang dapat mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya yang bermuara untuk selalu mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Untuk menghindari terhadap berbagai hal yang menyangkut segala permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah perlunya sebuah konsep perencanaan yang komprehensif dan menyentuh pada semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap permasalahan kebutuhan akan hak-hak dasar masyarakat.

Agar sebuah perencanaan memenuhi azas pemerataan, keadilan dan transparansi, pertimbangan utama yang harus dilakukan dalam penentuan skala prioritas pembangunan adalah memperhatikan potensi dan kondisi daerah serta akar permasalahan yang dihadapi daerah, untuk itu agar memudahkan pemahaman terhadap rancangan kerja serta besaran pendanaan yang dibutuhkan, dikelompokkan pada 21 Bidang Pembangunan sebagaimana kewenangan yang diberikan pada daerah sesuai Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 sebagai berikut :

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang mendasari pelaksanaan otonomi di daerah merupakan sebuah harapan dan tantangan bagi daerah. Perubahan yang mendasar, adalah daerah telah memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah, termasuk mengatur dan mengelola Administrasi Umum Pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi setempat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut jeli didalam memanfaatkan potensi yang ada, untuk digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Sebagai Implementasi dari bentuk kewenangan tersebut, maka dibutuhkan adanya kreativitas bagi daerah untuk dapat, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya agar pengelolaannya dapat memberikan hasil guna yang diharapkan. Untuk itu tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan Administrasi Umum Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kehendak dokumen Perencanaan Umum Daerah, baik Poldas, Propeda, Renstra serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Khusus Kewenangan Pembangunan Bidang Administrasi Umum, maka beberapa sub bidang tercakup didalamnya dan dioperasikan oleh Unit-unit Satuan Kerja meliputi : Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Keuangan dan Barang Daerah, Kantor Perijinan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Infokom dan Kantor PDE, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kesbang dan Linmas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pasar Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.

B. KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah selalu diarahkan untuk lebih meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kemampuan dan profesional aparatur serta dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang sangat mutlak diperlukan.

Perkembangan terakhir sejak era reformasi bergulir sistem, mekanisme dan kelembagaan pemerintah berkali-kali mengalami perubahan utk menuju pd sistem konsep tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang ramping struktur kaya fungsi.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perkembangan terakhir jumlah kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ada 12 Dinas, 15 lembaga terkait daerah (Badan/Kantor), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur dari unsur PNS sebanyak 11.125 personil atau dengan dibantu tenaga kontrak sebanyak 840 personil.

Akibat dari berbagai perubahan kelembagaan yang berdampak pada terjadinya merger antar lembaga, maka ada beberapa kelembagaan yang secara proposional kurang memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana perkantoran maupun sarana-sarana lain yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran maupun tugas lapangan.

Dalam ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hubungan kerja (koordinasi) antar lembaga unit kerja Pemerintah Daerah berjalan mantap, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD berjalan dengan baik, serasi dan harmonis, keterlibatan dan pelayanan administrasi telah disusun baik meliputi : Tata Naskah Dinas, Waskat, Lakip, Program Kerja, Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja, Tata Ruang, Standart Pelayanan Minimal dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pengawasan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan mendorong adanya sinergi pengecekan dan pengujian silang dari pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang bermuara terhadap pengawasan melekat.

Kabupaten Lamongan yang memiliki 27 kecamatan dengan 474 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk Tahun 2004 sebanyak 1.224.817 jiwa dengan luas wilayah 1.812,80 km, masih memiliki penduduk miskin sebanyak 73.708 rumah tangga miskin dari 293.944 rumah tangga yang ada, untuk itu ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era mendatang.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan dan profesional.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja terhadap pencapaian pelaksanaan tugas;
- b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalagunaan wewenang dan kebocoran serta pemborosan keuangan negara dari segala bentuk penyimpangan;
- c. meningkatkan kemampuan aparatur dalam merangsang peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ditunjang oleh peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah dan peningkatan serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama aparatur pemerintah di daerah baik aparatur pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pembangunan aparatur pemerintah yang mantap;
- e. Meningkatkan pendayagunaan sistem pengawasan dan efektifitas pelaksanaan melalui pembimbingan, pengarahan, pengendalian dan penertiban yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur pemerintah;
- f. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan profesional tidak menyalahgunakan wewenang, bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;
- g. Tertatanya manajemen aparatur pemerintah di daerah yang mampu berperan dalam meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan memiliki Arah dan kebijakan Umum antara lain meliputi : **1. Pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kemampuan keuangan daerah, b) Tersedianya kelembagaan organisasi sesuai dengan kebutuhan, c) Tersedianya sisdur metode kerja d) Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. **2. Pemantapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten** dengan strategi dan prioritas a) Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat Daerah dan pengidentifikasian tugas jabatan, b) Terlaksananya sistem dan prosedur pelayanan publik serta ketatalaksanaan sistem perkantoran, c) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pendayagunaan aparatur. **3. Peningkatan peran DPRD dan pemantapan tata kerja DPRD** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan produk-produk DPRD, b) Peningkatan kapasitas SDM DPRD, c)

Administrasi Umum dan Kualitas Pelayanan dengan strategi dan prioritas a) Tersedianya SDM Aparatur yang profesional, b) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional, c) Peningkatan kesejahteraan aparatur. 5. Terwujudnya pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dengan strategi dan prioritas a) Terjalannya kemitraan kerja eksekutif – legislatif – NGO'S, b) Terjalannya keharmonisan hubungan antara sesama anggota Muspida, c) Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, d) Memfasilitasi keberadaan NGO'S. 6. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan strategi dan prioritas a) Meningkatnya pemahaman dan kualitas dalam pelaksanaan budaya politik yang baik dan demokratis, b) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, c) Terbangunnya komunikasi politik yang harmonis di daerah, d) Peningkatan pemahaman tentang HAM, e) Melakukan kajian strategis dibidang politik, sosial ekonomi dan sosial budaya, f) Menjalin hubungan kemitraan dengan multi stake holder di daerah, g) Peningkatan Pendidikan Politik. 7. Peningkatan pembinaan kehidupan beragama dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pembinaan dan bimbingan kerukunan hidup umat beragama, b) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan (Pendidikan dan tempat ibadah), c) Temu akrab para pemuka agama. 8. Peningkatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana informasi masyarakat, b) Terjalannya hubungan kemitraan dengan pers, c) Pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat melalui pelaksanaan seminar/lokakarya/sarasean dan diskusi serta pelatihan, d) Peningkatan penyebarluasan informasi dalam bentuk penerbitan, pemutaran film, siaran radio, siaran keliling, pameran foto pembangunan dan pembinaan pertunjukan rakyat, e) Peningkatan pengelolaan dokumentasi dan arsip daerah, f) Peningkatan operasional perpustakaan umum dan perpustakaan keliling milik daerah, g) Peningkatan sistem jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan daerah. 9. Peningkatan sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, bantuan hukum dan produk-produk hukum dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi hukum dan sarana hukum, b) Pembentukan transparansi produk hukum daerah, c) Peningkatan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pembinaan KADARKUM, d) Pemberian bantuan hukum kepada penyelenggara pemerintahan di Daerah. 10. Pemantapan pelaksanaan pembangunan daerah dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, b) Peningkatan pelaksanaan Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah, c) Peningkatan pengendalian pembangunan daerah, d) Intensifikasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah,

e) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah. **11. Peningkatan perekonomian daerah dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan pelayanan dalam permodalan usaha masyarakat, b) Penataan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, c) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, d) Ketersediaan sarana informasi dibidang bisnis, e) Terciptanya produk hukum sebagai regulasi bagi dunia usaha, f) Terbangunnya sentra-sentra industri kecil, g) Terbangunnya sarana dan prasarana terminal agro bisnis pada tempat-tempat strategis sesuai dengan potensi, h) Menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. **12. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan diklat yang memiliki kompetensi dan mekanisme yang jelas, b) Peningkatan pengolahan data dan pelayanan informasi kepegawaian, c) Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat, d) Pemenuhan jumlah pegawai sesuai kebutuhan nyata dan profesionalisme, e) Peningkatan manajemen dan ketatausahaan kepegawaian, f) Peningkatan pengembangan karier PNS secara profesional dan berkesinambungan, g) Peningkatan kedisiplinan pegawai, h) Peningkatan kesejahteraan pegawai, i) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian melalui sistem pembinaan karier dan prestasi kerja. **13. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dengan strategi dan prioritas** a) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja, b) Terbangunnya analisa kebutuhan barang, c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, d) Inventarisasi dan pengendalian aset-aset daerah, e) Pembangunan sistem informasi manajemen barang-barang daerah yang secara maksimal dapat merekam aset-aset daerah. **14. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sek-retaris Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan pelaksanaan operasional penyelenggaraan rumah-tangga pejabat daerah, b) Peningkatan sarana gedung tempat tinggal/tempat kerja beserta fasilitas pendukung lainnya yang representatif, c) Optimalisasi sistem pemeliharaan gedung/tempat tinggal/kantor dan pelayanan sarana transportasi dinas. **15. Pemantapan perencanaan pembangunan daerah dengan strategi dan prioritas** a) Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang kredible, b) Peningkatan kualitas produk kebijakan publik, c) Peningkatan kualitas produk perencanaan yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, d) Keterlibatan multi stake holder dalam proses perencanaan pembangunan, e) Terbangunnya KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) lintas sektor dan instansi, f) Peningkatan hasil kajian dan penelitian Pembangunan daerah, g) Keterlibatan perguruan tinggi setempat dalam berbagai kerjasama penelitian dalam rangka pemberdayaan perguruan tinggi lokal, h) Peningkatan SDM Aparatur Perencanaan yang profesional. **16. Peningkatan**

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan tranparansi dan akuntabilitas serta poningkatan pengelolaan barang daerah secara efisien dan efektif dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis standar akuntansi keuangan daerah, b) Pemantapan pelaksanaan penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja, c) Pemantapan pelaksanaan pencatatan keuangan daerah yang berbasis sistem akuntansi double entry, akuntabilitas dan acceptable, d) Melaksanakan keterpaduan sistem informasi keuangan Daerah, e) Peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan yang cepat dan tepat, f) Peningkatkan SDM pengelola keuangan daerah secara profesional, g) Peningkatan pengembangan usaha perusahaan daerah, h) Pendataan secara akurat barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah sebagai aset daerah, i) Peningkatan pemanfaatan aset-aset daerah, j) Membangun sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA), k) Terbangunnya sistem analisa kebutuhan barang, l) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja, m) Pengendalian dan pengawasan aset-aset daerah.

17. Peningkatan pendapatan daerah dengan strategi dan prioritas a) Pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi daerah, dan PBB, b) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah meliputi PAD, PBB dan Dana Perimbangan, c) Penyusunan dan penerapan sistem dan prosedur (Sisdur) Administrasi penerimaan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain, d) Pembinaan teknik melalui pelatihan, kursus dan diklat tentang manajemen pengelolaan pendapatan daerah, e) Membangun jaringan system informasi pendapatan daerah (Revenue Information System Network) f) Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak, retribusi daerah terhadap obyek/subyek pungutan baru, g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

18. Peningkatan kualitas pengawasan daerah dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pendayagunaan sistem pengawasan fungsional melalui pengawasan reguler, insidentil maupun khusus, b) Optimalisasi pemantauan pada instansi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik, c) Klarifikasi kasus-kasus pengaduan masyarakat, d) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

19. Membangun Jaringan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dengan strategi dan prioritas a) Tersedianya sarana dan prasarana perangkat Telematika, b) Tersedianya sarana jaringan komunikasi data, c) Tersedianya aplikasi secara bertahap yang mencakup semua bidang, d) Tersedianya sarana dan prasarana sandi dan radiogram.

20. Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan, b) Pembinaan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, c) Ketersediaan dukungan fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, d) Monitoring

dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, e) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa/Kel, f) Peningkatan kualitas forum musyawarah pembangunan desa, g) Peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan, h) Peningkatan SDM Perangkat Desa/Kelurahan, i) Peningkatan pemberian bantuan tanah kas desa pada desa-desa miskin, j) Peningkatan pemberian bantuan dana dan managerial pada desa-desa miskin. 21. **Peningkatan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, b) Mendorong terwujudnya swadaya mumi masyarakat dalam menunjang Program Pembangunan Desa, c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, d) Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menyerap Alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan SDA, e) Penataan perumahan, pemukiman dan kawasan (terpadu dan pesisir/pantai), f) Peningkatan program pengentasan kemiskinan di Desa/Kelurahan, g) Peningkatan peran masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa, h) Peningkatan bantuan dana pembangunan Desa/Kelurahan secara langsung, i) Peningkatan bantuan dana bagi Pemerintah Desa, BPD dan LPM, j) Peningkatan program pembinaan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, k) Pendayagunaan pendataan profil Desa/Kelurahan dalam peningkatan pembangunan Desa, l) Pelaksanaan evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan, m) Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pedesaan guna menunjang Bina Usaha Lingkungan dan Manusia. 22) **Peningkatan ketentraman, ketertiban, Keamanan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan SDM Pol PP melalui pendidikan dan latihan, b) Meningkatkan pembinaan ketentraman, Ketertiban masyarakat dan kesamaptaan, c) Meningkatkan perlindungan masyarakat akan keamanan, d) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana operasional Pol PP, e) Kemandirian personil dalam tugas operasioal, f) Peningkatan kesejahteraan personil Pol PP, g) Meningkatkan penegakan peraturan daerah

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Administrasi Umum sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIJANG : UMUM PEMERINTAHAN

No	Kode	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	A1a	Pembelian kendaraan ringan daerah	Pembelian paket perijin Kecamatan	Kab. Lamongan	40 orang	Rp	40.000.000,00	Layanan	Permanen	
2	A1b	Terjadinya berbagai organisasi sosial dengan kebutuhan	Sosialisasikan perijin perijin bagi pengurus BPD dan LPMs	27 Kecamatan	1.000 orang	Rp	62.500.000,00	Layanan	Permanen	
3	A2a	Tingkatkan peranan lembaga jabatan pengorganisasian tingkat jabatan	Pembelian Bata Perumahan Perijin:	Kab. Lamongan	3 buah	Rp	40.000.000,00	Layanan	Permanen	
4	A3a	Pengadaan SDM Aparatur yang profesional	Pembelian poster perijinan perijin, surat perijin dan vidio penyelesaian perijin	Kab. Lamongan	2.500 lembar	Rp	25.000.000,00	Belanja	Permanen	
5	A3a	Pengadaan SDM Aparatur yang profesional	Pengadaan modul/Orang untuk ke Survey	Kab. Lamongan	1 unit	Rp	175.000.000,00	Belanja	Permanen	
6	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pengadaan Sepeda motor merek Honda Wn untuk Kantor Perijin	27 Kecamatan	27 unit	Rp	262.500.000,00	Belanja	Permanen	
7	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pengadaan Sepeda motor merek Honda Fa untuk Kantor Perijin	Kab. Lamongan	2 unit	Rp	22.000.000,00	Belanja	Permanen	
8	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pembangunan kantor perijin	Kab. Lamongan	1 unit lengkap	Belanja	LS	Belanja	Permanen	
9	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pengadaan rek arsip	Kab. Lamongan	1 unit	Rp	5.000.000,00	Belanja	Permanen	
10	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pembelian dan aset/aset organisasi perangkat Daerah	Kabupaten Lamongan	15 unit karya	Rp	50.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	
11	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Budaya kerja etika jabatan	Kabupaten Lamongan	40 orang	Rp	50.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	
12	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pengukuhan etika jabatan jabatan	Kabupaten Lamongan	5 unit karya	Rp	50.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	
13	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pembinaan perincoran jabatan PNS bimbingan hasil APL/AB	Kabupaten Lamongan	20 unit karya	Rp	130.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	
14	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pengembangan etika kerja DPPD	Kabupaten Lamongan	.	Rp	50.000.000,00	Belanja	Kebudayaan	
15	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Pembelian Aparat Kacamata se Kab. Lamongan	Kabupaten Lamongan	27 Kac	Rp	50.000.000,00	Belanja	Begian Pemas	
16	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Kontribusi dan metode ISO 9001:2000 untuk Sekretariat Daerah Kab. Lamongan	Kabupaten Lamongan	1 unit karya	Rp	175.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	
17	A3b	Terjadinya sarana dan prasarana perijinan operasional	Kontribusi ISO 9001:2000 untuk Soegri	Kabupaten Lamongan	1 unit karya	Rp	10.000.000,00	Layanan	Begian Organisasi	

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (Btl.)	USULAN INSTANSI
15	Terdapatnya hubungan komunikasi dengan Pesisir	A.3.b	5 Pengadaan handelan roda 2	Kantor Hibkom	5 unit	Rp 70,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			6 Pengadaan AC	Kantor Hibkom	1 unit	Rp 5,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			7 Pengadaan Kamera/Toolbox	Kantor Hibkom	2 unit	Rp 16,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			8 Pengadaan Blitz	Kantor Hibkom	2 unit	Rp 9,242,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			9 Pengadaan Camcorder Digital	Kantor Hibkom	2 unit	Rp 20,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			10 Pengadaan Alat Optik Foto Digital	Kantor Hibkom	1 unit	Rp 8,500,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			11 Pengadaan Tape (Perekam)	Kantor Hibkom	4 unit	Rp 2,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			12 Pengadaan VCD Proyektor untuk pemutaran film	Kantor Hibkom	Model V7 460	Rp 36,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			13 Pengadaan Radio Tape Mobil	Kantor Hibkom	1 unit	Rp 6,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			14 Pengadaan meja	Kantor Hibkom	8 unit	Rp 2,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			15 Pengadaan Organ	Kantor Hibkom	Roller Type FA-3	Rp 15,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			16 Pengadaan Perangkat Sound System	Kantor Hibkom	Carvi Type KB 1000	Rp 15,000,000.00	Beru	Kantor Hibkom
15	Terdapatnya hubungan komunikasi dengan Pesisir	A.3.b	1 Pembinaan kesehatan dan media massa	Kab. Lamongan	-	Rp 656,000,000.00	Lanjutan	Bag. Humas
16	Pembudayaan kelompok komunikasi masyarakat melalui pelaksanaan	A.3.c	1 Pembudayaan dan peningkatan kelompok komunikasi masyarakat (KKM)	Kec. Sugio, Tiung, Kedungping, Sulo/Adi	4 kegiatan	Rp 86,400,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom
17	Peningkatan penyebaran informasi dalam bentuk pameran, pemutaran film, siaran radio, siaran televisi, pameran foto pembangunan dan pembinaan penunjang rakyat	A.3.d	1 Sosialisasi program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah	Desa se Kab. Lamongan	72 kegiatan	Rp 82,860,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom
			2 Pengadaan papan plar Diskuliah (Tulisan lebar arab) Bembeluhmanarohim, Albu albar, Lathalathin, Muhammad Rusulullah, La Hausi Was Kusta la bahril Ayyil Azbin	Jen. Raya Lamongan, Babat, Ponoran dan Mestap	20 Buah	Rp 25,400,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			3 Pengadaan papan tirangan (Jangan minum minuman keras beralkohol, anah maupun Toak)	Jl. raya Ponoran-Lamongan, Lamongan-Babat, Lamongan-Sugio, Lamongan-Ngipin	10 Buah	Rp 2,750,000.00	Beru	Kantor Hibkom
			4 Penyebaran informasi melalui pertunjukan dan pameran keliling	Kabupaten Lamongan	60 Kali	Rp 88,400,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom
			5 Pemutaran Film	Kabupaten Lamongan	96 Kali	Rp 47,520,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom
			6 Siaran Keliling	Kabupaten Lamongan	96 Kali	Rp 26,408,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom
			7 Siaran Radio	Kabupaten Lamongan	96 Kali	Rp 36,120,000.00	Lanjutan	Kantor Hibkom

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERIKUAAN BAYAN	KETERANGAN (BTL)	USULAN INSTANSI
28	Mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat	A.11.c	3 Pembangunan pasar desa	- Dis Kedungring Kec. Kedungring - Dis Godeg Kec. Laren - Dis Bluri Kec. Sabburo	3 desa	Rp 450,000,000.00	Baru	Kart. Pengalokasian Pasar
			4 Pengembangan jaringan kantor Unit Pelayanan di wilayah kecamatan	Buluk, Tur, Sucrename	6 x 12	Rp 195,000,000.00	Lanjutan	PO. BPR Bank Prestar
			5 Pengalokasian sarana pabrik pupuk organik mahasiswa	Pabrik pupuk Mahanani Tlung	- Tempat penyimpanan - Aliran asam - Gudang bahan baku - Rehab pagar pabrik	Rp 46,750,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 98,000,000.00 Rp 48,500,000.00	Baru	Distanhut
			1 Penyediaan sarana usaha ekonomi masyarakat melalui kegiatan Minggu Cerdas	Kab. Lamongan	52 kali	Rp 20,000,000.00	Lanjutan	Beg. Perekonomian (pada TA. 2004-2005 masuk kegiatan Promosi Polena dan Produk Daerah)
			1 Diklat Struktural - Diklat II, III, IV	Kabupaten Lamongan	54 orang	Rp 427,265,000.00	Lanjutan	BKD
29	Penyalnggaraan diklat yang memiliki kpanai dan mekanisme yang jelas	A.12.a	2 Diklat Teoritis Fungsional: Diklat peningkatan kinerja tenaga moads Diklat manajemen pelayanan prime Diklat komputer Tingkat lanjut Diklat Pening. Kinerja Peny. Bcd. Hiyas Diklat Kepenerwatan Diklat MES Diklat Unit Mata Pelajaran	Kabupaten Lamongan	286 orang	Rp 700,000,000.00	Baru	BKD
			3 Diklat Pemerintahan dan Lanjutan Diklat Pra Jabatan STPON Tugas Belajar	Kabupaten Lamongan	200 orang 5 orang 120 orang	Rp 290,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 329,325,000.00	Baru Baru Baru	BKD BKD BKD
			4 Pembinaan dan pengadain penataan kontrak	Kabupaten Lamongan	-	Rp 75,000,000.00	Lanjutan	Kesbanghmas
			5 Pelatihan tenaga teknis	Kecamatan	-	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Kesbanghmas
			1 Pengadain SIMPEG	BKD	15 unit	Rp 250,000,000.00	Lanjutan	BKD
30	Peningkatan pengobbian dan pelayanan informasi kepegawaian	A.12.b	1 BARTEX-LAKIP	Kabupaten Lamongan	100 Orang	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Begian Organisasi
			2 Penyusunan Laku Bupat dan Sekda	Kabupaten Lamongan	50 Unit Kerja	Rp 75,000,000.00	Lanjutan	Begian Organisasi
31	Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat	A.12.c						

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERkiraan BAYU	KETERANGAN (Btl)	USULAN INSTANSI
32	Fasilitasi jumlah pegawai sesuai kebutuhan nyata dan profesional	A.12.d	Pengadaan CPNSD Tahun 2006	BKD	200 orang	Rp 350.000.000,00	Ban	BKD
33	Fasilitasi manajemen dan pelaksanaan kepegawaian	A.12.e	Pemb. Himpun & ketelausahaan kepegawaian	Kabupaten Lamongan	100 orang/100 unit kerja	Rp 100.000.000,00	Ban	BKD
34	Fasilitasi pengembangan karier PNS secara profesional dan berkelanjutan	A.12.f	Ujian Dinas Kewajiban Pangkat	BKD	150 orang	Rp 25.000.000,00	Ban	BKD
35	Fasilitasi keadaban Pegawai	A.12.g	Pembinaan peningkatan disiplin pegawai dan penyelesaian kasus disiplin	Kabupaten Lamongan	-	Rp 40.000.000,00	Ban	BKD
36	Fasilitasi kesejahteraan Pegawai	A.12.i	Pembinaan dana santunan	Kabupaten Lamongan	350 orang	Rp 1.700.000.000,00	Lanjutan	BKD
37	Pembinaan dan pengawasan melalui sistem pemantauan dan prestasi kerja	A.12.j	Pembinaan dan pengawasan kinerja pegawai dengan PAJ	Kabupaten Lamongan	2.500 orang	Rp 30.000.000,00	Ban	BKD
38	Fasilitasi Sarana Prasarana Pektoran	A.12.k	Pembelian ruangan gedung Dinas dan satu meja menjadi dua buah	Kabupaten Lamongan	1 unit (31 m2)	Rp 585.000.000,00	Ban	Datuhut
1			Pembangunan kantor Gedung Dinas Pektoran dan Kektoran Kecamatan	Brondong, Daitik, Sokoto, Lerau, Turu, Plokok	5 unit	Rp 600.000.000,00	Ban	Datuhut
2			Pembelian Gedung Dinas Pektoran dan Kektoran Kecamatan	Harau, Hujung, Sukodadi, Pacoran	5 unit	Rp 180.000.000,00	Ban	Datuhut
3			Pengadaan handker dan roda dua	Dinas Pektoran dan Kektoran Kab. Lamongan	12 unit	Rp 180.000.000,00	Ban	Datuhut
4			Pengadaan handker dan roda dua untuk KOD dan SKSHH	Sokoto, Blitik	31 unit	Rp 455.000.000,00	Ban	Datuhut
5			Pengadaan perlengkapan kantor (almam, mesin ketik, meja, kursi)	Karanggeneng, Sekaten, Heduran	3 unit	Rp 30.000.000,00	Ban	Datuhut
3	Sosialisasi Budaya Kerja dan BH/TEK		Pendayagunaan Aparatur	Kabupaten Lamongan	150 Orang	Rp 75.000.000,00	Lanjutan	Bagian Organisasi
4	Pengembangan SDM bagi PNSD		Penyusunan Rancangan Sekretariat Daerah Tahun 2007-2011	Kabupaten Lamongan	1 buku	Rp 50.000.000,00	Ban	Bagian Organisasi
5			Pengadaan sarana dan prasarana kepegawaian	BKD	4 unit komputer, 5 unit meja, 3 unit kursi, 3 unit lemari besi	Rp 30.000.000,00	Ban	BKD

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KESISTEMAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	URAIAN (BENTUK/AMPEL)
7			Pemindahan listrik dan telepon, PDAM Kantor KCD	Sekeloa	1 unit	Rp 5.000.000,00	Baru	Desahut
8			Rehabilitasi gedung Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan / KCD Lamongan	Kabupaten Lamongan	1 unit	Rp 50.000.000,00	Baru	Desahut
9			Pengadaan kendaraan dinas roda empat	Kabupaten Lamongan	1 unit	Rp 200.000.000,00	Baru	Desahut
10			Pembangunan gedung Dinas Perindagrop Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	2 lantai	Rp 2.500.000.000,00	Baru	Indagrop
11			Pengadaan tanah dan kantor UPT Dinas KB dan Kessos	- Kecamatan Sobokro - Kecamatan Bluk	8 x 15m 10 x 20 m	Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00	Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos
12			Pengadaan kantor UPT Dinas KB dan Kessos	- Kecamatan Meduran - Kecamatan Babat - Kecamatan Sembang - Kecamatan Paciran	6 x 8 m 1 Unit 10 x 8 m 6 x 8 m	Rp 75.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Baru Baru Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos KB dan Kessos KB dan Kessos
13			Pembangunan jembatan kantor UPT Dinas KB dan Kessos	Kecamatan Desat	4 x 3 m	Rp 20.000.000,00	Baru	KB dan Kessos
14			Rehabilitasi kantor UPT Dinas KB dan Kessos	- Kecamatan Mubo - Kecamatan Tikung - Kecamatan Gajah - Kecamatan Laren - Kecamatan Supo - Kecamatan Kd. Pring - Kecamatan Lamongan - Kac. Krajan	6 x 12 m 1 unit 6,5 x 14,5 m 28,5 m 6 x 8 m 1 unit 200 m UPT KB & Pemul	Rp 30.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 20.000.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos
15			Pengadaan komputer	Dinas KB dan Kessos, Kac. Pucuk, Sobokro, Babat, Supo, Laren	7 unit	Rp 50.000.000,00	Baru	KB dan Kessos
16			Pengadaan kendaraan roda 2	Dinas KB dan Kessos, Kac. Pucuk, Sembang, Krajan, Bluk	10 unit	Rp 100.000.000,00	Baru	KB dan Kessos
17			Pengadaan meja, kursi dan ahian emp	Dinas KB dan Kessos, UPT Kac. Surodadi, Meduran	5 Unit / 17 Set / 2 Unit	Rp 35.000.000,00	Baru	KB dan Kessos
18			Pembangunan / Rehabilitasi pendopo, kantor dan rumah dinas camat	14 kecamatan di Kabupaten Lamongan	14 luas x Rp 75.000.000,-	1.050.000.000,00	Baru	Bagian Pem
19			Pembangunan balai baru untuk SIMDUK kecamatan	5 kecamatan	5 luas x Rp 50.000.000,-	250.000.000,00	Baru	Bagian Pem

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENDAHULUAN BIAYA	METERANGAN (BL)	URUTAN INSTANSI
20			Bantuan pembangunan pengaman SMDUK Kecamatan	13 Kecamatan	13 kec. X Rp. 5.000.000,-	66.000.000,00	Baru	Bagian Pem
21			Pembangunan UPT Kantor Kecamatan (Bank Pasar)	5 Kecamatan	5 kec. X Rp. 75.000.000,-	375.000.000,00	Baru	Bagian Pem
22			Pembangunan gedung dan pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Lamongan	4.000 m2	Rp 13.000.000.000,00	Baru	DIPRO
23			Kompiensasi surat menyurat	Kabupaten Lamongan	-	Rp 46.000.000,00	Lanjutan	Bagian Umum
24			Pengadaan Mini Bus	Kabupaten Lamongan	1 unit	Rp 350.000.000,00	Baru	Bagian Umum
25			Bantuan kegiatan KOPRPP	Kab. Lamongan	-	Rp 75.000.000,00	Lanjutan	Bag. Keemas
26			Pembangunan gudang dan rehab pagar depan	RSD Dr. Soegri	1 paket	Rp 150.000.000,00	Baru	RSD Soegri
27			Pengadaan panel genset otomatis	RSD Dr. Soegri	1 paket	Rp 40.000.000,00	Baru	RSD Soegri
28			Pembangunan gedung poliklinik, jalan lanta 2	RSD Dr. Soegri	155,5 m2	Rp 544.250.000,00	Baru	RSD Soegri
29			Pembangunan gedung IGD lanta 2	RSD Dr. Soegri	206 m2	Rp 622.500.000,00	Baru	RSD Soegri
30			Pembangunan gudang RS dan Bangkai	RSD Dr. Soegri	180 m2	Rp 280.000.000,00	Baru	RSD Soegri
31			Pembangunan ruang bedah	RSD Dr. Soegri	420 m2	Rp 735.000.000,00	Baru	RSD Soegri
32			Pembangunan gedung Ruang Inteme	RSD Dr. Soegri	420 m2	Rp 735.000.000,00	Baru	RSD Soegri
33			Pembangunan gedung Gencuk	RSD Dr. Soegri	70 m2	Rp 122.500.000,00	Baru	RSD Soegri
34			Pembangunan pagar beton - timur	RSD Dr. Soegri	360 m2	Rp 175.000.000,00	Baru	RSD Soegri
35			Pembangunan Selesar baru	RSD Dr. Soegri	227,5 m2	Rp 227.200.000,00	Baru	RSD Soegri
36			Pembelian alat angkut Ambulance	RSD Dr. Soegri	1 unit	Rp 360.000.000,00	Baru	RSD Soegri
37			Pembelian alat angkut Ops Carry	RSD Dr. Soegri	1 unit	Rp 65.000.000,00	Baru	RSD Soegri
38			Pembelian alat angkut Ops Iqiang	RSD Dr. Soegri	1 unit	Rp 200.000.000,00	Baru	RSD Soegri
39			Pembelian alat transportasi Sepeda Motor	RSD Dr. Soegri	2 unit	Rp 30.000.000,00	Baru	RSD Soegri
40			Pembelian alat komputer	RSD Dr. Soegri	3 unit	Rp 36.000.000,00	Baru	RSD Soegri
41			Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur Urmas	Kabupaten Lamongan	-	Rp 100.000.000,00	Lanjutan	Kesbang/umas

No	Program / Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
39	Penelitian sarana gedung tempat tinggal terpadu beserta fasilitas pendukung lainnya yang representatif								Kembanghinas
40	Perancangan sistem perencanaan pembangunan yang kredibel								Beppode
41	Penelitian kualitas produk saptausaha publik								Beppode
42	Penelitian kualitas produk perikanan yang mengedukasi masyarakat kepada masyarakat								Beppode
43	Pembangunan gedung Bebanghinas								Beppode
44	Pengadaan komputer								Beppode
45	Pengadaan Kandang ternak 2								Beppode
46	Pengadaan Meja Kerja Eselon II								Beppode
47	Pengadaan Kursi Kerja Eselon II								Beppode
48	Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV								Beppode
49	Pengadaan Kursi Kerja Staf								Beppode
50	Pengadaan Meja Baku								Beppode
51	Rehabilitasi Pondok Laka Tarra								Beppode
52	Perencanaan PDAB 2005								Beppode
53	Penyusunan Nersa Bahan Makanan (NSM)								Beppode
54	Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK)								Beppode
55	Penyusunan Misi Tubas Petani (MTP)								Beppode
56	Pendampingan pelaksanaan P2TP2								Beppode
57	Survey kelayakan lahan								Beppode
58	Penyusunan Sistem Informasi Ambiente (SIA/GRO)								Beppode
59	Revisi Profil Produk Unggulan								Beppode
60	Identifikasi dan profil lembaga Keuangan Mikro (LJKM)								Beppode
61	Analisis potensi dan kondisi perkembangan wilayah kecamatan								Beppode
62	Profil Investasi Kab. Lamongan								Beppode
63	Penyusunan potensi dan pemetaan lahan dan kebun rakyat								Beppode

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (Btl.)	USULAN INSTANSI				
43	Peningkatan hasil kajian dan penelitian pembangunan Daerah	A.15.f	7	Evaluasi daya dukung lahan dan perencanaan pengembangan sawah lelebak	12 Kecamatan	25 etasampul	Rp 90,000,000.00	Baru	Bappeda			
			8	Penyusunan RPJP Tahun 2006 - 2010	Kabupaten Lamongan	500 buku	Rp 250,000,000.00	Baru	Bappeda			
			9	Penyusunan RPJM Tahun 2006 - 2020	Kabupaten Lamongan	500 buku	Rp 250,000,000.00	Baru	Bappeda			
			10	Penyusunan RKPD Tahun 2007	Kabupaten Lamongan	500 buku	Rp 150,000,000.00	Baru	Bappeda			
			11	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2006	Kabupaten Lamongan	200 buku	Rp 250,000,000.00	Baru	Bappeda			
			12	Penelitian Umum, survey studi kelayakan usulan dan evaluasi pengendalian	Kabupaten Lamongan	600 buku	Rp 250,000,000.00	Baru	Bappeda			
			44	Peningkatan hasil kajian dan penelitian pembangunan Daerah	A.15.f	1	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi PKPS BSM	Kab. Lamongan	1 Paket	Rp 60,000,000.00	Lanjutan	Bappeda
						2	Penyusunan Buku LDA dia bebas	Kab. Lamongan	150 buku	Rp 75,000,000.00	Lanjutan	Bappeda
						3	Penyusunan Buku IPM	Kab. Lamongan	150 buku	Rp 30,000,000.00	Lanjutan	Bappeda
						4	Pengisian peta Kecamatan	Bebat, Lamongan, Padiran, Hentup, Ngimbang	500 etasampul	Rp 100,000,000.00	Baru	Bappeda
						1	Analisa Cash Budget dan penyusunan SKO	Kab. Lamongan	-	Rp 60,000,000.00	Lanjutan	BKSO
						2	Evaluasi dan konsolidasi RASK dan DASK	Kab. Lamongan	-	Rp 131,000,000.00	Lanjutan	BKSO
45	Peningkatan pelaksanaan penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja	A.16.b	3	Revisi sistem pendataan gaji pegawai	Kab. Lamongan	-	Rp 70,000,000.00	Lanjutan	BKSO			
			1	Penyusunan APBD tahun 2007	Kab. Lamongan	-	Rp 85,000,000.00	Lanjutan	BKSO			
			2	Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2006	Kab. Lamongan	-	Rp 85,000,000.00	Lanjutan	BKSO			
			3	Penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2006	Kab. Lamongan	-	Rp 107,327,000.00	Lanjutan	BKSO			
			4	Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tahun 2006	Kab. Lamongan	-	Rp 135,360,000.00	Lanjutan	BKSO			
46	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan yang cepat dan tepat	A.16.a	5	Penyusunan laporan tahunan APBD	Kab. Lamongan	-	Rp 30,000,000.00	Lanjutan	BKSO			
			1	Peningkatan pelayanan pengelolaan SPM	Kab. Lamongan	-	Rp 60,000,000.00	Lanjutan	BKSO			
			2	Peningkatan pelayanan kas daerah	Kab. Lamongan	-	Rp 65,000,000.00	Lanjutan	BKSO			

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (DLC)	URILAN INSTANSI
47	Peningkatan SDM pengelola keuangan daerah secara profesional	A.16 f	1. Pembinaan satuan pemangku kas	Kab. Lamongan		Rp 110,000,000.00	Lanjutan	BK/BO
48	Pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi daerah dan PBB	A.17 a	1. Pendataan subyek obyek pajak daerah dan efektifitas retribusi daerah a. Pendataan subyek obyek pajak saring burung b. Pendataan subyek obyek retribusi pelayanan pemertanian, efektifitas pemungut	Kab. Se Kabupaten Tempat pembayaran Dinas Pemungut	120 penilik tempat saring burung di 18 kecamatan Jenis rel persampitan = 7.500 lahan dan: - Rumah Tongga - Pertanian - Kantor, RS, BP - PKL	Rp 100,000,000.00	Baru	Dispenda
49	Intensifikasi dan sosialisasi penerimaan pendapatan daerah meliputi PAD, PBB dan Dana Perimbangan	A.17 b	2. Pendataan ulang PBB dengan sistem manajemen informasi obyek pajak (Sistemop) 1. Studi orientasi pendapatan daerah ke daerah lain 2. Intensifikasi / Ertensifikasi pajak bumi dan	Kab. Lamongan, Sekeloa, Mabarun Jawa Tengah dan Jawa Timur Kab. Babel, Bromboing, Ponor, Pucuk dan Sukoharjo	30.000 obyek pajak/subyek pajak 10 Kab/Kota	Rp 475,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00	Lanjutan Lanjutan Baru	Dispenda Dispenda Dispenda
50	Pembinaan teknik melalui pelatihan, kursus, dan diklat tentang manajemen pengalihan pendapatan daerah	A.17 d	1. Bimbingan teknis pengalihan potensi dan pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Kab. Lamongan	40 orang	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Dispenda
51	Membangun jaringan sistem informasi pendapatan daerah (Revenue Information System Network)	A.17 e	1. Membangun dan penerapan sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPATDA) aplikasi SW-HW	Kab. Lamongan	1 unit	Rp 450,000,000.00	Baru	Dispenda
52	Optimisasi pendayagunaan sistem pengawasan fungsional melalui pengawasan reguler, insidental maupun khusus	A.18 a	1. Melakukan pemertiksaan berdasarkan program Kerja Pemertiksaan Tahunan (PKPT) 2. Pengawasan insidental dengan sasaran: Cabang Dinas P dan k Pudasermas 14 Ombk Cabang Dinas KB dan Kesehatan TK SMP Negeri SIMASUK Negeri 3. Peningkatan pengawasan pembangunan daerah 4. Pengawasan khusus audit tahun anggaran	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	36 Ombk 79 Ombk terdiri: 13 Ombk 14 Ombk 13 Ombk 1 Ombk 26 Ombk 12 Ombk Yang didarat APBD 2006 27 Ombk	Rp 60,000,000.00 Rp 75,000,000.00	Baru Baru	Bawas Bawas
				Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan		Rp 400,000,000.00 Rp 80,000,000.00	Baru Baru	Bawas Bawas

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERIKUAAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
53	Optimalisasi pemantauan pada instansi pengikat daerah yang melaksanakan pelayanan publik	A.18.b	1 Pemantauan pelayanan publik	Kabupaten Lamongan	65 Orang	Rp 130.000.000,00	Beru	Bawas
54	Kerifas penerangan kelas-luas pengadaan masyarakat	A.18.c	1 Pemeliharaan dan peningkatan kelas-kelas pengadaan masyarakat	Kabupaten Lamongan	-	Rp 40.000.000,00	Beru	Bawas
55	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai	A.18.d	1 Pembinaan dan peningkatan APSP (Work Shop/Brain Audit Operasional)	Kabupaten Lamongan	36 orang	Rp 100.000.000,00	Beru	Bawas
56	Tersedianya sarana dan prasarana pengikat telematika	A.19.a	1 Pemeliharaan Server dan pendukungnya	Kab. Lamongan	1 unit	Rp 170.000.000,00	Lanjutan	KPOE
57	Tersedianya sarana jaringan komunikasi data	A.19.b	1 Pemeliharaan dan operasional jaringan	Kab. Lamongan	11 unit	Rp 200.000.000,00	Lanjutan	KPOE
			2 Perluasan jaringan Wireless LAN	Kab. Lamongan	10 unit	Rp 300.000.000,00	Lanjutan	KPOE
58	Tersedianya aplikasi secara bertahap yang mencakup semua bidang	A.19.c	3 Pengadaan panel komunikasi center	RSD Dr. Soegih	102 Elemen	Rp 195.000.000,00	Beru	RSD Soegih
			1 Integrasi 14 aplikasi berbasis web versi 2	Kab. Lamongan	2 unit	Rp 200.000.000,00	Lanjutan	KPOE
			2 Cit - Reklame	Kab. Lamongan	1 unit	Rp 450.000.000,00	Beru	KPOE
			3 Situs resmi DPRD	Kab. Lamongan	1 unit	Rp 75.000.000,00	Beru	KPOE
59	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	A.20.a	1 Pembinaan aparat pemerintahan Desa	Kabupaten Lamongan	27 lac	50.000.000,00	Beru	Bagian Pem
60	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa / kel	A.20.e	1 Bantuan pembangunan RT di kel. Se Kab.	RT di Kelurahan se Kab	301 RT x Rp 5.000.000	1.505.000.000,00	Beru	Bagian Pem
			2 Bantuan operasional LPH Kelurahan se Kab	LPH Kelurahan se Kab	12 LPH x Rp 3.000.000	36.000.000,00	Beru	Bagian Pem
			3 Pembangunan / Rehabilitasi beta dan kantor	10 desa di 10 kecamatan	10 ds x Rp 40.000.000	400.000.000,00	Beru	Bagian Pem
61	Peningkatan kualitas Forum Musyawarah Pembangunan Desa	A.20.f	1 Bulan Belas Gedung Roving masyarakat	474 Desa/Kel	474 Desa/Kel	65.000.000,00	Lanjutan	Bipemas
62	Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	A.20.g	1 Pembinaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa	462 Desa 27 Kecamatan di Kab. Lamongan	- Kepala Desa 462 org x Rp 75.000,- - Sekretaris Desa 462 org x Rp 45.000,00 - Kasir / Kasir 2771 org x Rp 30.000,00 - Kasan / halang / pembantu 1461 org x Rp 30.000,00	2.185.160.000,00	Beru	Bagian Pem
63	Pelatihan dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan di pedesaan	A.20.j	2 Asuransi bagi kepala desa dan sekretaris desa 1 Peningkatan kemandirian pedesaan	462 desa di kab. Lamongan Kab. Lamongan	PM 18 Kecamatan/38 desa	22.176.000,00 75.000.000,00	Beru Lanjutan	Bagian Pem Bappeda

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERGMAN BAWA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
64	Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	A21a	1. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus LPM & Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMKD)	108 Desa	640 Orang	81.500.000,00	Baru	Bepemas
65	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	A21c	1. Pendamping Administrasi Program Proyek Pengembangan Kac (PPK) Fase III	Kecamatan / Kab	-	425.000.000,00	Baru	Bepemas
66	Mempertajam masyarakat untuk menyerap efit Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan SDA	A21d	2. Cost Sharing PPK Fase III 1. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten 12 Kecamatan	10 Kecamatan 120 Orang	1.650.000.000,00 60.000.000,00	Lanjutan Lanjutan	Bepemas Bepemas
67	Peningkatan program pengentasan kemiskinan di desa/kelurahan	A21f	1. Bantuan operasional Program Rutin 2. Gerdulaskin 3. TMKD 4. Pengembangan mt. Desa potensial berbasis cluster ekonomi	Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kec. Mado Kab. Lamongan	27 Kecamatan 12 desa 1 Desa	200.000.000,00 927.000.000,00 350.000.000,00	Lanjutan Lanjutan Baru	Bepemas Bepemas Bepemas
68	Peningkatan peran masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa	A21g	1. Bantuan Musyawarah Kecamatan dan Baye Operasional 27 Kac x Rp. 750.000,00 2. Bantuan Musabung Desa 474 x Rp. 300.000,00 3. Pendamping P2TFO	27 Kecamatan 474 Desa/Kel Kab. Lamongan	27 Kecamatan 474 Desa/Kel 27 Kecamatan	89.125.000,00 142.200.000,00 PH	Lanjutan Lanjutan Baru	Bepemas Bepemas Bepemas
69	Peningkatan bantuan dana pembangunan desa / Kelurahan secara langsung	A21h	1. Program Pemberdayaan Masyarakat (Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan) 2. Baye Operator Bandes Kac dan Kab 3. Pendanaan Swadaya Masyarakat	Desa/Kelurahan sa Kab. Lamongan sa Kab. Lamongan 27 Kac.	452 Desa 12 Kelurahan 12 Kelurahan 474 Ds/Kel	47.400.000.000,00 (Rp. 100.000.000 / Desa) 118.500.000,00 15.000.000,00	Baru Baru Baru	Bepemas Bepemas Bepemas
70	Peningkatan pendataan Profil Desa / Kelurahan dalam pengentasan pembangunan Desa	A21k	1. Pendataan penyusunan dan pengubahan data profil tingkat perkembangan desa / kel	27 Kecamatan	474 desa / Kel	60.000.000,00	Lanjutan	Bepemas
71	Pelaksanaan Swasast pembangunan desa / kel	A21l	1. Peningkatan Desa Kelurahan (Evaluasi desa / kelurahan berbasis)	27 Kecamatan	27 desa	60.000.000,00	Baru	Bepemas
72	Membasmi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan guna menunjang Erits Pembangunan Dan Manusia	A21m	1. Bantuan Pemb. Jembatan & Jalan Perdes Desa : - Pemb. Fungsipen Jalan Desa Gunung- - Pemb. Jalan Makadam Desa Mandu - Pemb. Jalan Makadam Desa Sunengko - Pemb. Jalan Makadam Desa Gunung- - Pemb. Fungsipen Jalan Desa Gunung- Desa : Kec. Kadurung Kec. Kadurung Kec. Kadurung Kec. Kadurung	De Mandu De Sunengko De Gunungrejo	1000 x 3 m 1000 x 3 m 1000 x 3 m	50.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan	Bepemas Bepemas Bepemas

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN BISTANSI
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Plangwit - Kedyung Kec. Laren	Ds. Kedyung	1000 x 3 m	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Baru - Gempolukmbiko Kec. Sarrejo	Ds. Baru	2000 x 3 m	Rp 75,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Dermotamah-bang - Gempolukmbiko Kec. Sarrejo	Ds. Dermotamahbang	2000 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Ribal Beton Desa Jelek - catur Kec. Kelengahan	Ds. Jelekatur	1350 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Ribal beton Desa Sumosari Kec. Kelengahan	Ds. Sumosari	1600 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Gambuhan Kec. Kelengahan	Ds. Gambuhan	800 x 3 x 0,3 m	Rp 45,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jembatan Desa Pucangteli Kec. Kelengahan	Ds. Pucangteli	11 x 3 x 8 m	Rp 55,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Kedung-wangi Kec. Sambang	Ds. Kedungwangi	1500 x 3 m	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Jembatan Beton Desa Pamotan Kec. Sambang	Ds. Pamotan	12 x 3 x 5 m	Rp 55,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Jembatan Beton Desa Watere-winangun Kec. Sambang	Ds. Waterewinangun	13 x 3 x 4 m	Rp 55,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Pengaspelan Jalan Desa Kalwates Kec. Kembangbahu	Ds. Kalwates	2000 x 3 m	Rp 75,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Pengaspelan Desa Randubener Kec. Kembangbahu	Ds. Randubener	2000 x 3 m	Rp 75,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Sukosongg Kec. Kembangbahu	Ds. Sukosongg	3000 x 3 m	Rp 75,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Ribal beton Desa Windu Kec. Karangbinangun	Ds. Windu	700 x 3	Rp 45,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Peningkatan jalan Desa Ketapangteli Kec. Karangbinangun	Ds. Ketapangteli	-	Rp 75,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Penetrasi jalan Watangperang-Sambo-pinggr Kec. Karangbinangun	Ds. Watangperang	1500 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Ribal beton Desa Ploso-buden Kec. Dasek	Ds. Plosobudan	1200 x 3 m	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Joloanur Kec. Tikung	Ds. Joloanur	1500 x 3 m	Rp 50,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Pengaspelan Jalan Desa Pungumbulnadi Kec. Tikung	Ds. Pungumbulnadi	1500 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Soko Kec. Tikung	Ds. Soko	1500 x 3 m	Rp 50,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Jubelir Kec. Sugo	Ds. Jubelir	1500 x 2,5 m	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Bepemas
			- Pemb. Jalan Aspal Desa Kedungmen-tawar kec. Ngimbang	Ds. Kedungmentawar	600 x 3 m	Rp 40,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Batun Kec. Turi	Ds. Batun	1500 x 3 m	Rp 60,000,000.00	Beru	Bepemas
			- Pemb. Jalan Makadam Desa Bedureme Kec. Turi	Ds. Bedureme	1000 x 2,5 m	Rp 50,000,000.00	Beru	Bepemas

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (B/L)	USULAN INSTANSI
77	Peringkasan besekaterasan personal Pol PP	A.22.f	1. Leuk Pak 2. Honorarium Agen	Kab. Lamongan Kab. Lamongan	200 orang x 12 bh 200 orang x 12 bh	Rp 324.000.000,00 Rp 144.000.000,00	Lanjutan Lanjutan	Pol PP Pol PP
78	Meningkatkan penanganan Peraturan Daerah	A.22.g	1. Operasi jayala dan penegakan perca	Kab. Lamongan	27 Kecamatan	Rp 150.000.000,00	Lanjutan	Pol PP
Jumlah Total						Rp 111.524.638.000,00		

BIDANG PERTANIAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia masih dianggap sebagai bagian terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Hal ini semakin disadari ketika bidang pertanian telah mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhannya meningkat sementara pada bidang / sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya bidang pertanian di Indonesia antara lain (1) potensi sumber dayanya yang besar dan beragam; (2) pangsa pasar pendapatan nasional cukup besar; (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada bidang ini dan (4) merupakan basis pertumbuhan di wilayah pedesaan. Kondisi demikian juga nampak terjadi di Kabupaten Lamongan dimana sebagian besar penduduknya bergerak pada bidang pertanian.

Dalam arti luas pembangunan di bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang tangguh dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, melalui pengembangan sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.

Bidang pertanian, utamanya pertanian tanaman pangan dan peternakan merupakan sub sektor yang cukup berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Bidang pertanian pada tahun 2004 memberikan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Lamongan mencapai 43,16 % yang diantaranya ditopang dari sub sektor tanaman pangan sebesar 32,01 % dan dari sub sektor peternakan serta hasil-hasilnya sebesar 1,29 %. Secara umum kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB (ADHK) selama 5 (tahun) terakhir (2000 s/d 2004) menunjukkan trend yang semakin menurun. Penurunan ini merupakan suatu hal yang alamiah dan wajar terjadi ketika suatu daerah mengalami akselerasi pertumbuhan perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat. Alih guna lahan dan rendahnya nilai jual komoditi pertanian menjadi salah satu penyebab penurunan kontribusinya terhadap PDRB suatu daerah, sedangkan secara umum sektor perdagangan dan jasa akan semakin meningkat kontribusinya terhadap total PDRB.

Dalam berusaha tani maupun ternak terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan petani/ peternak dalam mengusahakan komoditi pada lahan yang dimilikinya. Diantaranya faktor teknis meliputi kualitas dan luas lahan, ketersediaan air, potensi produksi, umur tanaman dan tingkat kesesuaian terhadap

iklim. Faktor ekonomi menyangkut penguasaan modal, keuntungan yang diperoleh, kestabilan harga hasil produksi dan mudah tidaknya pemasaran. Faktor sosial meliputi tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat pendidikan petani. Sejalan dengan kondisi tersebut, pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Kabupaten Lamongan pelaksanaannya diupayakan dengan pendekatan agribisnis berbasis pedesaan yang ditujukan untuk mengubah dari usaha tani berorientasi subsisten menjadi usaha tani komersial yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang mempunyai nilai tambah didasarkan atas permintaan pasar dan mempunyai keunggulan kompetitif.

B. KONDISI UMUM

Secara geografis Kabupaten Lamongan dilalui oleh aliran Bengawan Solo yang memanjang dari barat ke timur sepanjang \pm 47 Km. Bengawan Solo ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pertanian di Kabupaten Lamongan, khususnya di wilayah bagian utara pada musim kemarau dengan menggunakan pompa air dimanfaatkan untuk menanam padi dan budidaya ikan / udang windu. Secara administratif Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dan 474 desa / kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.224.812 orang, dimana sekitar 63,71 % nya bergerak di sektor pertanian secara luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan). Proporsi penduduk Kabupaten Lamongan yang bergerak pada sektor ini melebihi rata-rata nasional yang pada tahun 2003 hanya mencapai sekitar 46,3 %.

Dari luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,8 km² yang potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian sekitar seluas 127.783 Ha (70,48 %), terdiri dari lahan sawah seluas 86.691 ha, lahan tegalan 28.270 ha dan lahan pekarangan 12.822 ha. Dari luas lahan tersebut sudah termasuk lahan sawah tambak seluas sekitar 20.000 Ha. Potensi sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Lamongan juga didukung dengan potensi sumberdaya air irigasi. Data perairan umum Kabupaten Lamongan memiliki sungai sepanjang \pm 885,5 Km, waduk sebanyak 34 seluas \pm 3.082 Ha dan rawa sebanyak 11 seluas \pm 7.087 Ha.

Adapun potensi temak di Kabupaten Lamongan tahun 2004 meliputi temak besar 43.319 ekor, temak kecil 70.289 ekor dan unggas sebanyak 1.368.621 ekor. Sedangkan tenaga kerja yang bergerak di sektor peternakan di Kabupaten Lamongan tahun 2004 sebanyak 247.613 jiwa.

Bidang pertanian memiliki peran penting di dalam memberikan peningkatan dan mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan

masyarakat di dalam menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi, antara lain :

- (a) Semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan;
- (b) Meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy);
- (c) Semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas sektor pertanian;

Secara umum terdapat 8 (delapan) kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bidang pertanian di Kabupaten Lamongan antara lain :

- (a) Masih rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya kemiskinan petani/peternak;
- (b) Lahan pertanian yang semakin menyempit sebagai akibat alih fungsi lahan khususnya pada lahan-lahan produktif;
- (c) Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani / peternak khususnya dalam sistem pemasaran produk-produk pertanian
- (d) Terbatasnya akses petani dalam memperoleh sumberdaya produktif terutama permodalan dan layanan usaha;
- (e) Masih relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) sektor pertanian;
- (f) Masih rendahnya sistem alih teknologi, penguasaan teknologi dan diseminasi teknologi pertanian (pra dan pasca panen);
- (g) Lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) sektor pertanian pada khususnya dan perdesaan pada umumnya;
- (h) Makin berkurangnya tenaga penyuluh pertanian dan peternakan;

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan populasi ternak guna memantapkan ketahanan pangan serta untuk mencukupi pasar lokal dan domestik.
- b. Mengembangkan model pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan pola Pengendalian Hama Terpadu dan pengembangan Agens Hayati.

- c. Terwujudnya pengendalian penyakit potensial pada temak;
- d. Meningkatkan pola-pola pengembangan agribisnis di tingkat kelembagaan petani / peternak;
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana pertanian.
- f. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan kelembagaan petani/peternak, pertemuan rutin dan pelatihan baik di tingkat petani / peternak maupun petugas.
- g. Meningkatkan kemandirian petani / peternak melalui pola kemitraan dan pembinaan jaringan pemasaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka sasaran umum pembangunan pertanian tahun 2006 di Kabupaten Lamongan adalah tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak.

Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan petani/peternak untuk dapat menghasilkan komoditas yang bermutu dan berdaya saing;
- b. Terjaganya tingkat produksi bahan makanan, populasi temak (temak besar, temak kecil dan unggas) dalam rangka terjaganya kemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan;
- c. Terwujudnya diversifikasi produk-produk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Meningkatnya kemampuan petani / peternak dan kelembagaan-kelembagaan pertanian di tingkat masyarakat dalam optimalisasi potensi sumberdaya dan peluang di bidang pertanian;
- e. Terwujudnya pengembangan agribisnis didasarkan pada potensi sumberdaya dan peluang pasar.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pertanian memiliki Arah dan Kebijakan Umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura menuju terwujudnya pemantapan ketahanan pangan dengan strategi dan prioritas** a) Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, b) Peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura, c) Pengembangan varietas komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang berpotensi produktivitas tinggi, d) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), e) Penangkaran benih padi dan palawija, f) Diversifikasi usaha pertanian melalui pengembangan komoditi pertanian sesuai potensi daerah, g) Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian yang dapat akses petani. **2. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana pertanian dengan strategi dan prioritas** a) Penyediaan alat mesin pertanian, b) Pengumpulan, akurasi dan validasi data per-statistikan pertanian, c) Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya air, d) Penyediaan permodalan usaha tani melalui program bantuan pinjaman penguatan modal dengan bunga rendah, e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap kecil terhadap bantuan pinjaman permodalan. **3. Pemberdayaan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dan kelembagaan sektor pertanian dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan mutu pengetahuan dan ketrampilan SDM Penyuluh Pertanian, Petugas Tehnis, KTNA dan petani, b) Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, c) Peningkatan dan pemantapan peran KTNA melalui temu KTNA, d) Pemberdayaan lembaga ketahanan pangan di pedesaan. **4. Mendorong terwujudnya pola kemitraan antara petani / Kelompok Tani dengan Pengusaha dengan strategi dan prioritas** a) Pengembangan kemitraan produsen dengan pengusaha, b) Pengembangan jaringan pemasaran komoditas pertanian, c) Temu usaha antara produsen dan pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, d) Peningkatan kegiatan kelompok tani agribisnis. **5. Peningkatan nilai tambah komoditas produk pertanian untuk meningkatkan nilai jual dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan kualitas komoditas produk pertanian melalui pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, b) Stabilisasi harga komoditas pertanian strategis, c) Pengembangan diversifikasi usaha pertanian. **6. Peningkatan kualitas pengembangan usaha budidaya ternak dengan strategi dan prioritas** a) Pengembangan teknologi budidaya ternak kecil, ternak besar dan unggas, b) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para petani peternak, c) Pengembangan agribisnis ternak dengan sumberdaya ternak lokal, d) Peningkatan diversifikasi usaha di bidang peternakan, e) Peningkatan mutu bibit ternak. **7. Peningkatan penanggulangan dan pengobatan penyakit ternak dengan strategi dan prioritas** a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak, b) Peningkatan

sarana peralatan-peralatan laboratorium penyakit ternak dan ikan, c) Ketersediaan obat yang memadai. **8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan dan pertanian** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan kerja sama kemitraan bidang peternakan dan pertanian, b) Memantapkan pemberdayaan kelompok, c) Mendorong usaha peternakan dan pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok. **9. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan pertanian** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan RPH, b) Introduksi teknologi pengolahan hasil peternakan dan pertanian

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BRANG : PERTANIAN

NO	PROYAK (DAERAH)	KODE PROGRAM	REKAM/PROYAK	LOKASI	VOLUME	KELOMPOK (MAY)	KETERANGAN (DA)	URAIAN
1	Peningkatan mutu intervensi tanaman pangan dan hortikultura	B.1b	1. Sosialisasi dan pembuatan buku intervensi pangan tahun 2008. 2. Pembinaan, evaluasi dan monitoring pengaduan pangan tahun 2008 3. Peningkatan Mutu Intervensi Tanaman Pangan 4. Peningkatan Mutu Intervensi Tanaman Hortikultura (Kode AP 2008/2007)	Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kec. Dabek, Gajah, Liris, Karanggeneng, Karanggeneng, Sukodadi, Meduran, Sabaran, Supoi, Kedungpring	- 60 buku - Sosialisasi 100 orang Pembinaan pada cara tanja Dibag 75 orang 1.500 Ha	Rp Rp Rp	Lanjutan Baru Mk 2005	C-3: Perekonomian Bag Perekonomian DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT
2	Pengendalian Organisasi Pengunggul Tanaman (OPT)	B.1a	1. Pengendalian Pestisida 2. SPUHT Padat oleh Petani Pemadu	Kec. Supo, Liris, Tanjung Kembang, Sembang	600 Ha 750 Kg/L 5 unit	Rp Rp Rp	Lanjutan Lanjutan Lanjutan	DSTAN-HUT DSTAN-HUT DSTAN-HUT
3	Pemangkaran bambu pad dan pala	B.1a	1. Pemangkaran bambu pad	Kabungring, Karanggeneng, Lamongan	50 ha	Rp	Lanjutan	DSTAN-HUT
4	Peningkatan ketahanan sarana produksi pertanian yang dapat akses petani	B.1g	1. Pengawasan Pupuk Berbasis di Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan	1 Paket	Rp	Lanjutan	DSTAN-HUT
5	Penyediaan alat mesin pertanian	B.2a	1. Bantuan Alat Pengering Gabah	Kabungring, Kembangbahu	2 unit	Rp	Baru	DSTAN-HUT
6	Penelitian dan optimisasi pemaksimalan potensi sumberdaya air	B.2c	1. Bantuan pembuatan sumur perkolasi Kip Tani	Kembangbahu, Sembang, Liris, Ngabang, BULU, Mado, Sukodadi, Pranati	30 unit	Rp	Lanjutan	DSTAN-HUT
7	Pengumpulan, akuisi dan validasi data persediaan pertanian	B.2b	1. Pengumpulan data persediaan pertanian dan pengambilan data pad, pala	Kabupaten Lamongan	200 unit	Rp	Baru	DSTAN-HUT
8	Peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan SDM Penyuluhan Pertanian, Penguji Teknis, IKMA dan petani	B.3a	1. Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Lamongan	1 paket	Rp	Lanjutan	DSTAN-HUT

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (Btl.)	USULAN INSTANSI
9	Pembudayaan dan peningkatan mutu SDM dan kelembagaan sektor pertanian	B.3.b	1. Demonstrasi pdt. Padi, jagung hibrida, kacang tanah, bintik besar, semangka 2. Penguatan modal Lumbung Pangan	Hngbang, Sukarema, Brondong, Paciran, Leren, Soburo, Meduran, Karanggeneng Soburo, Modo, Dekat Meduran, Surain, Babel, Kelunging, Henlip, Karanggeneng, Karanggeneng, Karanggeneng, Pucuk, Supo, Tun, Sukarema, Tiung, Buluk, Hngbang, Sambong, Lamongan	10 unit 21 unit	Rp 40.000.000,00 Rp 2.150.000.000,00	Baru Lanjutan	DISTANHUT DISTANHUT
10	Pembudayaan lembaga ketahanan pangan di pedesaan	B.3.d	1. Penguatan modal Lumbung Pangan	Soburo, Modo, Dekat Meduran, Surain, Babel, Kelunging, Henlip, Karanggeneng, Karanggeneng, Karanggeneng, Pucuk, Supo, Tun, Sukarema, Tiung, Buluk, Hngbang, Sambong, Lamongan	21 unit	Rp 2.150.000.000,00	Lanjutan	DISTANHUT
11	Pengembangan jaringan pemasaran komoditas pertanian	B.4.b	2. Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1. Study kelayakan pembuatan gudang pangan daerah dan instalasi sistem tunda jual (berjasama dengan LSM atau LPM Perguruan Tinggi)	Kabupaten Lamongan Kab. Lamongan	1 paket 1 paket	Rp 25.000.000,00 Rp 150.000.000,00	Baru Baru	Desanuh Bag. Perencanaan
12	Mendorong Terwujudnya Pola Kamtibmas Antara Petani / Kelompok Tani Dengan Penguasa	B.4.c	1. Temu usaha antara produsen dan pengusaha	Kabupaten Lamongan	2 pertemuan	Rp 10.000.000,00	Baru	Desanuh
13	Pengembangan dan pembudayaan penyakit ternak	B.7.a	1. Pengembangan insensial buatan dan pengujian pembudayaan penyakit ternak	Kab. Lamongan	3.000 ekor	Rp 40.000.000,00	Baru	Desa PJP
14	Pembudayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Palomakan dan Pertanian	B.8.b	1. PAK	Kabupaten Lamongan	15 kecamatan	Rp 1.000.000.000,00	Baru/Lanjutan	Juatanuh
15	Mendorong usaha palomakan dan pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok	B.8.c	1. Bantuan kredit sapi kerennan 2. Bantuan kredit sapi babi	Lamongan, Deket, Tiung, Kd ping, Hngbang, Buluk, Mantap, Kd bangun, Pucuk, Sukarema, Kd ping, Meduran, Sambong, Sukodad, Soburo, Leren, Kd baru, Brondong Tiung, K. baru, Babel, Sambong, Kd bangun, Hngbang, Buluk, Mantap, Sambong, Lamongan, Mod, Brondong, Sukodad, Sanyap	270 ekor 700 ekor	Rp 1.080.000.000,00 Rp 2.730.000.000,00	Lanjutan / Baru Lanjutan / Baru	Desa PJP Desa PJP

No	Kategori / Deskripsi	Kode Produk	Rincian / Keterangan	Spesifikasi	Volume	Satuan	Materi Pokok (Rp)	Materi Pokok (Rp)	Materi Pokok (Rp)
			3. Bantuan kredit pengembangan budidaya ikan	Makara, Turi	1.000 ekor	Batu	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Dana PIP
			4. Bantuan biaya/ pembelian / sarana	Pc baru, Ngebang, Gajah, Dend, Bodo	600 ekor	Batu	Rp 427.600.000,00	Rp 427.600.000,00	Dana PIP
	Jumlah Total						Rp 1.727.600.000,00	Rp 1.727.600.000,00	

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang wilayahnya terdiri dari kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang \pm 47 km, sehingga memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan budidaya dan perikanan tangkap laut. Produksi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan sebagian besar merupakan hasil budidaya tambak dengan komoditi udang dan bandeng, juga komoditi tangkap dengan komoditi yang dominan antara lain jenis ikan layang, kuningan, tongkol dan tengiri.

Bidang perikanan kelautan telah memberikan kontribusinya yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan, adapun kontribusi sektor perikanan sebesar Rp. 115.231.490.000,- atau 8,99% yang ditunjukkan pada PDRB atas harga konstan pada tahun 2004.

Pembangunan bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dengan memanfaatkan introduksi teknologi yang berbasis sumberdaya lokal dengan tujuan (1) peningkatan produksi, (2) mengembangkan agroindustri, (3) mengembangkan sarana dan prasarana usaha perikanan, serta (4) mengembangkan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Disamping pengembangan perikanan tangkap laut Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengembangkan perikanan budidaya yang dilaksanakan melalui (1) pembinaan terhadap pembangunan ikan dalam rangka penerapan teknologi tepat guna, (2) pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan (3) pengembangan budidaya udang windu ramah lingkungan dan (4) program peningkatan mutu intensifikasi budidaya serta sarana dan prasarana budidaya. Sedangkan untuk perairan umum dilakukan restocking/ penebaran benih diperaian umum.

B. KONDISI UMUM

Potensi perikanan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2004 untuk budidaya meliputi tambak seluas 1.380,024 ha, sawah tambak seluas 23.602,63 ha, kolam seluas 340,1 ha. Sedangkan untuk penangkapan di perairan umum meliputi rawa seluas 7.087 ha, waduk seluas 3.082 ha dan dengan panjang sungai 855,3 km. Sementara untuk penangkapan di laut mempunyai panjang pantai 47 km. Hasil pembangunan bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari hasil produksi ikan yang meliputi komponen hasil penangkapan di laut, perairan umum dan budidaya. Pada tahun 2004 hasil produksi ikan di Kabupaten Lamongan

mencapai 71.578 ton yang terdiri dari hasil tangkap laut sebesar 39.934 ton, penangkapan ikan diperairan umum sebesar 2.054 ton, dan budidaya sebesar 29.950 ton. Dari pencapaian diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terus mengupayakan pengembangan di bidang perikanan dengan cara intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi tingkat pendapatan petani/nelayan yang merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari output produksi, tingkat pendapatan petani ikan mencapai Rp. 7.482.260 / RTP/ tahun, sedangkan tingkat pendapatan nelayan mencapai Rp. 2.437.289 / RTP/ tahun. Pencapaian pendapatan petani ini disebabkan adanya indikasi kenaikan kapasitas nilai tukar petani terutama nilai hasil produksi. Sedangkan dari aspek tenaga kerja di bidang perikanan meliputi petani ikan sebesar 31.887 orang, nelayan sebesar 23,186 orang dan pengolah 435 orang.

Berdasarkan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lamongan mencapai 19,80 kg/ kapita/ tahun atau sebesar 66 % dari target nasional sebesar 30 kg/ kapita/ tahun. Pencapaian tingkat konsumsi ikan tersebut tidak lepas dari dampak penyuluhan tentang makan ikan secara intensif, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi.

Dengan percapaian-pencapaian dibidang perikanan dan kelautan, pemerintah Kabupaten Lamongan masih menghadapi permasalahan-permasalahan dibidang perikanan antara lain potensi sumber daya perikanan yang ada belum terkelola secara optimal khususnya perairan umum (waduk, rawa, sungai), kurang tersedianya benih bandeng dan udang untuk mencukupi kebutuhan budidaya sepanjang tahun serta fluktuasi harga benih bandeng pada saat-saat tertentu, panjangnya rantai pemasaran yang mengakibatkan tingginya margin tata niaga dan tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat akan fungsi ikan sebagai sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan / pembentukan tubuh masih rendah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Pembangunan perikanan yang ditujukan pada pengembangan tehnologi perikanan yang berorientasi pada intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan, peningkatan populasi ikan, peningkatan pendapatan nelayan/ petani, peningkatan produksi dan produktifitas lahan, peningkatan konsumsi ikan menuju swasembada pangan dan ekspor non migas.

2. Sasaran

Peningkatan produksi sumberdaya perikanan pada tahun 2006 untuk perikanan tangkap di laut sebesar 41.000 ton, budidaya ikan tambak sebesar 2.500 ton, sawah tambak sebesar 28.000 ton, kolam sebesar 850 ton dan perairan umum sebesar 2.500 ton. Sedangkan konsumsi ikan pada tahun 2006 diharapkan mencapai 20 kg/kapita/ tahun.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan laut dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatkan pembinaan nelayan dan pengawasan sumberdaya kelautan, b) Peningkatan sarana penangkapan ikan, c) Peningkatkan sarana dan prasarana pendaratan ikan, d) Peningkatkan jangkauan daerah operasi penangkapan, e) Peningkatan pengkajian mutu hasil perikanan laut, f) Peningkatan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. **2. Terwujudnya pengembangan usaha budidaya perikanan dengan strategi dan prioritas** a) Pengembangan budidaya laut dan air payau, b) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan, c) Pengembangan agribisnis komoditi perikanan, d) Peningkatan aspek permodalan usaha tani budidaya, e) Peningkatan mutu intensifikasi budidaya ikan. f) Pemberdayaan penangkaran benih ikan air tawar dan ikan laut. **3. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan produk dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan diversifikasi produk perikanan, b) Introduksi teknologi pengolahan ikan, c) Pengembangan kemitraan produsen dan pengusaha. **4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum dengan strategi dan prioritas** a) Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan perairan umum, b) Introduksi teknologi pemanfaatan sumber daya perikanan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGAYAT/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BAYA	KETERANGAN (BIL.)	USULAN BERTAMBAH
1	Peningkatan pembinaan nelayan dan pengawasinan "mberdaya kelautan"	C.1.a	1. Pembuatan tambak karang buatan	Pesiran (3 desa)	15 unit	Rp 105.000.000,00	Baru	Desa PKP
2	Peningkatan sarana prasarana penderetan ikan	C.1.c	1. Pembuatan tangkis laut 2. Pembangunan pangsang jala TPI Kraji 3. Pembuatan tangkis gelombang dan lambatan perahu	Pesiran (4 desa) Kraji Mac Pesiran Brondong (Lubuhan)	75 x 1,5 m 400 x 3 m 800 x 3 m 120 x 3 m 300 x 6 m 4.500 m ²	Rp 15.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp 80.000.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	Desa PKP Desa PKP Desa PKP Desa PKP Desa PKP Desa PKP
3	Peningkatan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir	C.1.f	1. Dina penyanga pekalangan	Pesiran (Kraji)	50 org	Rp 50.000.000,00	Baru	Desa PKP
4	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan	C.2.b	1. Rencoring weduk / pererin umum 2. Dempot lile dumbo	Weduk Gondang, Piyetan, Jabosari, Mojomiris, Rancangluncono Kb bahu, Turi	5 weduk 2 x 0,1 Ha	Rp 50.000.000,00 Rp 10.000.000,00	Baru Baru	Desa PKP Desa PKP
5	Peningkatan mutu intensifikasi budidaya ikan	C.2.e	1. Bantuan modal bergulir untuk intensifikasi sawah tambak 2. Demplot lile dumbo	Tun, Krangan, Kallengah, Glegah, Puzuk, Debet, Lamongan, Molo, Lumen, Maduran, Sekaran, Puok	1.073 Ha	Rp 3.227.000.000,00	Lama	Desa PKP
6	Pemberdayaan perikanan budi ikan air tawar	C.2.f	1. Biaya operasional BSI	BSI Kaban	2 Ha	Rp 7.500.000,00	Baru	Desa PKP
7	Introduksi teknologi pengibahan ikan	C.3.b	1. Pengolahan Bandeng Tanduk (Tempa Dun)	Karangnagan	2 labopak	Rp 50.000.000,00	Baru	Desa PKP
Jumlah Total						Rp 4.844.500.000,00		

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. PENDAHULUAN

Guna memacu perkembangan dan perekonomian daerah, maupun masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka salah satu potensi sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya di Kabupaten Lamongan adalah sektor Pertambangan dan Air Bawah Tanah (ABT). Adapun potensi pertambangan yang sudah di eksploitasi di kabupaten Lamongan meliputi Dolomit, Batu Kapur, Phospat, Tanah Urug dan Truss.

Sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, pengelolaan dan eksploitasi komoditi hasil tambang harus senantiasa memperhatikan dampak kelestarian lingkungan maupun tingkat kemanfaatan yang efisien, sehingga fungsi pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan eksploitasi perlu dukungan secara intensif oleh semua pihak.

Sumber air bawah tanah mempunyai peranan penting sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk berbagai kebutuhan air. Selaras dengan proyeksi akan kebutuhan air yang kecenderungan terus meningkat maka perlu diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi air bawah tanah yang ada disuatu wilayah untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Pembangunan sumber energi alternatif yang selama ini dilaksanakan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi kepentingan masyarakat terutama untuk pemukiman atau dusun yang belum terjangkau oleh pelayanan PLN.

B. KONDISI UMUM

Potensi pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan banyak ragamnya seperti batu gamping, dolomit, fosfat, kalsit, bentonit, pasir dan tanah liat. Adapun potensi pertambangan yang sudah dieksploitasi meliputi batu gamping, dolomit, fosfat, tanah urug dan truss. Secara umum kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan peralatan dan teknik penambangan yang sangat sederhana, dan pada umumnya tanpa memperhatikan faktor keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

Adapun untuk pembinaan dan penyuluhan pengelolaan pertambangan dilaksanakan di lokasi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi serta penertiban kegiatan penambangan bersama

pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur).

Pada tahun 2004 ini, kegiatan tersebut lebih dititik beratkan pada pelaksanaan reklamasi lahan bekas galian dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring ke 8 (delapan) Kecamatan dalam upaya meningkatkan kesadaran penambang untuk mengajukan ijin, hal ini digambarkan perkembangan pemilik SIPD (Surat Ijin Penambangan Daerah) sampai tahun 2004 sebanyak 24 SIPD dengan jenis bahan galian antara lain dolomit, batu gamping, tanah urug dan phospat.

Disampaikan pula bahwa dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya penerbitan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) menjadi kewenangan daerah. Namun sampai dengan saat ini kewenangan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga proses penerbitan SIPD masih ditangani Pemerintah Propinsi Jatim. Untuk menyikapi hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan langkah tindak lanjut sebagai upaya melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan, juga perlu segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Perkembangan produksi tambang golongan C di Kabupaten Lamongan untuk produksi batu gamping dan batu kapur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi pergeseran penggalian dolomit, tanah urug/pedel dan phospat pada tahun 2002, pada tahun 2003 beralih ke batu kapur dan batu gamping sedangkan Tanah urug dan Batu kapur pada tahun 2004 terjadi penurunan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kualitas bahan galian golongan C dan pajak galian serta pemasarannya. Adapun produksi tambang golongan C pada tahun 2004 adalah sebagai berikut : Dolomit sebesar 2.145 ton, Batu gamping sebesar 40.702 ton, tanah urug/pedel sebesar 3.260,25 ton, batu kapur sebesar 96.294 ton, tanah liat sebesar 5.026 ton.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Tertatanya infrastruktur dan mekanisme penggalian bahan galian golongan C yang ada di wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- b. Mewujudkan tersedianya sumber tenaga energi listrik yang memadai untuk kebutuhan masyarakat secara merata.

2. Sasaran :

- a. Meningkatkan luas areal dan produksi bahan galian golongan C.
- b. Meningkatkan jumlah pengusaha tambang galian golongan C yang memiliki SIPD.
- c. Meningkatkan upaya pengelolaan air bawah tanah melalui pemilikan Surat Ijin Pengambilan Air bawah Tanah.
- d. Peningkatan pengendalian dan pembinaan penambangan galian golongan C.
- e. Tersedianya sumber tenaga energi listrik yang memadai untuk kebutuhan masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang pertambangan dan energi memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pembangunan Pertambangan Rakyat** dengan strategi dan prioritas a) Pemetaan survey potensi dan pemetaan sumberdaya mineral/pertambangan, b) Peningkatan pembinaan penambang tradisional, c) Peningkatan pengendalian dan pemantauan serta perijinan kegiatan penambangan. **2. Pendayagunaan potensi air bawah tanah** dengan strategi dan prioritas a) Pemetaan dan survey potensi air bawah tanah lanjutan, b) Peningkatan pengendalian dan pelayanan perijinan penggunaan air bawah tanah, c) Penyusunan kebijakan penggunaan air bawah tanah. **3. Pengembangan Usaha Ketenaga Listrik** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan kebijakan di bidang usaha ketenagalistrikan diluar PLN, b) Pengendalian dan pelayanan perijinan usaha ketenagalistrikan, c) Terciptanya sistem monitoring, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, d) Memfasilitasi kebutuhan kelistrikan masyarakat pedesaan

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir.

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No	PRIORITY DAERAH	KODE PROGRAM	KINDA (Kategori)	Lokasi	Keterangan	Pemb. (Rp)	ASTERAKAN (R/C)	USULAN (R/C)
1	Perbaikan pengendalian dan pemantauan kegiatan pertambangan	D.1.a	1	Mec. Pichai, Sobuku, Brondong, Babak, Sembung, Hgimbang, Meruap	1. Monitoring, pemantauan, pembinaan dan pelibatan kegiatan pertambangan kelas C & Kd. Lamongan	Rp 15.000.000,00	Lanjutan	Bag. Perole
2	Perbaikan pengendalian dan pelayanan perijinan penggunaan air bawah tanah	D.2.b	1 2	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	1. Pengalihan alat penyaring perijinan-ditjan penggunaan air bawah tanah 2. Pelibatan teknis dan teknis monitoring dan administrasi berisiko jn untuk pelaksanaan Perda No. 5 th. 2004 tentang pengalihan air bawah tanah	Rp 30.000.000,00 Rp 15.000.000,00	Baru Baru	Bag. Perole Bag. Perole Bag. Perole
Jumlah Total						Rp 60.000.000,00		

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berkelanjutan diperlukan pengelolaan lahan dan hutan yang komprehensif dan berorientasi pada aspek ekologis, ekonomi dan sosial sehingga mampu berperan mewujudkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari (ultimate beneficiaries).

Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lamongan, khususnya sub bidang perkebunan pada umumnya dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa, cabe jamu, siwalan jambu mete dan tembakau. Sedangkan untuk komoditi kapas, kenaf dan tebu pengembangannya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang bertindak sebagai mitra kerja sekaligus berperan sebagai pembina khususnya dalam alih teknologi, penyedia paket kredit dan penampung hasil (pemasaran).

Sejalan dengan Arah Pembangunan Ekonomi di daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal (pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan) dan industri yang berbasis pada potensi daerah. Maka bidang kehutanan dan perkebunan juga merupakan bidang yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Kontribusi terhadap PDRB atas harga dasar konstan (ADHK) tahun 2004 sub bidang kehutanan mencapai 0,08 % atau senilai Rp. 1.025.700.000,00 dan sub bidang perkebunan sebesar 0,79 % atau senilai Rp. 10.107.080.000,00.

Sebagaimana paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan yang berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat menjadi penting dan strategis, sehingga perlu lebih diwadahi dan difasilitasi sesuai kemampuan dan kewenangan daerah melalui sistem pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan bersama masyarakat. Hal ini telah menjadi suatu arah dalam pengembangan usaha pengelolaan hutan di Kabupaten Lamongan.

B. KONDISI UMUM

Kabupaten Lamongan mempunyai potensi sumber daya Bidang Perkebunan dan Kehutanan yang cukup besar. Kabupaten Lamongan merupakan penyumbang terbesar produksi kapas dan kenaf di Tingkat Propinsi Jawa Timur yang mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 78,55 % terhadap total produksi di Jawa Timur. Sedangkan produksi kenaf mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 80 % dari total produksi Jawa Timur. Demikian juga luas areal pengembangan

kedua komoditi tersebut merupakan yang terluas di Jawa Timur. Potensi sumber daya kehutanan juga cukup besar yaitu sekitar 33.429 hektar merupakan hutan negara yang sebagian besar merupakan hutan produksi yang dikelola oleh PT. PERHUTANI dan sekitar 1500 hektar hutan rakyat.

Luas lahan hutan negara di Kabupaten Lamongan yang menjadi kewenangan pengelolaannya oleh PT. PERHUTANI adalah seluas 33.429 hektar yang terdiri dari hutan produksi seluas 33.184 ha, dan hutan lindung 244,60 ha.

Sedangkan tegakan hutan rakyat pada tahun 2004 seluas 1575 ha dan lahan kritis yang perlu dikonservasi seluas 14.060,71 ha. Adapun sumberdaya lahan di Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi untuk pengembangan bidang perkebunan seluas sekitar 27.206 ha yang tersebar di 27 wilayah kecamatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan ditujukan pada terwujudnya peningkatan produksi komoditi perkebunan dan kehutanan yang bermutu dan berdaya saing serta untuk mencukupi pasar lokal dan domestik, optimalisasi sumberdaya (SDA, SDM) perkebunan dan kehutanan, semakin berkembangnya pola-pola pengembangan agribisnis, sarana prasarana perkebunan dan kelembagaan masyarakat pedesaan;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan kelembagaan petani/masyarakat desa sekitar hutan, pertemuan rutin, pelatihan dan pembinaan baik di tingkat petani maupun petugas;
- c. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya lahan (tanah) dan air.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka sasaran umum pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan tahun 2006 di Kabupaten Lamongan adalah tercapainya tingkat pertumbuhan sektor kehutanan dan perkebunan yang semakin membaik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004 menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -14,99 % untuk sektor perkebunan

dan sebesar -28,49 % untuk sektor kehutanan. Pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan juga mempunyai sasaran terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH).

Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas-komoditas perkebunan dan kehutanan yang bermutu dan berdaya saing;
- b. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik dan regional;
- c. Terwujudnya diversifikasi produk-produk komoditas perkebunan dan kehutanan;
- d. Meningkatnya kemampuan petani dan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH) dan kelembagaan-kelembagaan di tingkat masyarakat pedesaan dalam optimalisasi potensi sumberdaya dan peluang di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. Terwujudnya pengembangan agribisnis komoditas perkebunan didasarkan pada potensi sumberdaya dan peluang pasar;
- f. Terwujudnya pengembangan hutan rakyat seluas 1250 ha, pembinaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH) dan pengelolaan sumberdaya lahan yang memperhatikan aspek konservasi sumberdaya tanah dan air;
- g. Terwujudnya penurunan lahan kritis seluas 1250 ha;
- h. Terwujudnya pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara LMDH dengan PERHUTANI.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi 1. **Pengembangan agribisnis dalam rangka pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan komoditi perkebunan sesuai potensi daerah dan prospektif ekonomis, b) Peningkatan dan pengembangan komoditas perkebunan sesuai potensi daerah yang prospektif ekonomis, c) Pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air. 2. Kelestarian sumberdaya hutan dan lahan melalui pengembangan hutan dan lahan yang**

memperhatikan aspek konservasi dan sosial ekonomi masyarakat dengan strategi dan prioritas a) Rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman produktif prospektif ekonomis, b) Pembuatan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis konservasi pada lahan kritis, c) Pengembangan hutan hak/rakyat, d) Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan hutan rakyat dan kebun rakyat, e) Terlaksananya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir :

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. PENDAHULUAN

Dalam konstelasi pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di era Otonomi Daerah menjadi berkah sekaligus tantangan tersendiri bagi perekonomian Daerah untuk semakin tumbuh dan berkembang secara mandiri sekaligus melebur dalam era globalisasi yang menekankan adanya peluang dan kompetisi dalam memenangkan pasar. Kondisi pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan masih dominan diarahkan pada pengembangan industrialisasi pedesaan, meskipun tidak menutup kemungkinan akan tumbuh industri-industri besar seiring makin diminatnya wilayah Kabupaten Lamongan sebagai penanaman industri.

Mengingat arti penting dari Industri dan Perdagangan tersebut, maka akan sangat berarti jika dilakukan upaya-upaya pengembangan industri melalui usaha kecil dan menengah. Usaha industri kecil yang jumlahnya sangat besar dapat menjadi wahana pemanfaatan produk-produk primer maupun sebagai alternatif dari kejenuhan bidang pertanian. Demikian pula pada Bidang Perdagangan masih bersifat perdagangan domestik dimana sistem perdagangan tersebut masih mengandalkan komoditi hasil pertanian, sehingga peranan Pemerintah Daerah masih menjadi dorongan utama dalam memfasilitasi pengembangan jaringan usaha baik dalam skala regional maupun nasional.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan bidang industri secara umum dapat ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator, yakni berdasarkan unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi. Pada tahun 2004 secara umum kondisi bidang industri cukup menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk perkembangan unit usaha terjadi peningkatan baik di tingkat usaha formal maupun non formal, dimana usaha formal berkembang 330 unit atau meningkat 15,79% dan usaha non formal berkembang 23.595 unit atau meningkat 0,19%.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja terjadi pula peningkatan baik di tingkat usaha formal maupun non formal, dimana masing-masing pada tahun 2004 mencapai penyerapan tenaga kerja 6.690 orang dan 57.140 orang atau masing-masing mengalami kenaikan sebesar 10,98% dan 0,049% dibanding tahun 2003.

Perkembangan kondisi nilai investasi terjadi pula pergeseran positif dari nilai investasi baik dari jenis usaha formal maupun non formal. Dari masing-masing jenis usaha pada tahun 2004 menunjukkan kemajuan nilai investasi yang cukup berarti

yakni Rp. 40.430.000.000,- dan Rp. 1.619.800.000,- atau masing-masing mengalami peningkatan 25,38% dan 0,344% dibanding dengan tahun 2003.

Sedangkan untuk menggerakkan perdagangan di tingkat pedesaan Pemda Kabupaten Lamongan mulai tahun 2001 sampai dengan 2004 memprogramkan kredit lunak dengan sasaran pasar-pasar desa sebanyak 28 unit atau total dana sebesar 5 (lima) milyar. Dari konstelasi perkembangan pasar desa di Kabupaten Lamongan dapat lebih mendorong akselerasi pertumbuhan perekonomian desa, disamping menciptakan pengembangan distribusi perdagangan produk-produk pedesaan utamanya hasil-hasil pertanian dan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Mempercepat proses industrialisasi dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan guna mendukung industri penggerak utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Mempercepat perluasan lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha di daerah dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang tersedia secara terarah dan konsepsional.
- c. Meningkatkan produksi dan jasa industri dengan harga bersaing dengan memanfaatkan sumber daya alam, energi daya teknologi serta memperhatikan kelestarian dan kemampuan daya dukung wilayah.

2. Sasaran

- a. Tersedianya barang dan jasa di pasar dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- b. Sistem distribusi yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa.
- d. Kestinambungan proses produksi terutama produksi barang-barang pokok.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan usaha Golongan Ekonomi Lemah, b) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, c) Memfasilitasi

akses permodalan, d) Penyediaan permodalan melalui program kredit bunga rendah. **2. Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi** dengan strategi dan prioritas a) Terbangunnya sistem informasi perdagangan, b) Tercapainya iklim usaha yang sehat, c) Peningkatan mutu hasil produksi yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, d) Pelaksanaan promosi terprogram regional, nasional dan internasional, e) Tercapainya perlindungan masyarakat akan hak sebagai konsumen. **3. Peningkatan ekspor jasa dan perdagangan** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan pelaksanaan ekspor, b) Peningkatan mutu produk-produk ekspor, c) Diversifikasi produk ekspor. **4. Peningkatan sarana prasarana pembangunan ekonomi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan penyediaan sarana pasar, b) Peningkatan infrastruktur ekonomi, c) Pembinaan terhadap pelaku-pelaku ekonomi. **5. Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan manajemen industri, b) Peningkatan bantuan modal kerja sarana dan prasarana, c) Peningkatan diversifikasi produk dan desain, d) Peningkatan SDM tenaga kerja yang profesional dan terampil melalui pelatihan, e) Membuka peluang terbangunnya industri substitusi bahan baku lokal, f) Peningkatan kualitas/mutu produksi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	PROJEK/AS/USULAN	KODE PROGRAM	REGIUN/LOKASI	LOKASI	KUANTITAS	REKAPITULASI (Rp)	KELOMPOK (Rp)	LOKASI	LOKASI
1.	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil	F.1.b	1. Pembinaan Usaha Perdagangan di Kab. Lamongan 2. Pembinaan usaha industri kecil, menengah dan pertanian di Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4 tnf	Rp 60.000.000,00			Indragap
2.	Penyediaan permodalan melalui program kredit bunga rendah	F.1.d	1. Bantuan pinjaman modal kerja rendah kecil menengah dan rumah tangga	Kab. Lamongan	6 tnf	Rp 50.000.000,00			Bag. Perencanaan
3.	Tertanggungjawab secara informasi perdagangan	F.2.a	1. Pelayanan informasi Pasar	Kab. Lamongan	31 Unit Usaha	Rp 1.000.000.000,00			Indragap
4.	Pelaksanaan program regional nasional dan internasional	F.2.d	1. Gelar Pameran dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah 2. Prosesi Potensi dan Produk Daerah	Pasar Kec. Lamongan, Babat dan Paciran Jl. Jend. Yogi Satrio Surabaya, Bab dan WBL Kec. Paciran, Babat dan Paciran Medan dan Lamongan	52 tnf 9 tnf	Rp 25.000.000,00 Rp 250.000.000,00			Indragap Indragap
5.	Terwujudnya peningkatan masyarakat akan hak sebagai konsumen	F.2.e	1. Pengawasan dan Monitoring BDKT, SIA dan PIRGG UTTP 2. Pendidikan PIRGG UTTP	Kec. Paciran, Babat dan Paciran Toko Super market Swadaya, Pasar dan lain-lain se-Kab. Lng	3 babat dan pameran produk potensi daerah sesuai kebutuhan	Rp 360.000.000,00			Bag. Perencanaan
6.	Peningkatan penyediaan sarana pasar	F.4.e	1. Pembangunan pasar ikan 2. Pembangunan jalan masuk pasar ikan Lamongan 3. Renovasi dan pembuatan pagar pasar apada 4. Pengadaan Dan Insk dan lembar sampen	Kec. Lamongan Desa-Desa se-Kab. Lng Kec. Lamongan	4 tnf 1 tnf 75 m	Rp 60.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 750.000.000,00			Indragap Indragap Kant. Pengeluaran Pasar
7.	Peningkatan infrastruktur ekonomi	F.4.b	1. Bantuan pengembangan K. Bantar Bati dan Paciran.	Kec. Lamongan	250 m	Rp 350.000.000,00			Kant. Pengeluaran Pasar
8.	Pembinaan terhadap pelaku-pelaku ekonomi	F.4.c	1. Pembelian Alat Peralatan Garam berpakaian dan Pembuatan Pelas Garam.	Kec. Lamongan Des. Sendangpukur dan Sendangpukur Kec. Paciran Kab. Lamongan	30 m 2 unit 2 unit 1 paket	Rp 100.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp 150.000.000,00			Kant. Pengeluaran Pasar Kant. Pengeluaran Pasar Kant. Pengeluaran Pasar Indragap

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PEROGAN BAWA	KETERANGAN (BL)	URUTAN INSTANSI
9	Peningkatan diversifikasi produk dan desain	F.3.c	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan pedagang, petani dan pendiri industri geram benyodum 3. Penelitian PK. 5 4. Pembinaan IK kopiah 1. Pelebaran diversifikasi dan desain produk industri pengolahan buah-buahan. 2. Pelebaran pengalihan mutu dan IK minuman. 3. Pelebaran peningkatan desain diversifikasi produk dan bant. penelitian produk IK gendak. 4. Pelebaran teknik produksi dan desain kemasan industri hasil kayuh. 5. Pelebaran keterampilan IK bambu dan kayu 6. Pelebaran pemecutan tas ecing gondok. 7. Pelebaran pemecutan anyong jegung 8. Pelebaran pengalihan mutu industri kecap ikan. 9. Pelebaran dan bantuan penelitian pembuatan lempung dan keramik dan aneka materialan. 10. Pelebaran pemecutan saos tomat. 	<p>Kacamatan Brondong</p> <p>Terrasi Dolar Benaran Kac Babat</p> <p>Kac. Turu, Pucuk</p> <p>Kac. Sabidu</p> <p>Kac. Nymbeng</p> <p>Ds. Gedangan dan Maduran</p> <p>Kac. Kalibogoh Kac. Babat</p> <p>Babat, Pucuk dan Kb. baru</p> <p>Desat</p> <p>Latan</p> <p>Brondong</p> <p>Lamongan</p> <p>Lamongan</p>	<p>1 tali</p> <p>54 unit</p> <p>2 x</p> <p>20 Org</p> <p>20 Org</p> <p>30 Org</p> <p>30 Org 5 paket</p> <p>10 paket</p> <p>40 org</p> <p>1 paket</p> <p>20 org</p> <p>30 org</p> <p>20 org</p>	<p>Rp 50.000.000,00</p> <p>Rp 251.180.000,00</p> <p>Rp 25.000.000,00</p> <p>Rp 35.000.000,00</p> <p>Rp 20.000.000,00</p> <p>Rp 50.000.000,00</p> <p>Rp 25.000.000,00</p> <p>Rp 70.000.000,00</p> <p>Rp 25.000.000,00</p> <p>Rp 15.000.000,00</p> <p>Rp 25.000.000,00</p> <p>Rp 50.000.000,00</p> <p>Rp 15.000.000,00</p>	<p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Lanjutan</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p> <p>Baru</p>	<p>Indragap</p>
Jumlah Total						Rp 1.290.180.000,00		

BIDANG KOPERASI

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki spektrum luas dan akses pemberdayaan terhadap masyarakat pedesaan, maka bidang koperasi di daerah dituntut re-strukturisasi, revitalisasi dalam upaya partisipasinya dalam pembangunan ekonomi daerah dengan menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebagai kontribusi bidang koperasi menuju kemandirian ekonomi daerah.

Mencermati perubahan paradigma koperasi, tentunya koperasi sebagai salah satu badan yang bersifat otonom di tingkat daerah diberikan kebebasan untuk mengakses segala sumberdaya yang dapat menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat sesuai dengan kemampuan dan keputusan anggota koperasi. Sedangkan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator harus memberikan perlindungan, kemudahan, pencerdasan dan fasilitas pada masyarakat koperasi, agar koperasi menjadi lembaga ekonomi yang otonom dan mandiri.

Perubahan dalam pengelolaan koperasi merupakan bagian tanggungjawab masyarakat dan pemerintah, maka perlu adanya langkah-langkah strategis untuk merespon perubahan tersebut agar koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun sasaran utama Program Pengembangan Koperasi adalah terwujudnya peningkatan struktur permodalan koperasi yang kokoh dan sehat sehingga mampu meningkatkan akses kepada sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan guna menunjang perkembangan koperasi dalam mengakses pangsa pasar.

B. KONDISI UMUM

Jumlah perkembangan koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cenderung ke trend positif, hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2000 jumlah koperasi mencapai sebesar 331 dan pada tahun 2004 berkembang sebesar 363 atau mengalami kenaikan sebesar 9,6 %. Dari jumlah koperasi 363 pada tahun 2004 koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 161 koperasi, dan koperasi yang berpredikat berprestasi berjumlah 6 koperasi.

Dari kenaikan jumlah koperasi belum diikuti secara signifikan, hal ini ditunjukkan pada tahun 2003 jumlah anggota sebesar 159.707 orang dan pada tahun 2004 mencapai 153.495 orang atau mengalami penurunan sebesar 4%.

Penurunan anggota ini sebagai perwujudan revitalisasi keanggotaan yang aktif berperan dalam pengembangan usaha koperasi. Dari aspek volume usaha pada tahun 2004 mencapai perkembangan sebesar Rp. 171.227.784.000,- atau meningkat 7,9 % dari tahun 2003 yang mencapai Rp. 158.653.692.000,-. Kondisi tersebut, koperasi sebagai badan yang bersifat otonom dan merupakan wadah ekonomi rakyat dituntut turut berperan dan dapat mewarnai dalam perekonomian daerah. Untuk itu secara eksternal koperasi diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerja sama usaha dengan badan usaha negara dan swasta. Sedangkan secara internal dalam mewujudkan pengembangan jati diri koperasi dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja pengurus menjadi langkah strategi untuk terus ditingkatkan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan citra koperasi sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri.
- b. Terwujudnya koperasi yang berkualitas.
- c. Meningkatkan akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana.
- d. Meningkatkan citra koperasi di kalangan masyarakat serta menunjang terhadap perekonomian rakyat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Koperasi memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pengembangan usaha koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Memfasilitasi bantuan permodalan koperasi dan melalui lembaga keuangan, antara lain perbankan dan lembaga non perbankan, b) Memfasilitasi hubungan kerjasama kemitraan dengan para pengusaha, c) Pemantauan terhadap Koperasi yang mendapat bantuan permodalan, d) Melaksanakan pembinaan teknis manajemen pengolaari bagi koperasi. **2. Revitalisasi kelembagaan koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pembinaan teknis penataan organisasi dan usaha terhadap koperasi, b) Peningkatan evaluasi kinerja koperasi, c)

Penyusunan program pengembangan koperasi. **3. Pengembangan kualitas SDM Koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan terhadap SDM lembaga Koperasi, b) Mendorong terciptanya jiwa wirausaha dan enter-prunership para pengelola koperasi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Koperasi sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERKOPERASIAN

No	Program/Aspek Kegiatan	Kode Program	Kategori Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Ketersediaan Dana	Mekanisme
1	Membantu bantuan pemrosesan koperasi dan modal lembaga keuangan, antara lain pertanian dan lembaga lain pertanian	G.1.a	1. Pembinaan dan bantuan pelayanan modal kerja usahawan pertanian melalui koperasi	Kab. Lamongan	20 Koperasi	Rp 1.500.000.000,00	Lunas	Indagcap
2	Peningkatan evaluasi kinerja koperasi	G.2.b	2. Bantuan modal usaha KSP/USP	Kab. Lamongan	1 Paket	Rp 1.000.000.000,00	Baru	Indagcap
3	Penyusunan program pengembangan koperasi	G.2.c	1. Peningkatan kualitas dan kesehatan koperasi	Kab. Lamongan	200 esp se- Lamongan	Rp 30.000.000,00	Lunas	Indagcap
4	Pembinaan terhadap SOM lembaga koperasi	G.3.a	1. Penyusunan data base koperasi / profil koperasi se-Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	300 bsp	Rp 60.000.000,00	Baru	Indagcap
4	Pembinaan terhadap SOM lembaga koperasi	G.3.a	1. Peningkatan Partisipasi bagi Pta Koperasi	Kab. Lamongan	10 desa	Rp 10.000.000,00	Baru	Indagcap
	Jumlah Total					Rp 2.490.000.000,00		

BIDANG PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Didalam memasuki era globalisasi yang menganut sistem perdagangan bebas termasuk didalamnya kegiatan dibidang investasi memiliki tingkat persaingan yang semakin tajam. Menghadapi hal tersebut mulai Pemerintah Pusat sampai Tingkat Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan baru yang intinya diharapkan pertumbuhan investasi dan perdagangan dapat meningkat secara signifikan, sehingga menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak.

Seiring itu pula dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengelola Pemerintahan secara mandiri, akan memiliki konsekuensi logis dimana Pemerintah Kabupaten Lamongan dituntut harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, utamanya dalam mendorong peningkatan di bidang investasi dan perdagangan sebagai manifestasi terwujudnya perkembangan penanaman modal di Kabupaten Lamongan.

Sebagai akselerasi perkembangan penanaman modal di daerah, tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan usaha masyarakat yang terhimpun dalam rangka menggarap potensi sumber daya melalui berbagai macam pola kerjasama secara optimal.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan nilai investasi tahun 2004 baik pada usaha formal secara total mencapai Rp. 38.919.800.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,34% dibandingkan tahun 2003. Namun demikian perkembangan sektor investasi di bidang industri dan perdagangan masih memerlukan akselerasi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, pembinaan, bantuan peralatan, mesin dan bantuan modal.

Perkembangan nilai investasi melalui pengembangan usaha daerah telah dikembangkan melalui akselerasi : (1) Kegiatan usaha daerah pada PD Bank Pasar Lamongan mengalami kenaikan, hal ini dapat ditunjukkan oleh kenaikan aset sebesar Rp. 44.238.793.000,- pada tahun 2003 dengan tahun 2004 sebesar Rp. 49.889.937.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 0,13 % hal ini memberikan gambaran semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PD Bank Pasar. Sedangkan rentabilitas atau kemampuan untuk mendapatkan laba terhadap modal disetor mencapai 18,9 %, hal ini menggambarkan bahwa PD Bank Pasar

masih cukup profitable. (2) Kegiatan usaha daerah pada PDAM Lamongan mengalami peningkatan target pendapatan pada tahun 2004 ini didasarkan pada adanya peningkatan jumlah sambungan rumah (SR) / pelanggan dan telah berfungsinya Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Babat yang mempunyai kapasitas produksi 60 liter / detik. Sampai Desember 2004 realisasi pendapatan mencapai Rp. 2.598.219.000,- atau sekitar 57,90%. (3) Kegiatan usaha daerah pada PD Aneka Usaha Lamongan Jaya cukup mengalami peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan aset modal dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 2.590.774.119,64 pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 5,40 %. Dari peningkatan tersebut berdampak pada laba PD Aneka Usaha Lamongan Jaya sebesar Rp. 212.125.001,70,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp. 209.883.117,93,- atau naik sebesar 1,07 %.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Menyempumakan sistem dan mekanisme keuangan perusahaan daerah secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan akuntabilitas keuangan perusahaan daerah
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran

2. Sasaran

- a. Mendorong tumbuh kembangnya perusahaan daerah.
- b. Peningkatan pembinaan dan penataan manajemen perusahaan daerah
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perusahaan daerah
- d. Membangun jaringan dan mitra kerja dengan Pihak III (Swasta).

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Penanaman Modal memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan investasi pembangunan daerah** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan mutu pelayanan prima investasi, b) Penataan sarana prasarana investasi, c) Penyebar luasan potensi investasi daerah, d) Tersedianya pusat informasi kajian investasi. **2. Pelayanan perijinan penanaman modal** dengan strategi dan prioritas a) Pemberian kemudahan persetujuan para investor, b) Merubah sikap dan cara aparatur dalam memberikan pelayanan secara profesional **3. Peningkatan kinerja perusahaan daerah** dengan strategi dan

prioritas a) Mendorong tumbuh kembangnya perusahaan daerah, b) Peningkatan pembinaan dan penataan manajemen perusahaan daerah, c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perusahaan daerah, d) Membangun jaringan dan mitra kerja dengan Pihak III (Swasta).

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Penanaman Modal sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PENANAMAN MODAL

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (B/L)	USULAN INITIASI
1	Meningkatkan mutu pelayanan prima investasi	H.1.a	1 Pembuatan data potensi investasi daerah	Kab. Lamongan	-	Rp 20.000.000,00	Baru	Indogap
2	Perjybutaan potensi investasi daerah	H.1.c	1 Penyediaan informasi investasi daerah	Kab. Lamongan	1 paket	Rp 20.000.000,00	Baru	Bag. Perencanaan
3	Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah	H.3.a	1 Pengadaan dan pemasangan pipa diameter 200 mm - Sukoed - Pulojethu	Pucuk - Sukoed - Sukoed - Pulojethu	7500 m 5793 m	Rp 1.038.461.538,00 Rp 860.000.000,00	Baru Baru	PDAM PDAM
4	Peningkatan pembinaan dan pendataan manajemen perusahaan daerah	H.3.b	1 Pembinaan dan evaluasi perusahaan daerah	Kab. Lamongan	PD. Bank Pias, PDAM, PD A.U.J., Pakik Pupuk Meheren dan Pakik Es	Rp 75.000.000,00	Baru	Bag. Perencanaan
Jumlah Total						Rp 2.003.461.538,00		

BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja menempati makna yang penting bagi kehidupan berbangsa bahkan mungkin juga merupakan faktor penentuan kelangsungan kehidupan suatu bangsa yang bersangkutan baik fisik maupun kultural, sedangkan bekerja mempunyai makna banyak dan luas yang ditujukan untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah dengan menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan seseorang.

Persoalan yang pelik adalah terhadap persediaan tenaga kerja di Indonesia umumnya dan Lamongan khususnya, sebagian besar masih terdiri dari tenaga kerja yang tidak terlatih dengan penyebaran yang tidak seimbang antar wilayah/daerah sedangkan kebutuhan pasar kerja diperlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai/tepat dan memadai, sehingga terjadi ketimpangan antar daerah/wilayah yang menyebabkan terjadinya kesukaran-kesukaran seperti kesukaran berpindah ke lain daerah, pengangkutan, perumahan, kesukaran syarat-syarat kerja. Betapapun melimpah ruahnya kekayaan alam suatu daerah tanpa adanya tenaga kerja yang terampil untuk menggali dan mengolahnya maka kekayaan alam tersebut tidak ada artinya untuk kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pula terhadap peningkatan pertumbuhan angkatan kerja sedangkan kesempatan kerja tidak sanggup mengikuti percepatan dari pertumbuhan angkatan kerja yang menimbulkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran, solusinya adalah menciptakan dan atau mewujudkan kesempatan-kesempatan kerja baik formal maupun informal secara luas bagi angkatan kerja atau penduduk usia kerja sehingga dapat diserap oleh pasar kerja.

Pemerintah berusaha secara optimal mengembangkan potensi inisiatif dan daya kreasi setiap tenaga kerja dalam rangka penanaman serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan insan kerja yang diharapkan dapat tercapainya tingkat produksi barang dan jasa yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang optimal.

B. KONDISI UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2003 yang sebanyak 1.224.817 jiwa, usia pencari kerja pemula (15-19 tahun) ada 110.159 orang, (20-24 tahun) ada 87.469 orang dan usia (25-29 tahun) sebanyak 88.685 orang, dari jumlah tersebut berdasarkan data yang ada tahun 2004 di Kabupaten Lamongan

menunjukkan bahwa angka pencari kerja telah tercatat sebanyak 7.576 orang, sementara berdasarkan pendataan lapangan kerja yang ada hanya membutuhkan 455 orang, dengan realisasi penempatan tenaga kerja sebanyak 419 orang. Sedangkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tahun 2004 tercatat sebanyak 234 orang. Sedangkan Tenaga Kerja Formal tercatat sebanyak 9.511 orang dan tenaga Kerja Informal terdidik tercatat 160 orang dengan data pengangguran mumi tercatat sebanyak 21.866 orang.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh atau dengan pertumbuhan kesempatan kerja merupakan kondisi yang faktual dewasa ini dan merupakan dasar persoalan manajemen ketenagakerjaan hal ini pula yang paling banyak membutuhkan energi pemecahannya, belum lagi persoalan TKI ilegal disamping peraturan-peraturan ketenagakerjaan di luar negeri yang kurang mendukung terhadap tenaga kerja Indonesia yang akan mencari penghidupan di luar negeri.

Banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah dibidang pembangunan ketenaga kerjaan di Kabupaten Lamongan baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun luar negeri disamping persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga kerja sendiri yang merupakan akar dasar persaingan teknikal maupun intelektual masyarakat guna mencukupi dan meningkatkan derajat kehidupannya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan ketrampilan serta menumbuh kembangkan motivasi dan jiwa wira usaha.
- b. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan upaya penempatan tenaga kerja melalui sistem terpadu.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.
- b. Tersedianya Informasi Pasar Kerja.
- c. Terlaksananya Pemberangkatan/Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Keluar Negeri.
- d. Meningkatkan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- e. Meningkatkan Hubungan Industrial.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM pencari kerja** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelatihan tenaga kerja, b) Menyiapkan SDM pencari kerja dengan memberikan pembekalan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, c) Mewujudkan perluasan kesempatan kerja formal/informal secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, d) Mewujudkan penyediaan sistem informasi bursa kerja, lokal, regional, nasional dan internasional. **2. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja** dengan strategi dan prioritas a) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat, b) Memfasilitasi pemberian hak dan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya wanita, TKI dan TKW, c) Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan ketenangan berusaha, d) Peningkatan produktifitas dan pelatihan ketrampilan tenaga kerja

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir :

BIDANG KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Derajat kesehatan yang optimal merupakan dambaan bagi setiap orang, oleh karena itu perlu diupayakan semaksimal mungkin dan dijaga terus-menerus. Kesehatan sangat berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia sehingga penanganan dibidang ini dilakukan lintas sektor dan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pembangunan dibidang kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Pembangunan Nasional.

Kesehatan adalah investasi yang secara nasional diprogramkan menuju Lamongan Sehat 2010 mengandung makna bahwa kesehatan adalah kekayaan dan anugerah yang patut disyukuri, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten memiliki peluang untuk merumuskan perencanaan strategik dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat 2010 yang dituangkan dalam akuntabilitas pembangunan kesehatan. Dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah kita upayakan bersama ini nampak hasilnya secara nyata dengan adanya penilaian dan penghargaan yang telah kita terima berupa Manggala Karya Bhakti Husada dan Ksatria Bhakti Husada dari Presiden Republik Indonesia, meskipun demikian kita tidak boleh terlena, upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas, tempat-tempat pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit juga terus dikembangkan dalam upaya pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan yang paripurna dilaksanakan secara serasi, terpadu serta terus dikembangkannya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan.

B. KONDISI UMUM

Untuk menunjang pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Lamongan, telah didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana antara lain : Pusling sebanyak 36 Puskesmas 33 unit, Puskesmas Perawatan 108 unit, Polindes dengan 238 unit, Posyandu 1.740 unit. Sedangkan untuk menunjang pelayanan masyarakat di Bidang Kesehatan pada tahun 2004 telah tersedia Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain : Tenaga Medis sebanyak 142 orang, Paramedis Perawatan 891 orang, Non Paramedis Perawatan 200 orang dan Non Perawatan 382 orang, serta didukung oleh Tenaga Kader Kesehatan sebanyak 7.932 orang, Instansi

Swasta 3 unit, Balai Pengobatan 20 unit, Rumah Bersalin 12 unit, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 12 unit dan Apotik sebanyak 21 unit.

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Rujukan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Permukiman, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Sumber Daya Kesehatan.

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan terdepan yang melayani masyarakat, pada tahun 2000 kunjungan rawat jalan sebanyak 896.567 orang (80,35 %) dari jumlah penduduk turun menjadi 437.301 orang (35,81 %) di tahun 2004. Namun pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan Rumah Sakit Umum pada tahun 2004 sebanyak 62.164 orang atau mengalami peningkatan sebesar 61,84 % bila dibanding tahun 2000 yang hanya mencapai 32.357 orang.

Peningkatan jumlah kunjungan ini disebabkan karena semakin banyaknya dibuka Poli Pelayanan yang disertai dengan adanya Dokter Spesialis. Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap di puskesmas di tahun 2000 sebanyak 12.161 orang meningkat menjadi 17.652 orang pada tahun 2004. Kecenderungan peningkatan ini lebih banyak disebabkan adanya fasilitas Rawat Inap yang ada disebagian Puskesmas, sedangkan kunjungan pasien Rawat Inap di rumah sakit tahun 2000 menjadi sebanyak 5.274 orang di tahun 2004.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terutama keluarga kurang mampu;
- b. Terwujudnya peningkatan/perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat gizi buruk;
- c. Terwujudnya peningkatan sumberdaya kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan;
- d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang paripurna dengan cara dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan cepat, tepat dan rama bagi masyarakat;

2. Sasaran

- a. Penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Ibu serta peningkatan umur harapan hidup;
- b. Angka Kematian akibat penyakit menular dapat lebih diturunkan lagi, untuk Angka Kesakitan diare diharapkan dapat ditekan, Angka Kesakitan dikarenakan ISPA, diharapkan tinggal 10 %, Penyakit Malaria tetap rendah, Penyebaran dan kecenderungan, penyakit demam berdarah dapat ditekan, Penyakit TBC Paru pada tahun 2006 diharapkan prevalensinya rendah, Penyakit Kusta pada tahun 2006 diharapkan tinggal 1 per 10.000 penduduk;
- c. Penderita kurang energi Protein (KEP) pada Balita Anemia Gizi pada Ibu dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) di desa endemik berangsur-angsur untuk ditekan;
- d. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih ditingkatkan didahului oleh pemeriksaan kehamilan sedini mungkin, dengan upaya ini diharapkan angka kematian ibu dapat menurun;
- e. Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Lamongan tetap dalam keadaan strata maju;
- f. RSD Kelas C Dr. Soegiri Lamongan selain dapat lebih meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat juga tenaga spesialisasinya;
- g. Kemampuan laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD) serta pelayanan rujukan dapat dikembangkan dan ditingkatkan lagi;
- h. Penggunaan Obat Esensial dan Generik makin meluas di setiap unit pelayanan kesehatan pemerintah/swasta dengan distribusi yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- i. Obat tradisional yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan;
- j. Pelayanan air bersih untuk penduduk perkotaan dan pedesaan sedangkan penduduk pedesaan yang menggunakan jamban keluarga dan SPAL dari tahun ke tahun meningkat;
- k. Tenaga kesehatan ditingkatkan mutu dan jumlahnya berdasarkan beban kerja dan kapasitasnya;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kesehatan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan mutu keterjangkauan pelayanan kesehatan sarana dan prasarana Kesehatan** dengan strategi dan prioritas a) Ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Plus, c) Peningkatan SDM Aparat Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, d) Peningkatan dan pembinaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), e) Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan, f) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, g) Ketersediaan obat yang memadai. **2. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin, b) Jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin. **3. Peningkatan mutu dan akses pelayanan KIA, reproduksi dan Gizi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, b) Peningkatan kesehatan reproduksi dan usia lanjut, c) Perbaikan gizi masyarakat. **4. Peningkatan mutu ketersediaan obat dan perlindungan obat dan makanan/minuman berbahaya** dengan strategi dan prioritas a) Penyediaan obat yang memadai, b) Peningkatan distribusi obat, c) Intensifikasi pengawasan obat dan makanan khususnya beredarnya obat palsu, penyalahgunaan obat NAPZA dan pembinaan obat tradisional. **5. Pemberdayaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan peran posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, b) Peningkatan promosi kesehatan, c) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). **6. Penyehatan lingkungan dan permukiman** dengan strategi dan prioritas a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), b) Penyehatan lingkungan permukiman, c) Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih, d) Perbaikan perilaku sehat melalui lingkungan sehat.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kesehatan sebagaimana terlampir :

NO	PROJEK/TAJUK MASALAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (NILAI)	USULAN INSTANSI
4	Peningkatan pelayanan kesehatan	J.1f	1 Peningkatan pelayanan kesehatan nuklun melalui serena peraltan modis ruang oparasi 2 Bantuan Kegiatan Cabang PAI	Pulasamas K; Kembang Kab. Lamongan	1 paket 1 paket	Rp 200,000,000.00 Rp 30,000,000.00	Baru Lanjutan	Dirikes Bag Keamas
6	Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin	J.2.a	1 Kegiatan penurjang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin	Kab. Ling	1 paket	Rp 30,000,000.00	Baru	Dirikes
7	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak dan Peningkatan kesehatan reproduksi dan usia lanjut	J.3.a	1 Pengabdian ilat dan pemeriksaan kesehatan emak sebuh 2 Slemuln dan sosialisai hidup 3 Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak 4 Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Usia Lanjut.	Kab. Ling	1 Pt	Rp 80,000,000.00	Baru	Dirikes
10	Perbaikan Gas Masyarakat	J.3.c	1 Perbaikan Gas Masyarakat 2 Pemertasaan HB Remaja Putri (Pondok Pesantren) 3 Akselerasi Vitamin A 4 Pengabdian Pembinaan Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Belta KEP 5 Pengabdian PMT Pemulihan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Kab. Ling	27 Perpos 474 Desa 160 Anak 105 Bumil KEK	Rp 150,000,000.00	Baru	Dirikes
11	Penyediaan obat yang memadai	J.4.a	1 Pengabdian Obat-obatan Pulasamas dan RSUD	Kab. Ling	1 paket	Rp 2,000,000,000.00	Baru	Dirikes
12	Peningkatan Distribusi Obat	J.4.b	1 Pengabdian dan Pendistribusian Obat-obatan	Kab. Ling	1 paket	Rp 12,000,000.00	Baru	Dirikes
13	transfusai pengawesan obat dan makanan khususnya benedarnya obat paku, penyediaan obat NAPZA dan pembinaan obat	J.4.c	1 Intensifikasi Pengawesan Obat dan Makanan Khususnya benedarnya obat paku, penyediaan obat NAPZA dan Pembinaan Obat terhidap Peugas, Pengabdian, Sirens Produk, Sirens dan Prasirens Dietbus / Penjastan, Tradisional (Kos Jenu)	Kab. Ling	1 paket	Rp 38,500,000.00	Baru	Dirikes
14	Peningkatan peran penyendu sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar masyarakat	J.5.b	1 Lomba dan pembinaan Penyendu 2 Pengembangan dan Pembinaan JPKM dan dana Sehat 3 Akselerasi Penyendu 4 Pelehan kader penyendu	Kab/Kac Kab. Ling Kembangbahu 25 Kecamatan	1 Pt 1 Pt 70 pos 100 Desa @ 2 org	Rp 70,000,000.00 Rp 52,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 50,000,000.00	Baru Baru Baru Lanjutan	Dirikes Dirikes Dirikes Bepomas
15	Peningkatan promosi kesehatan	J.5.b	1 Peningkatan Promosi Kesehatan	25 Kecamatan	100 Desa @ 2 org	Rp 70,000,000.00	Baru	Dirikes

NO	PROJEK BERSAMA	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENYALUR BAYAR	KETERANGAN (NILI)	USULAN BERTAHAP
16	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PbS) dan Peningkatan literasi cacing pada murid SD/MI	15c	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Peningkatan literasi cacing pada murid SD/MI	Kab. Lng	1 paket 64 SD/MI	Rp 120.000.000	Baru	Dras
17	Peningkatan peran keluarga dan tugas pendidikan tenaga kependidikan	15d	Operasional AKPER	Kab. Lng	1 paket	Rp 665.000.000	Baru	Dras
18	Peningkatan dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan kejadian luar biasa	18a	Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Kab. Lng	1 paket	Rp 291.560.000	Baru	Dras
19	Peningkatan lingkungan permukiman	18b	Peningkatan Lingkungan Permukiman Penderita Kusta Keluarga Miskin	Kab. Lng Lamongan Kerinci	2 Desa 1500 KK 25 rumah	Rp 12.780.000 30.000.000	Baru	Dras
20	Penyediaan dan pemeliharaan sarana air	18c	Pendamping WSLC-2	Kab. Lng	18 Desa	Rp 452.295.000	Baru	Dras
						Rp 7.569.114.000,00		

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka telah terjadi pembaharuan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Lamongan, senantiasa berusaha agar setiap warga mendapatkan layanan pendidikan tanpa mengenal latar belakang baik yang normal maupun yang berkelainan yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, berstatus sosial ekonomi tinggi, menengah maupun rendah. Kesemuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan tahun yang dalam perwujudannya menjadi tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Pendidikan serta peranan faktor keluarga.

Pembangunan di bidang ini merupakan bidang yang memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik/generasi muda sebagai generasi penerus dan berkualitas di masa depan, sehingga kegiatan pembangunan yang mendukung ke arah ini meliputi Pembangunan pada : Pembinaan pendidikan baik dasar, menengah, tinggi, bantuan operasional, perawatan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pembinaan dan pengembangan Generasi muda dan olahraga di lingkungan sekolah serta Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah.

B. KONDISI UMUM

Secara Umum tingkat pendidikan masyarakat Lamongan relatif rendah, rata-rata penduduk berpendidikan setingkat SLTP. Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun 2004 sebesar 99,43 %, Angka Partisipasi Murni SLTP/MTS sebesar 78,50 % sedangkan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA lebih rendah sebesar 45,39 %.

Berdasarkan hasil base line survey tahun 2002 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan penyandang Buta Huruf/Aksara yang berusia 10-44 tahun berjumlah 15.077 orang. Terhadap permasalahan ini pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah secara bertahap setiap tahun berupaya melakukan pemberantasan Buta Huruf melalui Program Keaksaraan Fungsional (KF) dengan melibatkan lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan.

Perkembangannya penyandang Buta Aksara Tahun 2004 berkurang menjadi 12.453 orang.

Tantangan umum pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah bagaimana membangun sistem pendidikan agar semakin mampu membentuk manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri serta tanggap menghadapi perubahan jaman, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tuntutan pembangunan, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas produk pendidikan dan daya serapnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata pendidikan bagi semua warga negara serendah-rendahnya berpendidikan SLTP merupakan prasarat penting untuk memasuki era global dengan mewujudkan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.

Permasalahan pokok yang mendasar adalah masih kurangnya kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan seperti : rendahnya kualitas lulusan para siswa, belum optimalnya kualitas proses belajar mengajar, belum optimalnya kemampuan mengajar dari kalangan guru-guru, rendahnya manajemen sekolah serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) : " Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ", salah satu hambatannya adalah kondisi sarana dan prasarana Gedung Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lamongan yang berjumlah 684 lembaga, yang kondisinya baik sejumlah 226 lembaga, kondisi rusak berat berjumlah 174 lembaga dan rusak sedang berjumlah 284 lembaga. Upaya rehabilitasi selalu dilakukan setiap tahun, akan tetapi karena tingkat kerusakannya yang parah dan membahayakan siswa, kiranya perlu memprioritaskan penanganan rehabilitasi secara tuntas.

Penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan. Secara umum salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah lemahnya manajemen sekolah (Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Dewan Guru) dan kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung dibidang pendidikan. Disadari memang kekuatan keberhasilan pendidikan harus dimulai dari pengelolaan secara profesional manajemen sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dan mampu menciptakan rasa memiliki lembaga sekolah. Solusi kearah pengelolaan sekolah yang baik perlu kiranya menerapkan dan mengembangkan Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diseluruh lembaga pendidikan. Program ini telah dirintis dan diuji coba oleh UNICEF & UNISCO di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2002.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pendidikan seusia dengan amanat Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang SISDIKNAS Nomor : 20 Tahun 2003, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan lebih dapat ditingkatkan yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja terhadap pencapaian pelaksanaan tugas;
- b. Tertatanya manajemen pengelolaan pendidikan di daerah yang berkualitas dan profesional yang mampu meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatnya anak usia sekolah untuk memperoleh kesempatan dan pemerataan pendidikan;
- d. Menekan sekecil mungkin anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah (Drop Out);
- e. Meningkatnya mutu pendidikan (sarana dan prasarana, kurikulum, SDM Guru dan Lulusan) disetiap jenjang pendidikan baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;
- f. Terwujudnya Manajemen Sekolah yang profesional di setiap lembaga pendidikan baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Diknas 9 Tahun** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan daya tampung siswa, b) Penurunan angka putus sekolah, c) Optimalisasi pelaksanaan wajar diknas 9 tahun, d) Memberikan bantuan biaya minimal kepada siswa SD/MI dan SLTP/MTs bagi keluarga miskin, e) Memberikan bantuan Biaya Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI, f) Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan, g) Optimalisasi kegiatan keaksaraan fungsional untuk menekan angka buta huruf, h) Optimalisasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS), i)

Mengembangkan Program GNOTA, j) Mewujudkan Kejar Pakat A, B dan C. **2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), b) Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), c) Pengendalian Mutu Sekolah Negeri/Swasta melalui Badan Akreditasi Sekolah (BAS), d) Meningkatkan standarisasi Mutu Pendidikan PADU, TK, SD/MI, MTs/SLTP, SLTA/MA, e) Mengupayakan pemerataan dan pendayagunaan guru untuk efisiensi, f) Mengembangkan karya ilmiah remaja melalui berbagai lomba, g) Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, h) Mengembangkan dan menanamkan budi pekerti kepada siswa, i) Pengembangan teknologi informasi, j) Meningkatkan dan mengembangkan disiplin kegiatan belajar mengajar, k) Meningkatkan Kesejahteraan Guru PNS/Guru Bantu/Guru Ngaji/GTT/KJM guru, l) Meningkatkan Mutu Perpustakaan Sekolah, m) Pembinaan Kewirausahaan Pemuda di Sekolah. **3. Peningkatan kualitas SDM Guru/Pendidik** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan Mutu profesi (kualifikasi dan kompetensi) Guru, b) Pembinaan dan pengembangan karier Guru, c) Peningkatan kemampuan profesional guru negeri/swasta dan PLS melalui pendidikan dan pelatihan. **4. Peningkatan mutu seni dan budaya daerah** dengan strategi dan prioritas a) Intensifikasi Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya Daerah, b) Optimalisasi Penggalan nilai-nilai Budaya Tradisional Daerah, c) Pengembangan Potensi Seni dan Budaya Daerah, d) Dokumentasi nilai-nilai Budaya Tradisional dan Musium Purbakala, e) Tersedianya Fasilitas Gedung dan Peralatan Kesenian Daerah, f) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada prasasti dan tempat-tempat ziarah yang berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan dalam pelaksanaan Hari Jadi Lamongan. **5. Peningkatan Mutu sarana dan prasarana pendidikan** dengan strategi dan prioritas a) Pembangunan/Rehabilitasi/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah, b) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Olah raga guna mendukung prestasi olah raga siswa.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir :

NO.	PROGRIJAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEMATIAPROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (BL.)	USULAN INSTANSI
8.	Pengabdian atau service negeri / swasta melalui Badan Amatir Sekolah (BAS)	K.2c	1. Pengabdian atau Service Negeri/Swasta melalui BAS 2. Mengabdikan pelayanan pendidikan melalui BAS 3. Pengabdian atau Service Negeri/Swasta melalui BAS SMP/MS/MTs 4. Bantuan kegiatan GOR/TIK	27 Kecamatan 178 lembaga SD/TK 27 Kecamatan Kab. Lamongan	50 Lembaga Kec. 3 Lembang 50 Lembaga	Rp 100,000,000.00 Rp 54,000,000.00 Rp 125,000,000.00 Rp 30,000,000.00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan	P dan K P dan K P dan K Bag. Keasmes
9.	Meningkatkan standarisi atau expenditure PADU, TK, SD/RA, MTs/SLTP, SUTAMA	K.2d	1. Lomba MPK SMP 2. Olimpiade SMA/SMK 3. Lomba MPK SMP 4. Olimpiade SMA/SMK/MA 5. Lomba pidato bte. Nggris SMP/MS/SMK 6. Lomba siswa berprestasi SMA 7. Lomba siswa berprestasi SMP 8. Lomba guru berprestasi SMP/MS/SMK	Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan	128 SMP 60 SMA 370 orang 500 orang 215 orang 250 orang 120 orang 60 orang	Rp 37,800,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 37,800,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 21,500,000.00 Rp 37,800,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 6,500,000.00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K
10.	Mengupayakan pemantauan dan pendayagunaan guru untuk efektivitas	K.2e	1. Meleksi guru SD	SDN dan Kab. Lng	135 guru	Rp 6,750,000.00	Lanjutan	P dan K
11.	Mengembangkan karya ilmiah remaja melalui berbagai lomba	K.2f	1. TOT Pembinaan IOR SMA/SMK 2. TOT Pembinaan IOR SMP/MS 3. LUR SMA/SMK 4. LUR SMP/MS 5. LUR SMP 6. LUR SMA 7. LUR SMK	Lamongan Lamongan Lamongan/MS Lamongan/MS Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 120 SMP 60 SMA 20 SMK	Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 12,600,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 2,700,000.00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
12.	Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi	K.2g	1. Pengabdian reward siswa berprestasi SMA/SMK/MS 2. Pengabdian reward siswa berprestasi SMP/MS 3. Pengabdian reward kepada berprestasi/pakar 4. Olimpiade MPK, Lomba Mata Pelajaran TK/SD siswa berprestasi, lomba HUK, kreasi dan PLS dan gambar SD 5. Meleksi siswa POPPA yang dibuat oleh pelajar SMP, SMA, SMK/MS 6. Meleksi siswa POR SD TK Kabupaten 7. Meleksi siswa lomba Jasin, Spirit dan gambar kejuruan di Tk. Prop.	Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 750 Siswa 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan	Rp 17,500,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 75,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 7,000,000.00	Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
13.	Mengembangkan dan memajukan budi pekerti kepada siswa	K.2h	1. LDKS SMA/SMK/MS 2. LDKS SMP 3. TOT IKM Pecoba Osis SMA/SMK 4. TOT IKM Pecoba Osis SMP 5. Pelatihan Pelembagaan	Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 25,000,000.00	Lanjutan Baru Lanjutan Lanjutan Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
14.	Meningkatkan kompetensi guru PNS/guru bantu/guru ngaji/GTI/TKA/guru	K.2i	1. Keefektifan GTI/GTY SD 2. Bantuan pembinan pendidikan 3. Bantuan kepada guru ngaji 4. Bantuan keefektifan guru swasta 5. Bantuan kompetensi guru TK	Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan	600 guru - - - -	Rp 960,000,000.00 Rp 150,000,000.00 Rp 1,000,000,000.00 Rp 800,000,000.00 Rp 450,000,000.00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan	P dan K Bag. Keasmes Bag. Keasmes Bag. Keasmes Bag. Keasmes
15.	Mengabdikan atau profesi (qualifikasi dan kompetensi) guru	K.2j	1. Pembinaan Guru Televisi	TV/SDH	100 guru	Rp 10,800,000.00	Lanjutan	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
16.	Peningkatan kemampuan profesional guru negeri/swasta dan PLS melalui pendidikan dan pelatihan	K.3.c	1 Pelatihan Tutor KF (Keaksaraan fungsional) 2 Pelatihan wali bagi guru Pendidikan Jasmani	Kab. Lamongan Kab. Lamongan	300 orang 60 orang	Rp 40,000,000.00 Rp 20,000,000.00	Baru Baru	P dan K P dan K
17.	Intensifikasi apresiasi dan kreatifitas seni dan budaya daerah	K.4.a	1 Festival Budaya Jawa Timur 2 Sekolah pekan seni pelajar SD, SMP, SMA / SMK SeKabupaten Lamongan 3 Duta seni ke TMJ Jakarta 4 Penggarapan tari Daerah 5 Festival tari tradisional & Kesenian Tradisional 6 Penyelenggaraan/Pengiriman 'bohai' Festival Mocopit, Budi Pekerti dan HAH	Surabaya / Malang Lamongan Jakarta Karanggengeng / Paciran Lamongan Surabaya	5 paket 3 paket 1 paket 2 paket 2 paket 3 paket	Rp 60,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 30,000,000.00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
18.	Optimisasi penggalan nilai-nilai budaya tradisional daerah	K.4.b	Optimisasi Potensi Seni & Budaya Daerah 1 Sosialisasi Upacara Adat Pengerin Bakari Lamongan 2 Penyelenggaraan Seminar Keagamaan : Joto Mbodo, Airtangga	Lamongan Lamongan	1 paket 2 paket	Rp 20,000,000.00 Rp 40,000,000.00	Baru Baru	P dan K P dan K
19.	Pengembangan potensi seni dan budaya daerah	K.4.c	Optimisasi Potensi Seni & Budaya Daerah 1 Penerbitan buku-buku Sejarah (berita Rakyat) Sejarah Perjuangan Lamongan 2 Pelatihan Guru Seni	Lamongan Lamongan	2 paket 3 paket	Rp 20,000,000.00 Rp 45,000,000.00	Baru Baru	P dan K P dan K
20.	Dokumentasi nilai-nilai budaya tradisional dan museum purbakala	K.4.d	Dokumentasi Nilai-nilai Budaya Tradisional dan Museum Purbakala 1 Penakaman Upacara Adat Nyungging	Ngimbang	1 paket	Rp 10,000,000.00	Baru	P dan K
21.	Tersedianya fasilitas gedung dan peralatan kesenian daerah	K.4.e	Tersedianya Fasilitas Gedung dan Peralatan Kesenian Daerah 1 Pengadaan seperangkat Gamelan (Pebg) 2 Pengadaan Busana Pengrajin 3 Pengadaan Trapet atau Gamelan	Lamongan Lamongan Lamongan	1 set 2 set 1 unit	Rp 80,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 6,000,000.00	Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K
22.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada prosesi dan tempat tempat ziarah yang berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan dalam pelaksanaan Hari Jadi Lamongan	K.4.f	Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Prosesi dan tempat Ziarah yang berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan dalam pelaksanaan HJL 1 Pembuatan cungkup prosesi 2 Peranginan / Rehab Cungkup Prosesi	Ngimbang Ngimbang dan Sembang	2 unit 6 unit	Rp 20,000,000.00 Rp 30,000,000.00	Baru Lama	P dan K P dan K
23.	Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi sarana dan prasarana gedung sekolah	K.5.a	- Pembangunan / Rehabilitasi / Revitalisasi Sarana & Prasarana Gedung 1 Pembangunan 'geung Dines P dan K Kabupaten Lamongan 2 Rehabilitasi Aname SDLB	Kab Lamongan 1 Kecamatan	1 unit 1 Lbg	Rp 7,000,000,000.00 Rp 50,000,000.00	Lanjutan Baru	P dan K P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGAIKRAFPROTEK	LOKASI	VOLUME	PEROGAM BAYA	KETERANGAN (Bil.)	URAIAN INSTANSI
5		M Dandi Ulum		Kec. Dohi	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
6		M Ruzaidi Ulum		Dk. Calangan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
7		M Wendi Heryan Dewandani		Dk. Weduri	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
8		M Dasa Salehah		Kec. Karangrengan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
9		M Alifan		Dk. Subarjo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
10		M Rochaidi Usah		Dk. Sambonggi	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
11		M Ibrahim		Kec. Glagah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
12		M Riyad Ulum		Dk. Solo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
13		M Tamsil Albar		Dk. Rajungasut	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
14		M Ibrahim		Dk. Margonyar	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
15		M Riyad Ulum		Kec. Kalibagoh	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
16		MUA		Dk. Pecanga	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
17		M Rochaidi Ulum		Dk. Supharna	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
18		M Ibrahim		Kec. Subandadi	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
19		M Muhammadlyah		Dk. Plumpang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
20		M Ibrahim		Dk. Godangan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
21		M Muhammadlyah		Kec. Pucuk	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
22		M Muhammadlyah		Dk. Perangamboro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
23		M Rizal Ulum		Dk. Tulangwar	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
24		M Tasyahid Saraf		Kec. Selaran	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
25		M NU		Dk. Mendal	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
26		M Nurul Khoiriyah		Dk. Lantik	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
27		M Halayati Usah		Kec. Karangrengan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
28		MUA		Kec. Maduren	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
29		M Toriqul Hidayah		Dk. Pengharjo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
30		M Toriqul Hidayah 2 Topani		Dk. Suman	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
31		M Musthofi Usah		Kec. Laren	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
32		MUA 05		Dk. Laren	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
33		M Tasyahid Toibah		Dk. Durutan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
34		MUA 05		Lk. Tegani	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
35		MUA 04		Kec. Padinan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
36		MUA 02		Dk. Wenu Lor	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
37		MUA		Dk. Hany	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
38		MUA		Kec. Sokolono	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
39		M Ibrahim		Dk. Padangan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Dk. Dadijan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Dk. Subuko	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Kec. Blandong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Dk. Hiyong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Dk. Cumpeng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K
				Dk. Gumbayng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI	
				Kec. Mantup					
			40 MI Darussalam	Ds. Tuqa	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			41 MI Terbiyahul Atrfal Mojoeri	Ds. Mojoeri	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			42 MI Terbiyahul Ulum Sutoseari	Ds. Sutoseari	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Sumbang					
			43 MI Metabul Huda	Ds. Saren	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			44 MI Darul Ulum	Ds. Sumbawudi	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			45 MI AlAzis	Ds. Tanggung	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Nglimbeng					
			46 MI Darussalam	Ds. Gebang Ngangkrik	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			47 MI Al Hidayah	Ds. Muntung	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Suplo					
			48 MI Islamiyah	Ds. Sugio	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			49 MI Nurul Huda	Ds. Pangkatrejo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			50 MI Nurul Huda	Ds. Sampit	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Modo					
			51 MI Ihsadul Tolbin	Ds. Semampir Sidomulyo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			52 MI Islamiyah	Ds. Kedungpongon	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			53 MI Islamiyah	Ds. Ngusuk	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Babat					
			54 MI Al Tadabiyah	Ds. Babat	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			55 MI Darul Ulum	Ds. Dafinawong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			56 MI Al	Ds. Kebatrdono	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Kedungpring					
			57 MI Darul Ulum	Ds. Kradenarejo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			58 MI Terbiyahul Aulad	Ds. Gunungrejo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			59 MI Islamiyah	Ds. Dredah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
				Kec. Sarirejo					
			60 MI Al Irsadiyah	Ds. Sarirejo	2 x 7 x 8 m2	Rp 25,000,000.00	Baru	P dan K	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Revitalisasi						
			- Sarana&Prasarana Gedung SD						
			1 SD Tlogorejo	Lamongan	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			2 SD Sandangrejo I	Lamongan	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			3 SD Pangkatrejo II	Lamongan	3 Lokal	75,000,000.00	Baru	P dan K	
			4 SD Sidharjo II	Lamongan	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			5 SD Dakelkaban II	Dekat	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			6 SD Rajatengah	Dekat	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			7 SD Rajasari I	Dekat	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			8 SD Bakon I	Turi	3 Lokal	75,000,000.00	Baru	P dan K	
			9 SD Karangwedoro	Turi	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			10 SD Kemilij Lor	Turi	6 Lokal	125,000,000.00	Baru	P dan K	
			11 SD Wonolomo I	Tikung	4 Lokal	100,000,000.00	Baru	P dan K	
			12 SD Jatirejo	Tikung	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			13 SD Takaranditing	Tikung	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			14 SD Pultr I	Kembangbahu	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			15 SD Kedungad	Kembangbahu	3 Lokal	75,000,000.00	Baru	P dan K	
			16 SD Sidomudi	Kembangbahu	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			17 SD Kolemas I	Kembangbahu	7 Lokal	75,000,000.00	Baru	P dan K	
			18 SD Madukaji I	Sukodadi	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	
			19 SD Surabaya I	Sukodadi	7 Lokal	175,000,000.00	Baru	P dan K	

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BAWA	KETERANGAN (BEL)	USULAN INSTANSI
20			SD Suciadi I	Sukohadi	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
21			SD Tik	Sekaran	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
22			SD Bagel	Sekaran	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
23			SD Buar	Sekaran	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
24			SD Martani I	Karangnung	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
25			SD Mandakantiq	Karangnung	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
26			SD Sungsabak	Karangnung	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
27			SD Ngembang	Pesuk	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
28			SD Gempelading	Puzak	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
29			SD Tanggapan	Puzak	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
30			SD Sunarpanat I	Babat	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
31			SD Makongung	Babat	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
32			SD Tinturagati II	Babat	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
33			SD Melandirajo II	Kedungring	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
34			SD Muli	Kedungring	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
35			SD Kradanarajo	Kedungring	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
36			SD Bayanjo	Kedungring	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
37			SD Sutanab	Kedungring	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
38			SD Kallangah	Kedungring	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
39			SD Gondang br	Sugo	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
40			SD Kedungbanjar I	Sugo	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
41			SD Jati papati I	Mobb	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
42			SD Sidomajo I	Mobb	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
43			SD Ngantak	Mobb	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
44			SD Landaarjo II	Ngembang	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
45			SD Siharmanan II	Ngembang	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
46			SD Jole I	Ngembang	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
47			SD Gegerangan	Ngembang	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
48			SD Sargo II	Blak	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
49			SD Talmajo II	Blak	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
50			SD Piripan	Blak	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
51			SD Wacario II	Sambang	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
52			SD Kelewang I	Sambang	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
53			SD Walmawangan II	Sambang	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
54			SD Mestap II	Mestap	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
55			SD Pabuharajo	Mestap	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
56			SD Turongajati III	Mantap	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
57			SD Wedoro	Sukorena	6 Lotul	150,000,000.00	Baru	P dan K
58			SD Mngal	Sukorena	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
59			SD Bangah	Sukorena	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
60			SD Wadungping	Karangbanjar	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
61			SD Gampah	Karangbanjar	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
62			SD Bayanjo II	Karangbanjar	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
63			SD Kulan I	Kalibeng	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
64			SD Kallangah	Kalibeng	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K
65			SD Puanpale	Kalibeng	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
66			SD Pual	Glagah	4 Lotul	100,000,000.00	Baru	P dan K
67			SD Dudak br	Glagah	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
68			SD Manganyar	Chugh	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
69			SD Subanpual	Pusiran	9 Lotul	225,000,000.00	Baru	P dan K
70			SD Kroyi III	Pusiran	3 Lotul	75,000,000.00	Baru	P dan K
71			SD Bayanwet	Pusiran	7 Lotul	175,000,000.00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BAYAR	METERANJAM (BL)	URSAJAN INSTANSI
72			SD Beringin I	Banding	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
73			SD Sibondu	Banding	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
74			SD Bending II	Banding	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
75			SD Sedyatemes III	Banding	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
76			SD Telpen	Larun	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
77			SD Gading	Larun	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
78			SD Galuh	Larun	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
79			SD Temaripah	Larun	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
80			SD Payaman	Soburo	7 Lot	175,000,000.00	Biru	P dan K
81			SD Teluru	Soburo	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
82			SD Pringgoboyo	Soburo	4 Lot	100,000,000.00	Biru	P dan K
83			SD Gunungak	Meduren	4 Lot	100,000,000.00	Biru	P dan K
84			SD Pangren	Meduren	4 Lot	100,000,000.00	Biru	P dan K
85			SD Sambutan	Serrip	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
86			SD Tembakrengan II	Serrip	3 Lot	75,000,000.00	Biru	P dan K
			Bantuan Keuangan Perguruan Maja Kund Mard SD					
1			Sukarip I	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
2			Pengarang II	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
3			Subdajoyo IV	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
4			Masa IV	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
5			Kramat II	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
6			Masa III	Larangan	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
7			Sugriana	Dekat	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
8			Diergo II	Dekat	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
9			Sidomulyo II	Dekat	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
10			Dabulon I	Dekat	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
11			Bedurene	Turi	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
12			Geger	In	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
13			Wingurip	Turi	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
14			Paklungul	Turi	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
15			Tembakrengan II	Thung	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
16			Pengumbulreng I	Thung	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
17			Guntung	Thung	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
18			Bekarang II	Thung	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
19			Doyomulyo	Kembangharu	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
20			Graung	Kembangharu	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
21			Piang IV	Kembangharu	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
22			Kembangharu I	Kembangharu	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
23			Tembakrengan I	Kembangharu	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
24			Gempulambho	Serrip	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
25			Sumburp II	Serrip	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
26			Sriban	Serrip	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
27			Medulji I	Suloh	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
28			Medulji II	Suloh	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
29			Suloh	Subod	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
30			Sugrip	Subod	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
31			Kandehang	Karangreng	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
32			Sumburud	Karangreng	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K
33			Kewicahy	Karangreng	60 Sal	15,000,000.00	Biru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BAYA	KETERANGAN (B/L)	USULAN INSTANSI
			34 Banjarbaru	Karanggenang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			35 Turi	Medun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			36 Gunungtek	Medun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			37 Janglungkumamo	Medun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			38 Pringgoboyo	Medun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			39 Bukitragop	Sekaran	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			40 Moro	Sekaran	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			41 Jugo	Sekaran	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			42 Winer	Puzuk	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			43 Gempobeding	Puzuk	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			44 Karangtenggil	Puzuk	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			45 Bogoharjo	Puzuk	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			48 Wanungring	Kedungpring	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			47 Jendrojo	Kedungpring	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			48 Sidomlangen	Kedungpring	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			49 Dredahblumbang II	Kedungpring	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			50 Jabal Kidul I	Sugio	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			51 Bakahjo I	Sugio	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			52 Labakadi I	Sugio	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			53 Jalesayek II	Mado	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			54 Kedungrejo II	Mado	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			55 Yungyung II	Mado	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			56 Kedungrejo II	Mado	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			57 Kedungrejo II	Mado	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			58 Mondogo	Nginbang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			59 Pundakarto	Nginbang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			60 Ngemalambang	Nginbang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			61 Paten II	Sambang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			62 Barunjo II	Sambang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			63 Gempokmaris	Sambang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			64 Ardrajo II	Sambang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			65 Wawainangun II	Sambang	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			66 Mantup I	Mantup	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			67 Sukobandu I, II	Mantup	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			68 Sumberdadi II	Mantup	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			69 Tunggunjgir I	Mantup	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			70 Wedro	Sukorame	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			71 Bangle	Sukorame	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			72 Sewar	Sukorame	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			73 Pendoakumpul I	Sukorame	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			74 Gaserajo	Karangbinangun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			75 Sambopnggir I	Karangbinangun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			76 Patangen I	Karangbinangun	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			77 Pendoakono	Glagah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			78 Manganti I	Glagah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			79 Margomayer	Glagah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			80 Dulah Unggal	Glagah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			81 Kulan II	Kaltengah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			82 Muzgi	Kaltengah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			83 Sugihwas	Kaltengah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			84 Jalesakul I	Kaltengah	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			85 Paciran II	Paciran	60 Stal	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (B/L)	USULAN BISTANSI
			86 Kecamatan	Paciran	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			87 Tigasodong	Paciran	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			88 Brondong IV	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			89 Sedayulawas II	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			90 Sidomukti	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			91 Sandangharjo II	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			92 Celap	Laren	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			93 Buktibangsri	Laren	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			94 Candi	Laren	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			95 Tanggulun	Sobluro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			96 Tebluru I	Sobluro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			97 Telanharjo II	Sobluro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			98 Sumberbenjar	Blatak	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			99 Telanharjo II	Blatak	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			100 Blatak I	Blatak	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			101 Kedunglampul II	Blatak	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			Bantuan Rehabilitasi Gedung Taman Kanak-kanak					
			1 Bahrul Ulum	Karangbinangun	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			2 Musfizat NU	Grogoh	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			3 Musfizat NU	Brondong	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			4 Bunga Harapan V	Dekat	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			5 A B A	Sukodadi	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			6 A B A	Sobluro	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			7 Dharma Putra I	Kedungpring	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			8 Petangi	Bebat	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			9 Panca Karya Bakti	Kaliwangah	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			10 Dharma Wanita	Tiang	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			11 Merdi Utomo	Blatak	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			12 Nusa Indah	Sekaran	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			13 PGRI	Ngaribeng	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			14 PGRI	Sambang	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			15 Putra Mulya	Lamongan	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			16 Tunas Harapan II	Lamongan	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			17 Pembangunan	Turi	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			18 Perhai	Kembangbahu	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			19 Babus Selam	Seringjic	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			20 Dharma Wanita	Puzuk	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			21 Siman Harapan	Karanggenang	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			22 Dharma Wanita	Meduran	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			23 Wijaya Kusuma	Sugio	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			24 Bunga Bangsa	Mbo	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			25 Nusa Indah	Merup	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			26 Hidup Sejahtera	Sukarame	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			27 Dharma Wanita	Paciran	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			28 Dharma Wanita	Laren	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			29 Mekar Sari II	Bebat	1 Lokal	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (BIL.)	USULAN INSTANSI
			Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan : - Pengadaan Meubelair 1 SMPN 2 Sakaran 2 SMPN 4 Lamongan 3 SMPN 1 Tun 4 SMPN 1 Gajah 5 SMPN 1 Thung 6 SMPN 1 Kambangahu 6 SMPN 1 Mantap 7 SMPN 1 Subodad 8 SMAH 1 Kambangahu 9 SMAH 1 Karangbangan 10 SMAH 1 Kidungring 11 SMK Kaci Brondong 12 SMK Kaci Serep 13 SMAH 1 Buluk 14 SMPN 1 Kallengah	Kac Sakaran Kac Lamongan Kac Tun Kac Gajah Kac Thung Kac Kambangahu Kac Mantap Kac Subodad Kac Kambangahu Kac Karangbangan Kac Kidungring Kac Brondong Kac Serep Kac Buluk Kac Kallengah	2 Ruang 2 Ruang	Rp 25,000,000.00 Rp 25,000,000.00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K
Jumlah Total						Rp 38,000,155,500.00		

BIDANG SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang sosial merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Pembangunan di Bidang Sosial memiliki arti yang sangat strategis mengingat bidang ini sangat berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan manusia. Agar pelaksanaannya tepat sasaran maka penanganan dibidang ini dilakukan dengan lintas sektor dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan bidang sosial adalah merupakan hasil upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari segenap aparat pemerintah bersama masyarakat. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya lebih terfokus dalam memfasilitasi, pengembangan kehidupan kemasyarakatan khususnya dalam melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pemberian bantuan, rehabilitasi sosial, penanggulangan bencana alam dan pengembangan berbagai kegiatan pelayanan sosial. Disamping juga peningkatan peranan wanita, PKK, anak dan remaja terus ditumbuh kembangkan dalam ikut berpartisipasi dan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial.

B. KONDISI UMUM

Pembangunan di bidang sosial telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan hal tersebut nampak dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan tumbuh kembangnya usaha kecil, mikro dan sektor informal yang mempunyai daya tahan terhadap guncangan krisis.

Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam bidang ini lebih difokuskan pada pembangunan keluarga dalam posisinya sebagai bagian terkecil kelompok sosial pertama dan utama dalam membentuk norma nilai dan watak kepribadian bangsa, dan memiliki potensi posisi sentra dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang handal.

Hasil pendataan terhadap pentahapan KK di Kabupatewn Lamongan tahun 2003 menunjukkan jumlah Keluarga miskin sebanyak 286.643 jiwa terdiri dari 73.708 KK atau sebanyak 22,96 % , dari 1.248.817 jiwa Penduduk Kabupaten Lamongan atau 293.944 KK.

Program-program yang selama ini telah dilaksanakan dan terus dikembangkan diantaranya 1. Program Pemberdayaan Keluarga yang dalam tahun 2004 telah menunjukkan adanya peningkatan usaha sebanyak 2.306 kelompok dan

tumbuh kembangnya kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 831 kelompok, Remaja 331 kelompok dan Lansia 258 kelompok. 2. Program Keluarga Berencana dalam tahun 2004 mencapai sebanyak 111.585 peserta KB Aktif. 3. Program kesehatan reproduksi remaja (KRR) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang kualitas KRR, dan adanya fasilitasi pusat konseling remaja. 4. Program Penguatan kelembagaan dengan kegiatan pengembangan kegiatan advokasi dan KIE, peningkatan peran serta institusi dan peran serta masyarakat. 5. Program Pendataan keluarga meliputi data demografi dan KB, serta data tahapan KS yang dapat mendukung berbagai program lanjutan. 6. Program Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Penanganan PMKS/PSKS meliputi rehabilitasi dan Penyantunan Penyandang Cacat, Pembinaan dan Pengembangan Orsos dan Karang Taruna, Penyantunan Lanjut Usia dan Fakir Miskin, Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (TMP), Rehabilitasi Tuna Susila, Pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Anak Terlantar.

Sedangkan tantangan utama yang masih harus dihadapi dan ditanggulangi adalah kemiskinan dan keterbelakangan sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dalam mengejar ketinggalan dengan masyarakat yang sudah lebih maju, agar lebih mampu memberikan sumbangan dan berperan serta dalam pembangunan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- b. Mewujudkan Kemitraan dalam upaya Peningkatan, Kemandirian, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Mewujudkan peningkatan Kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi serta Kesejahteraan Sosial.
- d. Mewujudkan peningkatan upaya-upaya promosi perlindungan dan pemenuhan hak-hak reproduksi serta pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Mewujudkan Sumber Daya yang berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

2. Sasaran

- a. Seluruh Anggota Keluarga
- b. Organisasi Sosial dan kemasyarakatan

- c. Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
- d. Fakir miskin
- e. Penyandang Cacat
- f. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
- g. Tuna wisma dan lanjut usia
- h. Anak terlantar dan anak bermasalah
- i. Bencana Alam.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Sosial memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan partisipasi sosial dan kesejahteraan masyarakat** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, b) Memberi bantuan pada organisasi dan mengoptimalkan fungsi yayasan/panti asuhan/pantiwredha/ lansia/fakir miskin/ orang terlantar, c) Rehabilitasi sosial rumah kumuh, d) Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan sosial keagamaan, e) Rehabilitasi dan penyantunan penyandang cacat, eks penderita kusta, f) Penguatan kelembagaan Pondok Pesantren dan peningkatan peran serta Pondok Pesantren dalam pelaksanaan program-program pembangunan. **2. Peningkatan penanggulangan bencana alam** dengan strategi dan prioritas a) Merehabilitasi korban bencana, b) Melaksanakan penanggulangan bencana, c) Bantuan Korban Bencana Alam, d) Pelaksanaan proyek padat karya untuk mengantisipasi tingkat pengangguran sementara pada lokasi bencana dan kekeringan. **3. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial, dan peningkatan peranan wanita** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan ketrampilan pada penyandang masalah sosial sesuai dengan bakat dan minatnya, b) Peningkatan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP), c) Mengikut sertakan wanita dalam pembangunan daerah, d) Meningkatkan peran Tim Penggerak PKK, e) Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, f) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan peranan wanita, g) Peningkatan perlindungan peranan wanita. **4. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan peserta KB baru, b) Terbinanya peserta KB Aktif mandiri dan Pasangan Usia Subur (PUS), c) Memantapkan manajemen kelembagaan Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Bahagia (KB), d) Membuka pusat pelayanan KB pria di Tingkat Kecamatan, e) Adanya jaminan perlindungan para peserta KB Aktif yang mengalami efek samping dan komplikasi, f) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi

keluarga, g) Pembinaan ketahanan lingkungan keluarga, h) Peningkatan peran jaring kelembagaan, i) Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bagi masyarakat tentang KB, j) Peningkatan SDM KB Kessos, petugas medis dan medis teknis, k) Adanya kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Program KB, l) Melakukan upaya-upaya deteksi dini dan respon cepat untuk kelangsungan program dan kelembagaan, m) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB. **5. Promosi konvensi hak-hak anak** dengan strategi dan prioritas a) Ketersediaan Lembaga Bantuan Hukum bagi ibu dan anak korban tindak kekerasan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Sosial sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : SOSIAL

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERRIBUAN BIAYA	METERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI		
1	Membantu bantuan pada organisasi dan mengoptimalkan fungsi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan	L.1.b	1	Bantuan kepada anak esuk	Kabupaten Lamongan	504 anak	Rp 74.000.000,00	Baru	KB dan Kesmas	
			2	Bantuan transportasi pemulungan orang tua/keluarga miskin, bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, bantuan pelatihan, bantuan rehabilitasi, bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan rehabilitasi sosial	Kabupaten Lamongan	115 anak	Rp 6.000.000,00	Baru		KB dan Kesmas
			3	Pembelian bantuan modal pembuatan kandang, lemari lemari dan jaman hidup kepada masyarakat (Lansia)	Kab. Lamongan	250 orang/25 kandang 6 x 250 orang	Rp 333.000.000,00	Baru		KB dan Kesmas
			4	Pelatihan keterampilan bagi karang taruna dan pembinaan bantuan usaha ekonomi produktif kepada organisasi/pemuda sosial	Kab. Lamongan	18 KT (36 orang) 17 Ormas	Rp 100.000.000,00	Baru		KB dan Kesmas
			5	Pembinaan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) dan Forum Komunikasi Pemuda Sosial Masyarakat (FKPSM)	Kabupaten Lamongan	2 kali	Rp 20.000.000,00	Baru		KB dan Kesmas
			6	Pembinaan bantuan usaha ekonomi produktif bagi lansia	Kec. Buluk, Karanggeneng	50 orang	Rp 50.000.000,00	Baru		KB dan Kesmas
			7	Bantuan keuangan kepada organisasi profesi	Kab. Lamongan	-	Rp 400.000.000,00	Lanjutan		Bag. Kesmas
			8	Bantuan keuangan kepada organisasi Kemasy.	Kab. Lamongan	-	Rp 400.000.000,00	Lanjutan		Bag. Kesmas
			9	Bantuan kegiatan YK	Kab. Lamongan	-	Rp 25.000.000,00	Lanjutan		Bag. Kesmas
2	Rehabilitasi sosial daerah kumuh	L.1.c	1	Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh dan perbaikan sarana sosial serta perbaikan rumah tak layak huni	Kab. Lamongan	25 KK	Rp 187.500.000,00	Baru	KB dan Kesmas	
			1	Pelatihan keterampilan penyandang cacat	Kec. Lamongan, Mentap, Subasadi	50 Orang	Rp 64.000.000,00	Baru	KB dan Kesmas	
3	Rehabilitasi dan penyertaan penyandang cacat, eks pendenta luara	L.1.e	1	Pelatihan keterampilan penyandang cacat	Kec. Lamongan, Mentap, Subasadi	50 Orang	Rp 64.000.000,00	Baru	KB dan Kesmas	
			1	Peningkatan pembinaan	Kabupaten Lamongan	-	Rp 100.000.000,00	Lanjutan	Kesbanginas	
4	Melaksanakan program-program pembinaan	L.2.b	Bantuan kepada sosial	Kab. Lamongan	-	Rp 375.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kesmas		
5	Bantuan korban bencana alam	L.2.c	Bantuan kepada sosial	Kab. Lamongan	-	Rp 375.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kesmas		
6	Mengajukan keterampilan pada penyandang masalah sosial sesuai bakat dan minat	L.3.a	Pembinaan/program ke parit rehab sosial bag. WTS yang terpengaruh masa, gangguan dan pengemis, gangguan eks psikotik	Kabupaten Lamongan	200 orang	Rp 40.000.000,00	Baru	KB dan Kesmas		

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
7	Mengikutsertakan wanita dalam pembangunan daerah	L.3.c	2. Pelebaran keterampilan bagi anak bermasalah, anak berkebutuhan khusus dan anak jomang. 3. Pendukung kerjasama dengan UNICEF	Kab. Lamongan Kabupaten, Kec. Sukodadi dan BULUK	LS 3 paket	Rp 100.000.000,00 Rp 300.000.000,00	Baru Lanjutan	KB dan Kessos Bappeda
8	Meningkatkan peran Tim Penggerak PKK	L.3.d	1. Kegiatan pengetahuan keterampilan dan keterampilan produk UPPKS serta bantuan modal untuk pengembangan kelompok UPPKS 1. Rencanat kelompok beres-beres (BKB, BKR, BK) dan pemberian bibit serta pemeliharaan kel. Harmonis	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp 75.000.000,00 Rp 20.000.000,00	Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos
9	Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera	L.3.e	2. Kegiatan Pelatihan Kues TP-PKK Di/Kel 1. Pelatihan pengetahuan siap dan perilaku keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas	Kab. Lamongan Kabupaten Lamongan	474 Desa/Kel. 1 kegiatan	Rp 75.000.000,00 Rp 30.000.000,00	Lanjutan Baru	Bepemas KB dan Kessos
10	Terdapatnya dukungan dana untuk menunjang kegiatan penanaman wanita	L.3.f	2. Pembinaan Program Penunjang Penanaman wanita menuju Keluarga	Des. Sumbenuh & Des. Karangwungu	2 desa binaan (2 x 100 KK)	Rp 70.000.000,00	Lanjutan	Bepemas
11	Terdapatnya dukungan dana untuk menunjang kegiatan penanaman wanita	L.4.a	1. Pelayanan peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif, mandiri dan PUS	Kab. Lamongan Kabupaten Lamongan	1 tahun	Rp 150.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kesmas
12	Meningkatkan manajemen keterampilan KB dan KS serta kesehatan sosial	L.4.c	1. Organisasi pembelajaran (learning organization) dan konseling bagi petugas in-bangsan (PLS/PKB) dan (PR/BO/Sub PPK/BO)	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	4 kali / 27 Kec.	Rp 244.208.000,00	Baru	KB dan Kessos
13	Terdapatnya pelatihan lingkungan keluarga	L.4.g	2. Pelatihan, pembelajaran dan jejaring program KB dan Kessos 3. Penyediaan informasi program KB dan Kessos melalui berbagai media	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	12 kali 20 kali	Rp 36.193.550,00 Rp 20.010.000,00	Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos
14	Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bagi masyarakat tentang kesehatan reproduksi	L.4.j	1. Peningkatan pelayanan akseptor KB bagi keluarga miskin, terdapatnya data keluarga berencana harmonis keluarga, PKKS dan PSKS sebagai bahan penentuan kebijakan program 1. Pembentukan pusat informasi dan konsultasi KBR, sosialisasi program dan orientasi penyuluhan melalui akses dan nuklun pelayanan kesehatan reproduksi dan inovasi program KBR	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	4 kali / 27 Kec./474 Desa 4 kegiatan	Rp 313.461.000,00 Rp 25.000.000,00	Baru Baru	KB dan Kessos KB dan Kessos

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	REGULASI/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (BIL)	USULAN INSTANSI
15	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB/ahli kontrasepsi	L 4 m	1. Peningkatan alat kontrasepsi, obat-obatan dan Alat-alat medis	Kecamatan	LS	Rp 1,250,000,000.00	Baru	KB dan Kasacos
Jumlah Total								
						Rp 4,983,370,550.00		

BIDANG PENATAAN RUANG

A. PENDAHULUAN

Ruang dilihat sebagai wadah merupakan tempat keseluruhan interaksi sistem sosial (meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumberdaya alam dan Sumberdaya buatan) berlangsung. Interaksi yang terjadi tidak selalu berjalan seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang kumulatif.

Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah maupun memelihara pembangunan, keseimbangan dan pemerataan serta penyebaran pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah maupun guna memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya secara optimal, maka ruang perlu ditata dan diatur pemanfaatannya secara terpadu dan sinergis sesuai kondisi dan potensinya.

Disamping itu, kegiatan penataan ruang juga dilakukan guna dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta keserasian dan keselarasan antara daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan dengan struktur lingkungan (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman, jasa, perdagangan dan sebagainya). Upaya Pemerintah Kab. Lamongan dalam mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, kesinambungan dan pemerataan pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya buatan, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Ibukota Kecamatan, dan didetailkan lagi dalam Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK), dimana masing-masing konsep Rencana Tata Ruang tersebut setiap 5 tahun sekali dievaluasi dan setiap 10 tahun sekali ditinjau kembali.

B. KONDISI UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyerasian tata guna tanah, tata guna air dan sumberdaya alam serta daya dukung lingkungan dalam pengaturan tata ruang sebagai implementasi dari undang – undang nomor 24 tahun 1992, maka Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2004 telah menyusun sebanyak 25 RUTRK/RDTRK, dari 27 ibu kota kecamatan yang ada, serta telah menghasilkan

penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupater. Lamongan.

Disamping itu dengan adanya perkembangan kota Lamongan telah tersusun dokumen penataan wajah kota Lamongan yang merupakan arahan pemanfaatan lahan disepanjang jalan arteri primer di kota Lamongan dan Babat. Selain itu juga telah disusun RTRK Lamongan dan RTRJ Arteri Primer Paciran serta RTBL Kecamatan Deket.

Dan untuk tahun 2005 akan dilaksanakan penyusunan 2 RUTRK/RDTRK pada IKK Maduran dan Sarirejo serta penyusunan Rencana Tata Ruang Jalan Arteri Brondong.

Dengan demikian hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan telah memiliki RUTRK/RDTRK kecuali Kecamatan Maduran dan Sarirejo, akan tetapi hampir 50 % RUTRK/RDTRK Ibu Kota Kecamatan tersebut sudah waktunya dievaluasi dan direvisi termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan sebagai dampak dari perkembangan pembangunan dan investasi di Kabupaten Lamongan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terwujudnya ruang kota yang tertata, teratur dan terarah sesuai fungsi perwilayahan.

2. Sasaran :

- a. Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan potensi daerah-daerah yang sedang berkembang terutama bagi daerah yang potensi di bidang industri.
- b. Peningkatan penyebaran informasi tentang tata ruang kota kepada masyarakat dan dunia usaha serta pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pengawasan dan penertiban.
- c. Terciptanya keseimbangan dan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahannya.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Penataan Ruang memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian tata ruang** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai

skala prioritas/ arahan tata ruang, b) Evaluasi dan review terhadap dokumen penataan ruang yang telah berakhir masa berlakunya dan yang kurang sesuai, c) Evaluasi terhadap penetapan Ibukota Kecamatan (IKK), d) Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang terkait perijinan. **2. Peningkatan perencanaan penataan ruang wilayah/kawasan** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan Tata Ruang Kawasan Pantai, Pelabuhan, Industri dan perdagangan, b) Penyusunan Rencana Teknis Jalan Arteri Primer/ Ring Road lanjutan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Penataan Ruang sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PENATAAN RUANG

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
1	Penyusunan Rencana dan Pengendalian Tata Ruang	M.1.a	1 Penyusunan RTRK Kota Babel 2 Penyusunan master plan dan DED pemb. fasilitas umum di KK Sukorene 3 Penyusunan rencana umum tata ruang kota dengan melibatkan rencana detail tata ruang kota IKK Karanggeneng, Tilung, Ngimbang, Mantap, Lamongan 4 Penyusunan Master Plan dan DED Sport Center 5 Penyusunan Rencana Umum Kelembutan Daerah (RUKD) M.2.a 1 Evaluasi dan revisi RTRW Kab. Lamongan M.2.b 1 Penyusunan RTRU Kolaborasi Debat. Karanggeneng	Kec. Babel Kec. Sukorene 5 Kecamatan Kec. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kec. Debat dan Kr. Karanggeneng	105,96 Ha 1 Petak 5 Petak 1 Petak 1 petak . 480 Ha	Rp 125.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 156.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	Cipta Karya Beppda Beppda Cipta Karya Beppda Beppda Cipta Karya
Jumlah Total						Rp 1.191.000.000,00		

BIDANG PERMUKIMAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Bidang Permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi. Ada banyak aspek yang terkait dengan kegiatan Bidang Permukiman diantaranya adalah Aspek Kesehatan, Aspek Lingkungan, Aspek Ruang dan Penataaannya, Aspek Kebersihan dan Keindahan.

Pembangunan Bidang Permukiman sebagaimana arahan Dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan (RENSTRA) Tahun 2002 – 2006 adalah termasuk bagian dari Program Peningkatan Drajat Kesehatan dan Sosial.

Guna menunjang pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah khususnya bagi pegawai negeri golongan I, II, dan III pemerintah melalui Perum Perumnas melaksanakan pembangunan perumahan dengan berbagai tipe yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sedang untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan diupayakan melalui PDAM meskipun sampai saat ini tingkat pelayanannya masih perlu ditingkatkan

B. KONDISI UMUM

Meskipun secara umum perekonomian mulai membaik, namun pembangunan di bidang permukiman masih banyak menghadapi kendala. Sedangkan keberlanjutan pembangunan suatu kawasan perkotaan maupun pedesaan salah satunya ditentukan oleh kualitas permukiman yang meliputi komponen perumahan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, persampahan dan sanitasi.

Pada umumnya keadaan permukiman di Kabupaten Lamongan terutama di wilayah pedesaan masih belum tertata secara optimal. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat menyadari hal tersebut, sehingga setiap tahunnya selalu dianggarkan untuk kegiatan perbaikan permukiman, namun karena luasnya wilayah yang harus ditangani dan kompleksnya permasalahan baru sebagian kecil yang dapat tertangani. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan oleh Perum Perumnas masih sangat terbatas.

Di wilayah pantai umumnya keadaan rumah sudah permanen, namun antar bangunan hampir tidak ada ruang, jalan dan saluran menyatu, kesulitan dalam mendapatkan air bersih, sampah berserakan di pantai dan tidak setiap rumah memiliki MCK.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh melalui penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, perkotaan dan perdesaan yang layak dan memadai.
- b. Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan, pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Permukiman memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman sehat di kota dan desa dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman .Perdesaan dan Perkotaan, b) Penataan dan peningkatan fasilitas kawasan permukiman kumuh, c) Peningkatan dan penyediaan air bersih, d) Perbaikan/pemugaran perumahan dan permukiman. **2. Peningkatan manajemen sarana dan prasarana perkotaan dengan strategi dan prioritas** a) Peningkatan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota, b) Penanggulangan banjir kota, c) Pembangunan dan peningkatan sarana perkotaan/IKK, d) Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum di perkotaan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Permukiman sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERUMKIMAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (S/L)	USULAN INSTANSI
1	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	N 1 a	1 Paspaspelan Jalan Desa Sidomukti 2 Peningkatan jalan lingkungan permukiman Kelurahan Sidokumpul 3 Pembangunan jalan Inggris Tembus Tiggo Mes Sidokumpul 4 Pemb. Trotoar dan Saluran ar 5 Pembangunan Saluran Ariribengangan Desa Sukonep 6 Paspaspelan Jalan Lingkungan Tembolonggading - Jelemp 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tembolonggading 8 Pemb. Jalan Aspal Desa Sukodadi 9 Paspaspelan Jalan Lingkungan Kal. Baranin 10 Paspaspelan Jalan Lingkungan IKK Ngimbang 11 Pembangunan Trotoar jalan bukit Kecamatan 12 Paspaspelan Jalan Lingkungan Desa Buuk 13 Paspaspelan Jalan Lingkungan Dk. Andrep 14 Peningkatan kualitas lingkungan permukiman IKK Mantup - Jalan Aspal Pavetresi 15 Paving Stone Jalan Lingkungan Desa Sukonepe 16 Pembangunan got saluran ar Kedungwangsan Dusun Sental, Sobekalar	Kec. Lamongan Kec. Lamongan Kec. Lamongan Kec. Dekati Kec. Tun Kec. Semejo Kec. Semejo Kec. Sukodadi Kec. Babal Kec. Ngimbang Kec. Buuk Kec. Buuk Kec. Sembang Kec. Mantup Kec. Sukonepe Kec. Paciran	1800 x 3 m 420 x 2,40 m 250 x 2 m 600 m x 1,5 m 500 m ² 1500 m x 3 m 800 x 3 m 1000 x 2,5 m 1000 m x 3 m 100 x 3 m 400 x 1,5 m 700 x 3 m 1000 x 3 m 1200 x 3 m 1100 m x 3 m 500 x 0,75 m 750 x 0,5 m	Rp 270.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 258.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 267.500.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Rp 164.000.000,00 Rp 172.000.000,00 Rp 132.000.000,00 Rp 175.000.000,00 Rp 210.000.000,00 Rp 192.500.000,00 Rp 75.000.000,00 Rp 100.000.000,00	Baru Baru Rehab Baru Lanjutan Baru Baru Lanjutan Baru Baru Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru	Opda Karya Opda Karya

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	NETERANGAN (BL)	DEBUAN INSTANSI
17			Perbaikan jalan espal Jalin masuk wadu Komplek	Kec. Paciran	1.500 x 3 m	Rp 75.000.000,00	Baru	Opda Karya
18			Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Karangbanangun	Kec. Karangbanangun	1000 x 3m	Rp 175.000.000,00	Baru	Opda Karya
19			Pembangunan kualitas lingkungan Permukiman IKK Gagah	Kec. Gagah	600 m x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opda Karya
20			Pengaspalan Jalan Lingkungan Dis Diba	Kec. Kethergah	1000 x 3 m	Rp 175.000.000,00	Baru	Opda Karya
21			Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Curing	Kec. Kethergah	600 m x 3 m	Rp 150.000.000,00	Lanjutan	Opda Karya
22			Pembangunan kualitas lingkungan Permukiman IKK Nadrinan saluran & trotoar	Kec. Nadrinan	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opda Karya
23			Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman IKK Pucuk	Kec. Pucuk	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opda Karya
24			Pembangunan jalan espal Gang Hmalaya Kel Sobharip	Kec. Lamongan	650 x 4 m	Rp 100.000.000,00	Rehab	Opda Karya
25			Pembangunan jalan cor Gang Kawi Kel Sobharip	Kec. Lamongan	100 x 4 m	Rp 20.000.000,00	Baru	Opda Karya
			Gang Kelud Kel Sobharip		90 x 6 m	Rp 20.000.000,00	Baru	Opda Karya
			Gang PUN Kel Sobharip		150 x 6 m	Rp 40.000.000,00	Baru	Opda Karya
26			Pengaspalan jalan masuk Banyuwadain RW 1	Kec. Lamongan	400 x 3 m	Rp 25.000.000,00	Rehab	Opda Karya
27			Pembangunan jalan Gang RT 2 RW V Kel Tumenggungan	Kec. Lamongan	220 x 3 m	Rp 105.000.000,00	Baru	Opda Karya
			Musohi RT 3 RW VI Kel. Tumenggungan		52 x 3 m		Baru	Opda Karya
			Condawasih I Kel. Tumenggungan		250 x 2 m		Rehab	Opda Karya
28			Perbaikan Jalan Aspal Jalis Gang IV Kel. Jelis	Kec. Lamongan	600 x 5 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Opda Karya
29			Perbaikan Jalan Mezon Kudu Perumnas	Kec. Lamongan	500 x 4 m	Rp 150.000.000,00	Rehab	Opda Karya
30			Pembangunan jalan rabat beton Gang Telaga Kel Tigapanjer	Kec. Lamongan	100 x 3 m	Rp 150.000.000,00	Rehab	Opda Karya
			Gang Bugendi Kel Tigapanjer		100 x 3 m		Rehab	Opda Karya
			Gang Danda Kel Tigapanjer		220 x 3 m		Rehab	Opda Karya
			Gang Angrek Kel Tigapanjer		300 x 3 m		Lanjutan	Opda Karya
			Gang Flamboyan Kel Tigapanjer		1.500 x 3 m		Lanjutan	Opda Karya
			Kuar Kel Tigapanjer		300 x 2 m		Baru	Opda Karya
			Gg. Guntur - Andanwangi		300 x 3 m		Baru	Opda Karya

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	REHABITASI/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	STATUS/ANALISA	LEBIH DARI 10 TAHUN				
2	Peningkatan dan Peningkatan Fasilitas Kawasan Permukiman Kumuh	N.1.b	31	Pembangunan jalan rabat beton ke makam Delananten	Kec. Delat	3 x 225 m	Rp 45,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu			
			32	Pembangunan jalan lingkungan-jalan desa Bedahan Kalurahan Babat	Kec. Babat	1000 x 2.5 m 6 Pilek	Rp 100,000,000.00 Rp 300,000,000.00	Baru Baru	Optis Kayu Optis Kayu			
			33	Pembangunan jalan lingkungan IKK Sugo	Kec. Sugo	1000 x 3 m	Rp 150,000,000.00	Baru	Optis Kayu			
			34	Pengaspalan jalan -Lingk. Sedikumpul -Lingk. Goweh	Kec. Fieran	300 x 3 m 300 x 3 m	Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00	Baru Baru	Optis Kayu Optis Kayu			
			3	Peningkatan dan Penyediaan air Bersih	N.1.c	1	Program MUSA	Kab. Limongan	8 desas5 Kac	Rp 577,097,000.00	Baru	Bleppada
						1	Pembangunan Saluran Air Desa Mado	Kec. Limongan	700 m	Rp 200,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu
			3	Peningkatan dan Penyediaan air Bersih	N.1.c	2	Pembangunan sarana air bersih	Kec. Limongan	1 Unit	Rp 75,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						3	Pengadaan air bersih Kebungumpul	Kec. Sarirejo	1 Unit	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						4	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Delat Wetan (Din. Puruk)	Kec. Delat	2500 m	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						5	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Rajolan	Kec. Delat	3000 m	Rp 100,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						6	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wangunepo	Kec. Turi	3000 m	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						7	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Belungawan	Kec. Salsodad	2500 m	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu
						8	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tracal	Kec. Karangpaweng	3500 m	Rp 150,000,000.00	Baru	Optis Kayu
9	Pengadaan Air Bersih tanah (besi geolatrik)	Kab. Limongan (3 Kac.)				1 Unit	Rp 50,000,000.00	Baru	Optis Kayu			
10	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mgodad	Kec. Kebungung				3000 m	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu			
11	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Druatblumbung	Kec. Kebungung				1500 m	Rp 50,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu			
13	Pengadaan Air Bersih Sumberp	Kec. Pucuk	1 Unit	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu						

NO	PROJEK DAERAH	NOPE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (BIL.)	USULAN BAHAN
14			Pembangunan Sarana air bersih / Perpipaan Condonglor	Kec. Sugo	2.000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
15			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Moprejo	Kec. Mado	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
16			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sambungrejo	Kec. Mado	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
17			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kibungwangi	Kec. Sambung	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
18			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wudi	Kec. Sambung	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
19			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mantup	Kec. Mantup	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
20			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sumungrejo	Kec. Paciran	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
21			Pemb. Sarana Air Bersih Desa Banjarnell (Malam Sunan Drajat)	Kec. Paciran	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
22			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Laren	Kec. Laren	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
23			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sobokuro	Kec. Sobokuro	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
24			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Piyaman	Kec. Sokuro	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
25			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangrejo	Kec. Karangrejo	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
26			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wudu	Kec. Karangrejo	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
27			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Manganti	Kec. Glegah	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
28			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kantiang	Kec. Glegah	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
29			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangsembung	Kec. Babat	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
30			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lukrejo	Kec. Kalitengah	1000 m	Rp 50.000.000,00	Lanjutan	Optis Kayu
31			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tunjungrejo	Kec. Kalitengah	1000 m	Rp 50.000.000,00	Lanjutan	Optis Kayu

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANG BIAYA	KETERANGAN (BL)	JUMLAH INSTANSI		
5	Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Kesehatan Kota	N.2.a	32	Pembangunan sarana air bersih Ceme Gebenyengdik	Kec. Nimbang	1 unit 0,3 x 1 x 1.000 m	Rp 100.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Baru Baru	Opta Kayu Opta Kayu	
			33	Penerbitan PSMB menuju Puskesmas	Kec. Nimbang	1.500 m	Rp 20.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			34	Pemb. air bersih Sembung, Benggale, Mngel	Kec. Sukorena	3 unit	Rp 225.000.000,00	Lanjutan	Lanjutan	Opta Kayu
			35	Sarana air bersih Di. Sandangharjo	Kec. Brondong	1 Unit	Rp 100.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			36	Pengembangan sarana air bersih Dib. Bulungan, Mungil	Kec. Medaran	3 Lokasi	PAI	Baru	Baru	Opta Kayu
			1	Pembuatan jalan di dalam TPA	Kec. Tlukung	220 x 4 m = 880 m ²	Rp 120.550.000,00	Lanjutan	Lanjutan	Opta Kayu
6	Peningkatan Banjir Kota	N.2.b	2	Pembuatan gorong - gorong TPA	Kec. Tlukung	1 unit	Rp 22.000.000,00	Baru	Opta Kayu	
			3	Sarana dan Prasarana pengomposan TPA	Kec. Tlukung	.	Rp 50.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			4	Pembuatan saluran air di bagian selatan TPA	Kec. Tlukung	200 m ² x 1,5 m	Rp 110.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			5	Pembangunan Tempat Sampah Dekelubon, Rajasari, Sidiwangan	Kec. Deket	4 x 6 m	Rp 75.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			1	Pembangunan Saluran Air	Kec. Babat	500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
7	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Perikanan / IKK	N.2.c	2	Pembangunan Saluran Air Gang Wili, Sidiharjo Gang Brono, Sidiharjo Sumburjo RT 1 / RW II Sukowijo Gang Mual Indah dan Permas Tumenggungan Sarijo Sukonejo Ngaglik Barat Sukonejo	Kec. Lamongan	190 m 190 m 400 m 250 x 3 m 500 m 120 m	Rp 180.000.000,00	Rehab Rehab Rehab Baru Baru Baru	Opta Kayu Opta Kayu Opta Kayu Opta Kayu Opta Kayu Opta Kayu	
			3	Pembangunan got saluran air hujan dan penutup Jalan Negeri lngk. Padak Keli, Blimbing	Kec. Ploaran	500 x 1 x 1 x 1,5 m	Rp 175.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			1	Pemb. Trotoar dan Saluran air IKK Karanggeneng	Kec. Karanggeneng	900 m x 1,50 m	Rp 387.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			2	Pembangunan Jalan Ingklungan IKK Menap	Kec. Menap	1200 m x 3 m	Rp 210.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu
			3	Pemb. Trotoar dan Saluran air IKK Sembong	Kec. Sembong	500 m x 1,50 m	Rp 215.000.000,00	Lanjutan	Opta Kayu	
			4	Pemb. Trotoar dan Saluran air IKK Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	500 m x 1,50 m	Rp 215.000.000,00	Baru	Baru	Opta Kayu

NO	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	KESASTIAAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHARAH BIAYA	KETERANGAN (BL)	URILAN INSTANSI
5			Pemb. Saluran ar IKK Brondong	Kec. Brondong	1500 m x 0,8 x 0,8 m	Rp 375,000,000.00	Baru	Optis Kayu
6			Pemb. Trotoar dan Saluran ar IKK Dekat	Kec. Dekat	600 m x 1,5 m	Rp 268,000,000.00	Baru	Optis Kayu
7			Pemb. Trotoar dan Saluran ar IKK Kedungting	Kec. Kedungting	800 m x 1,5 m	Rp 344,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu
8			Peningkatan jalan lingkungan wilayah IKK (Pembangunan saluran ar)	Kec. Luren	500 x 1,5 m	Rp 125,000,000.00	Baru	Optis Kayu
9			Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kakapan, Sicomada	Kec. Lamongan	10 Unit	Rp 86,500,000.00	Baru	Optis Kayu
10			Rehabilitasi Jalan Aspal Wonobromo - Talaranabang	Kec. Tlung	1200 x 3 m	Rp 48,000,000.00	Baru	Optis Kayu
11			Pemasangan LPJU IKK Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Unit	Rp 17,300,000.00	Lanjutan	Optis Kayu
12			Pemasangan LPJU Desa Pula - Sarnepo	Kec. Sarnepo	10 Unit	Rp 86,500,000.00	Baru	Optis Kayu
13			Pemasangan LPJU di Depan 3 Pasar Desa	Kec. Kedungting	15 Unit	Rp 125,750,000.00	Baru	Optis Kayu
14			Pemasangan LPJU Shodum J. Nasional Tun Sulodad	Kec. Sulodad	15 Unit	Rp 130,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu
15			Pemasangan LPJU Shodum J. Nasional Sulodad - Sundaran Tig	Kec. Sulodad	14 Unit	Rp 125,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu
16			Penghijauan Gibbuan Sulodad - Pucuk	Kec. Sulodad	1000 Big	Rp 70,000,000.00	Baru	Optis Kayu
17			Pemasangan lampu Penerangan jalan umum Gembong - Kandi (Posisi bundung genak)	Kec. Sekaran	6.000 m	Rp 250,000,000.00	Baru	Optis Kayu
18			Pemasangan LPJU Mju - Sekaran	Kec. Sekaran	6.000 m	Rp 250,000,000.00	Baru	Optis Kayu
19			Pengadahan tanaman hias Babat, Bodaheh, Tritunggal	Kec. Babat	1 paket	Rp 100,000,000.00	Baru	Optis Kayu
20			Pemasangan LPJU Gembong - Babat Berage	Kec. Babat	20 Unit	Rp 173,000,000.00	Baru	Optis Kayu
21			Pemasangan LPJU Ds. Pub, Yungyung	Kec. Mado	10 Bush	PM	Lanjutan	Optis Kayu
22			Pemasangan LPJU IKK Sukrame	Kec. Sukrame	4 Tiak	Rp 2,000,000.00	Baru	Optis Kayu
23			Pemasangan LPJU Shodum Pentura - Togoadang	Kec. Ponoran	20 Unit	Rp 173,000,000.00	Lanjutan	Optis Kayu

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
24			Pergantian LPJ/DI Pesisir Blimbing	Kec. Pectan	10 Unit	Rp 66.000.000,00	Renovasi	Optis Karya
25			Pemasangan LPJU SLP N 1 Pectan dan Seletan makam	Kec. Pectan	20 Unit	Rp 173.000.000,00		Optis Karya
26			Pengisian lumpur dan bang LPJU Lanten - Gempangpesaji	Kec. Lanten	10 unit	Rp 60.000.000,00		Optis Karya
27			Pemasangan LPJU Jalan Raya ke Kantor Kecamatan	Kec. Turi	5 Unit	Rp 43.250.000,00		Optis Karya
28			Pemasangan LPJU Kecamatan - Polsek	Kec. Pucuk	10 Unit	Rp 66.000.000,00		Optis Karya
29			Pemasangan LPJU IKK Maduran	Kec. Maduran	10 Unit	Rp 66.000.000,00		Optis Karya
30			Pemasangan LPJU Jalan Ayan Abas	Kec. Mantup	5 Unit	Rp 43.250.000,00		Optis Karya
31			Pemasangan LPJU Desa Kandangin	Kec. Ngimbang	6 Unit	Rp 51.900.000,00	Lampiran	Optis Karya
32			Pembangunan jalan aspal lingkungan Perumahan Kabanran	Kec. Salsabadi	3 x 1.000 m	Rp 75.000.000,00		Optis Karya
33			Pembangunan Kualitas Lingkungan IKK Galangin Trobar dan Saluran Air	Kec. Galangin	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00		Optis Karya
34			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan - Pembangunan Trobar dan Saluran Air	Kec. Maduran	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00		Optis Karya
35			Perbaikan jalan lingkungan perumahan perkotan (swasabte)	Kec. Lemongan & Babat	2500 m	Rp 250.000.000,00		Optis Karya
Jumlah Total						Rp 18.348.107.000,00		

BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mendayagunakan dan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan kemampuan, pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, maka Bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu bidang yang mempunyai peranan penting dalam mendukung dan menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi yang dimiliki. Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi kebinamargaan, keciptakaryaan dan pengairan, dalam mendukung optimalisasi pengelolaan serta pendayagunaan potensi yang ada melalui diantaranya peningkatan kondisi infra struktur, baik yang berupa prasarana jalan Kabupaten, prasarana lingkungan perkotaan dan pedesaan, prasarana pendukung perdagangan dilingkungan perkotaan, prasarana lingkungan permukiman, Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau dan rest area, peningkatan ketersediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan irigasi maupun air bersih, peningkatan kondisi bangunan air, peningkatan kapasitas daya tampung waduk, embung, rawa, sungai dan kali.

B. KONDISI UMUM

1. Sub Bidang Kebinamargaan.

Untuk membuka keterisolasian daerah dan memperlancar hubungan transportasi antar wilayah di Kabupaten Lamongan, baik itu dalam rangka kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya tersedianya jalan adalah hal yang mutlak. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Binamarga setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kebinamargaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan maupun kegiatan peningkatan ataupun pembangunan dalam jumlah yang cukup significant. Sehingga setiap tahunnya panjang jalan baik terus bertambah. Pada tahun 2004 kondisi jalan baik di Kabupaten Lamongan sepanjang

238,445 Km atau 68,80% dari total panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, demikian juga dengan jembatan yang dalam keadaan baik sebanyak 184 buah atau 97,35% dari jumlah total banyaknya jembatan.

Selain melakukan kegiatan pada jalan-jalan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengarahkan kegiatannya pada peningkatan dan pembangunan jalan poros desa.

2. Sub Bidang Keciaptakaryaan.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan wilayah perkotaan dan perdesaan yang aman, tertib dan terkendali, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan yang meliputi penerangan jalan umum, pembangunan dan perbaikan gedung, penataan alun-alun, penataan Stadion Surajaya, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TPA, pengendalian banjir kota, pembangunan tugu batas wilayah dan kegiatan lain yang terkait dengan keciaptakaryaan.

3. Sub Bidang Pengairan.

Dalam rangka menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Lamongan, peran Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan memiliki arti yang sangat penting, utamanya dalam hal penyediaan air dan prasarana jaringan irigasi, mengingat lebih dari separuh luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah lahan pertanian sehingga menuntut perhatian dan penanganan serius pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung penyediaan air untuk kepentingan irigasi pertanian dan perikanan, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan membagi daerah kerjanya atas 7 cabang seksi, meliputi ; Cabang Seksi Laren dengan luas baku sawah 3.209 Ha, Cabang Seksi Kedungpring dengan luas baku sawah 6.331 Ha, Cabang Seksi Pucuk dengan luas baku sawah 7.122 Ha, Cabang Seksi Karanggeneng dengan luas baku sawah 7.035 Ha, Cabang Seksi Sumlaran dengan luas baku sawah 6.731 Ha, Cabang Seksi Kuro dengan luas baku sawah 9.986 Ha dan Cabang Seksi Lamongan dengan luas baku sawah 6.098 Ha.

Selain menangani penyediaan air, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan juga bertanggung jawab dalam hal pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Lamongan.

Adapun hal-hal yang ditangani oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan meliputi kegiatan pemeliharaan/normalisasi waduk, rawa, embung,

jaringan irigasi ditingkat primer dan sekunder, perbaikan dan pembangunan dam, pintu air dan bangunan-bangunan pengairan lainnya termasuk juga penanganan waduk desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun diperdesaan.
- b. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, waduk, jaringan irigasi, drainase, sanitasi dan persampahan
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan.
- d. Meningkatkan optimalisasi dan ketertiban pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat pemakai air (HIPPA) dan pemakai tanah pengairan.
- f. Melakukan penanggulangan banjir dan kekeringan.
- g. Meningkatnya pengetahuan personil melalui Diklat

2. Sasaran

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten, jalan poros desa jembatan, drainase, sanitasi dan persampahan
- b. Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pemeliharaan, pengendalian dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.
- c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan ruang.
- d. Meningkatnya kondisi infrastruktur pengairan (waduk, embung, waduk desa, jaringan irigasi, bendungan, dam, saluran pembuangan, dan bangunan-bangunan pengairan lainnya)
- e. Terwujudnya pelaksanaan Diklat – Diklat Fungsional Bidang Teknis Ke PU-an.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan Fungsi Manajemen Pembangunan Sektor PU** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Pembangunan Sektor PU, b) Peningkatan monitoring dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, c) Prioritas kegiatan pelaksanaan pembangunan sesuai situasi dan kondisi, d) Peningkatan pembinaan konsultan perencana, pengawas dan kontraktor pelaksana dalam rangka peningkatan kualitas bangunan. **2. Peningkatan pelayanan pembangunan sektor PU** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan perijinan di sektor PU, b) Peningkatan pelayanan bantuan teknis perencanaan dan pembangunan, c) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan operasional sektor PU. **3. Peningkatan, pengembangan dan perluasan fungsi Sub Sektor Irigasi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan fungsi waduk, rawa, sungai, jaringan dan bangunan-bangunan pengairan, b) Pembinaan kelompok HIPPA dan peningkatan SDM anggotanya. **4. Peningkatan, Pengembangan dan Perluasan Fungsi Sub Sektor Bina Marga** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten, b) Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan poros desa, c) Optimalisasi bahan baku kebutuhan Sub Sektor Bina Marga, d) Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi Propinsi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PEKERJAAN URBAN

No	Kategori	Kode	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori			
1	Peningkatan tingkat kualitas pembangunan sektor PU	0.1.a	1	Studi perencanaan sanitasi jalan pada daerah rawan banjir	Lanar, Sekaran, Maduran, Kalibagat, Tur, Kemung, Babat, Dalem, Chapan, Babat	9 Kecamatan	Rp	200,000,000.00	Baru	Bioponds	
2	Peningkatan kualitas dan pengawasan teknis pelaksanaan Pembangunan	0.1.b	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk Operasional Pengawasan Pembangunan Di Daerah Melk Jalan Kabupaten Lamongan	Kec. Lamongan	Carry Station 1 Unit Sepeda Motor 2 Unit	PIA			Dinas PU Bina	
			2	Pembinaan / Penyuluhan Bidang Jalan dan jembatan Pedesaan serta pembinaan penggunaan Daerah Melk Jalan Kabupaten	Kec. So. Kab. Lamongan	50 Org x 2 x 29 Kec	Rp	10,000,000.00			Dinas PU Bina
3	Prioritas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Status dan Kondisi	0.1.c	1	Pembangunan perencanaan dan lahan Basah (tanah dasar lebih dari 1000 des)	Kec. Babat	300 m	Rp	40,000,000.00	Lanjutan	Opis Karya	
			2	Pembangunan stadion	Kec. Brondong	100 x 100 m	Rp	250,000,000.00	Baru	Opis Karya	
4	Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pembangunan	0.2.b	1	Pembuatan Pasar Hewan	Kec. Sukorejo	25 x 25 m	Rp	100,000,000.00	Baru	Opis Karya	
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlembagaan Operasional PU	0.2.c	1	Por Jagi dan Gempol Butsir	Kec. Turuc	2 Unit	Rp	50,000,000.00	Lanjutan	Opis Karya	
			2	Operasional TPA Teseok-gedung	Kec. Turuc	1 Unit	Rp	50,000,000.00	Baru	Opis Karya	
			3	Pemeliharaan Ruis Alat - alat berat	Kec. Turuc	2 Bush	Rp	75,000,000.00	Pemeliharaan	Dinas PU Bina	
			4	Pembelian alat berat (Wali)	Kec. Turuc	2 Bush	Rp	900,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			5	Pembelian Alat Pemotong Rumput	Kec. Turuc	4 Bush	Rp	20,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			6	Pembelian alat Pemotong Pohon	Kec. Turuc	2 Bush	Rp	21,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			7	Pengadaan Roda Empat Station (Pemer)	Kec. Turuc	1 Bush	Rp	170,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			8	Pengadaan Roda Dua (WNI)	Kec. Turuc	6 Bush	Rp	75,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			9	Pembelian spanduk - simbol dan penyediaan bom nase-nase jalan kabupaten.	Kabupaten Lamongan	16 Ruis	Rp	100,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			10	Pembangunan Gudang & Pagar	DPU Desa Marga		Rp	650,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	
			11	Pengadaan bahan Cadangan	DPU Desa Marga		Rp	200,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina	

No	Kategori Pekerjaan	Merk/Spesifikasi Material	Kuantitas	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kondisi	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan
6	Peningkatan tinggi welek, rawa sungai, jembatan dan bangunan bangunan pertanian.	0.3.a						
	1	Pekerjaan Diborengkan Perbaikan Dem Kacang	1 Unit	Ds. Sidakuljo Kec. Lamongan	Rp	200.000.000	Baru	DPU Pengaman
	2	Pembuatan Dem Corong	Dem 1 unit	Ds. Wedoro Kec. Gajah	Rp	600.000.000	Baru	DPU Pengaman
	3	Penalihan Jembatan Injeksi D1 Sulas Keyongon.	Selatan 2.400 m Sotop 2 buah	Ds. Keyongan Kec. Babat	Rp	350.000.000	Baru	DPU Pengaman
	4	Pembuatan Sudekan Kali Gendang Isu Rawa Sarawo.	Pembangunan 3.000m Dem 1 unit	Ds. Gendanghutan Ds. Ploasan Kec. Babat	Rp	600.000.000	Baru	DPU Pengaman
	5	Pembangunan Dem Kali Wiyu di Desa Ploaswitu.	Dem 1 unit	Ds. Ploaswitu Kec. Lamongan	Rp	220.000.000	Baru	DPU Pengaman
	6	Perbaikan Pelempah Waduk German	Pelangan 2 buah	Ds. German Kec. Supo	Rp	200.000.000	Baru	DPU Pengaman
	7	Perbaikan Paspale Kaljerman	Poros air 2 unit	Ds. Kaljerman Kec. Karangreng	Rp	80.000.000	Baru	DPU Pengaman
	8	Pembangunan Dem Kali Mengot di Desa Meir.	Dem 1 unit	Ds. Meir Kec. Kembangobu	Rp	250.000.000	Baru	DPU Pengaman
	9	Pembangunan Dem Kali Mengot di Desa Kembangobu	Dem 1 unit	Ds. Kembangobu Kec. Kembangobu	Rp	300.000.000	Baru	DPU Pengaman
	10	Normalisasi Waduk Sumurgug	Galian tanah 30.000 m ²	Ds. Brangi Kec. Loran	Rp	500.000.000	Baru	DPU Pengaman
	11	Normalisasi Waduk Jajong	Galian tanah 40.000 m ²	Ds. Bulbrangal Kec. Loran	Rp	700.000.000	Baru	DPU Pengaman
	12	Normalisasi Kali Ploangen	Kali 2000 m	Ds. Bambang akl. Ponoharjo Kec. Tul	Rp	667.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
	13	Normalisasi Kali Sulek	Perjang 1.500 m Jembatan 1 buah P. tembok 100 m	Ds. Kroy, Banjarnel Kec. Ploren	Rp	400.000.000	Baru	DPU Pengaman
	14	Normalisasi dan Perbaikan Jembatan Injeksi Waduk Rawa.	Peru waduk 1 buku Selatan 1.000 m Tanggul 4.000 m	Ds. Pindayancur Kec. Babat	Rp	800.000.000	Baru	DPU Pengaman

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENDAPATAN BILAYA	KETERANGAN (DLC)	USULAN INSTANSI
15			Normalisasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi Waduk Bawa	Dk Kedungwono Kec. Mbojo	Tanggul 1.500 m Dem 1 unit Saluran 1.000 m	900.000.000	Baru	DPU Pengaman
16			Normalisasi Kali Bawa	Dk Sukono s/d Kec. Karangbunung	Kali 2000 m	1.000.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
17			Pengangkutan/normalisasi Kali Kruwil II	Dk Kaban s/d Kec. Karangbunung Kec. Karangbunung	Kali 3000 m Dem 1 unit Jembatan 1 buah	1.000.000.000	Baru	DPU Pengaman
1			Pekerjaan Swasaha Kali - Kali (Akar Bawa)	Dk Wajik, Sidosamp Kec. Limongan	Panjang 3.000 m	150.000.000	Baru	DPU Pengaman
2			Normalisasi Kali Pahi	Dk Mungli s/d Kec. Limongan	Kali 3.000 m	200.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
3			Normalisasi Kali Gondang	Dk Swaropo s/d Kec. Kaligatih Dk Tunjungrekar	Kali 3.000 m	300.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
4			Normalisasi Perintang Mado	Dk Mado Kec. Limongan	Pembuang 1.500 m	150.000.000	Baru	DPU Pengaman
5			Normalisasi Kali Dukuhagung dan Kali Pengaron	Dk Dukuhagung s/d Dk Bawarpuh Kec. Tejung	Kali 2.000 m	175.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
6			Normalisasi Kali Piyekan Hlu	Dk Tanak s/d Dk Sukombo Kec. Kedungreng	Kali 2.500 m	200.000.000	Lanjutan	DPU Pengaman
7			Normalisasi SaluranLudang Golep	Dk Lirni, Gempang Sajid, Tempratik Kec. Lirni	Saluran 3.000 m	250.000.000	Baru	DPU Pengaman
8			Normalisasi Saluran Suplai Waduk Job	Dk Pangruband, Bawarpuh, Jibosari, Kec. Tejung	Saluran 2.000 m	175.000.000	Baru	DPU Pengaman
9			Normalisasi Kali Bawa	Dk Kedungreng Kec. Mbojo	Kali 3.000 m	200.000.000	Baru	DPU Pengaman

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERkiraan BAYA	METERANJAM (BL)	URUJAN INSTANSI
			Normalisasi Waduk - Waduk Desa (Alat Berat dengan Pola Sharing) :					
			1 Kacangan, Tanak	Ds. Dukuhagung Ds. Bozopuh Kec. Tugur	Galian tanah 3,960 m ²	Rp 43.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			2 Bulonep	Ds. Gempolmanis Kec. Sambong	Galian tanah 3,600 m ²	Rp 19.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			3 Winubir	Ds. Sulzowou Kec. Mantup	Galian tanah 2,600 m ²	Rp 19.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			4 Kendat	Ds. Topogung Kec. Kembangbahu	Galian tanah 4,800 m ²	Rp 24.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			5 Puler	Ds. Puler Kec. Kembangbahu	Galian tanah 3,600 m ²	Rp 19.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			6 Kalogoo	Ds. Kalwalis Kec. Kembangbahu	Galian tanah 4,200 m ²	Rp 21.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			7 Kacalin	Ds. Kalwalis Kec. Kembangbahu	Galian tanah 4,200 m ²	Rp 21.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			8 Wodokromo	Ds. Wodokromo Kec. Tugur	Galian tanah 3,600 m ²	Rp 19.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			9 Banyubang	Ds. Banyubang Kec. Sobokuro	Galian tanah 4,600 m ²	Rp 24.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			10 Sugihan	Ds. Sugihan Kec. Sobokuro	Galian tanah 4,200 m ²	Rp 21.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			11 Bulumangi	Ds. Bulumang Kec. Babat	Galian tanah 17,400 m ²	Rp 87.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			12 Sambangan	Ds. Sambangan Kec. Babat	Galian tanah 6,600 m ²	Rp 33.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			13 Dagean Sempit	Ds. Ponglatrapo Kec. Sugo	Galian tanah 6,000 m ²	Rp 40.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			14 Semboto	Ds. Karangambogoh Kec. Sugo	Galian tanah 5,200 m ²	Rp 26.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			15 Oro - Oro Imbo	Ds. Mantup Kec. Mantup	Galian tanah 6,000 m ²	Rp 30.000.000	Baru	DPU Pengajaran
			16 Prablan	Ds. Sumbonep Kec. Pucuk	Galian tanah 15,600 m ²	Rp 78.000.000	Baru	DPU Pengajaran

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (BAL)	USULAN INSTANSI
18			Penggantian Jambatan Berganda Ruas Jh Mantap - Ayemalis	Kec. Mantap	5,9 x 7 m	175.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
19			Penggantian Gorong-gorong Ruas Jalan Ngimbang - Buluk	Kec. Buluk	1 x 7 m	45.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
20			Penggantian Gorong-gorong Pando Ruas Jalan Soko - Lonyong	Kec. Gligah	1,25 x 7 m	50.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
21			Penggantian Gorong-gorong Tleah Ruas Jalan Mantap - Sambang	Kec. Sambang	1,5 x 7 m	57.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
22			Pembangunan Dinding Penahan Tanah dengan beton	Kec. Sugo	150 m ²	365.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
23			Pembangunan Dinding Penahan Tanah dengan Pasangan Batu Batah	Kec. Kedungong	10 m	30.000.000,00	Baru	Dinas PU Bina
24			Pengaliran Jalan Soburo - Degan	Kec. Soburo	1500 x 4,5 m	532.500.000,00	Baru	Kecamatan
1			Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Subodod-Sumbowud	Kec. Subodod	6.800 x 4 m	Rp 169.000.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
2			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sumbowud Kr. Geneng	Kec. Karanggeneng	2000 x 4 m	Rp 55.000.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
3			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Plo'n - Banjariw	Kec. Pizaran	6.500 x 4 m	Rp 113.750.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
4			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Pegawep-Pembon	Kec. Lemongat, Subodod	5000 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
5			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Pembon - Sugo	Kec. Subodod, Sugo	6200 x 4 m	Rp 108.500.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
6			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sugo - Tharak	Kec. Sugo, Kedungong	11000 x 4 m	Rp 165.000.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
7			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Tharak - Ngundak	Kec. Kedungong, Hobo	4900 x 4 m	Rp 85.750.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
8			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Pucuk - Sokaran	Kec. Pucuk, Sokaran	5000 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina
9			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sokaran - Laren	Kec. Sokaran, Laren	6200 x 4 m	Rp 108.500.000,00	Telford/Lapen, Hotmix	Dinas PU Bina

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITAPAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	URULAN INSTANSI
10			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Cembong - dempel	Kec. Mekar, Sekaran	7000 x 4 m	Rp 85,000,000.00	Telford	Dinas PU Bima
11			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Larin - Blimbang	Kec. Larin, Blimbang	6200 x 4 m	Rp 108,500,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
12			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sukorane - Slig	Kec. Sukorane	3400 x 4 m	Rp 59,500,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
13			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Dekel - Soko	Kec. Dekel	5000 x 4 m	Rp 86,700,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
14			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Soko - Karangharangun	Kec. Karangharangun	4700 x 4 m	Rp 82,250,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
15			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Mantap - Sambang	Kec. Mantap	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
16			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Soko - Dugang	Kec. Gajah	6500 x 4 m	Rp 113,750,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
17			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Lempang - Mendob	Kec. Gajah	6000 x 4 m	Rp 110,250,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
18			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sumowudi - Meduran	Kec. Karanggeneng	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telford, Lapan	Dinas PU Bima
19			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sambang Himbang	Kec. Sambang	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
20			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Cempang - Peyin	Kec. Larin, Soburo	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telford, Lapan	Dinas PU Bima
21			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Paciran - Gobog	Kec. Paciran, Soburo	8000 x 4 m	Rp 135,000,000.00	Telford, Lapan	Dinas PU Bima
22			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Merengal - welas	Kec. Karangharangun, Sugio	5000 x 4 m	Rp 125,000,000.00	Telford, Lapan	Dinas PU Bima
23			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Mantap- Ayem alas	Kec. Mantap	5700 x 4 m	Rp 99,750,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
24			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Tanjung - Songowong	Kec. Ngimbang	5000 x 4 m	Rp 125,000,000.00	Telford, Lapan	Dinas PU Bima
25			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Dronoh - Bluk	Kec. Mboj, Bluk	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima
26			Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Bluk- Sukorane	Kec. Bluk, Sukorane	5000 x 4 m	Rp 125,000,000.00	Telford, Lapan, Holmix	Dinas PU Bima

NO.	PROGRIAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
27			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Sukorano-Sembung	Kec. Sukorano	4300 x 4 m	Rp 107,500,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
28			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Kalen-Kedunggring	Kec. Kedunggring	2900 x 4 m	Rp 52,750,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
29			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Tanak-Kedunggring	Kec. Kedunggring	1700 x 4 m	Rp 29,750,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
30			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Pembon-Sukodadi	Kec. Sukodadi	5400 x 4 m	Rp 54,500,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
31			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Pula-Sarneo	Kec. Thung, Sarneo	5600 x 4 m	Rp 145,000,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
32			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Tun-Kirangan	Kec. Tun	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
33			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Kembangbahu-Kalang	Kec. Kembangbahu	5000 x 4 m	Rp 125,000,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
34			Pemeliharaan Ruin Jh Junusan Kembangbahu Sukabendu	Kec. Kembangbahu	6000 x 4 m	Rp 150,000,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
35			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Tikung-Kembangbahu	Kec. Thung, Kembangbahu	3000 x 4 m	Rp 52,500,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
36			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Ngimbang-Buluk	Kec. Ngimbang, Buluk	5600 x 4 m	Rp 101,500,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
37			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Dekat-Tembeloyo	Kec. Thung,Dekat	4300 x 4 m	Rp 75,250,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
38			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Dumri-Sulbendu	Kec. Kembangbahu	6000 x 4 m	Rp 62,600,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
39			Pemeliharaan Ruin Jh Junusan Kedunggring-Sukabendu	Kec. Kedunggring, Sugo	6000 x 4 m	Rp 105,000,000.00	Telford,Lapen,Holms	Dinas PU Bina
40			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Dreden-Kedunggring	Kec. Kedunggring	5000 x 4 m	Rp 92,750,000.00	Telford,Lapen	Dinas PU Bina
41			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Soburo-Dadipon	Kec. Soburo	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina
42			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Karangsembang-Gendongluben	Kec. Babat	3600 x 4 m	Rp 61,260,000.00	Telford,Lapen	Dinas PU Bina
43			Pemeliharaan Ruin Jalan Junusan Mado-Pasowethu	Kec. Lamongan	2900 x 4 m	Rp 50,750,000.00	Telforc,Lapen	Dinas PU Bina

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PEROGRAH BAWA	KETERANGAN (BIL.)	JUJUAN INSTANSI
8	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan Poros Desa	0.4.b	44 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Saluran Kota Lamongan	Kec. Lamongan	Sel. 2725 m ³ Cat. 9700 m ² Jh. 14226 m ³	Rp	Telford, Lепен, Holmix	Dinas PU Bina
			45 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Saluran Kota Babat	Kec. Babat	Sel. 653 m ³ Cat. 975 m ² Jh. 1510 m ³	Rp	Telford, Lепен, Holmix	Dinas PU Bina
			46 Pemeliharaan Rutin Jalan Pasiran - Sendang Dukur	Kec. Pasiran	3000 x 4 m	Rp	Telford, Lепен	Dinas PU Bina
			47 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kasupellen	Kab. Lamongan	30 Buah	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina
			48 Pemeliharaan Rutin Jalan Sidorouddi - Lubuhan	Kec. Bronzong	3500 x 4 m	Rp	Telford, Lепен	Dinas PU Bina
			1 Peningkatan Jalan Telford Junusan Sugo - Kedungdadi	Kec. Sugo	3000 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina
			2 Peningkatan Jalan Telford Junusan Hysamlehambang - Kadungmatasar	Kec. Ngimbang	2000 x 3 m	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina
			3 Peningkatan Jalan Telford Junusan Sumbanep - Kotemas	Kec. Manup Kec. Kembangbaku	1500 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina
			4 Peningkatan jalan dengan pengaspelan Junusan Sumbardis - Sumbanep	Kec. Manup	1500 x 3,5 m	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina
			5 Peningkatan Jalan dengan Pengaspelan Junusan Kedungweng - Ganung	Kec. Sembang	1000 x 3,5 m	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina
			6 Peningkatan jalan dengan Pengaspelan Junusan Pandanporur - Stranda	Kec. Deket	1000 x 3,5 m	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina
7 Peningkatan jalan dengan Pengaspelan Junusan Mopong - Kasongan	Kec. Babat	1000 x 4 m	Rp	Lanjutan	Dinas PU Bina			
8 Peningkatan Jalan dengan Telford Junusan Bregok - Duri Kuban	Kec. Bronzong	2000 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina			
9 Peningkatan jalan dengan Pengaspelan Junusan Dalawong - Bulmang	Kec. Babat	1000 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina			
10 Pengaspelan Jalan Poros Pasowehyu - Tambakpobo	Kec. Lamongan	1000 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina			
11 Pengaspelan Jalan Meladani Sokolumpu - Dreggu	Kec. Lamongan Kec. Deket	2000 x 3 m	Rp	Baru	Dinas PU Bina			

NO.	PROYAK DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERGABAIAN BAYAN	KETERANGAN (BL)	URAIAN INSTANSI
12			Pembangunan Jalan (Rencana) Tameng - Tameng - Pasawitnyu	Kec. Tur	1000 x 3 m	162.000.000,00		Dinas PU Bima
13			Pembangunan Jalan Suro - Ketrum	Kec. Tang	2000 x 3 m	324.000.000,00		Dinas PU Bima
14			Pembangunan Jalan Ponds Desa : Tumpang - Kedungretno	Kec. Karangbati	1000 x 3 m	162.000.000,00		Dinas PU Bima
15			Pembangunan Jamban : Kedungretno, Ds. Kedungretno	Kec. Karangbati	3 x 7 m	75.000.000,00		Dinas PU Bima
16			Pembangunan Jalan Suro - Suro - Dukung	Kec. Suro	2400 x 3 m	105.000.000,00		Dinas PU Bima
17			Pembangunan Jalan Ponds Desa : Batur - Gedangan	Kec. Suro	3 x 1000 m	156.000.000,00		Dinas PU Bima
18			Pembangunan Jalan Ponds Desa Pangkajene - Sugrijo	Kec. Suro	1000 x 3 m	154.000.000,00		Dinas PU Bima
19			Pembangunan Jalan Ponds Desa / Mardani - Sunggung - Bogoharjo	Kec. Suro	3000 x 3 m	73.000.000,00		Dinas PU Bima
20			Pembangunan Jalan : Wukelan - Bogoharjo	Kec. Prok	1000 x 2,5 m	122.500.000,00		Dinas PU Bima
21			Pembangunan Jalan : Kandang - Suro - Suro - Mendo	Kec. Suro	1500 x 3 m	120.000.000,00		Dinas PU Bima
22			Pembangunan Jalan Aspal : Geron - Kumpang	Kec. Suro	1000 x 2,5 m	135.000.000,00		Dinas PU Bima
23			Pembangunan Jalan Ponds Desa : Mardani - Kedungretno - Suro	Kec. Mado	1500 x 3 m	243.000.000,00		Dinas PU Bima
24			Pembangunan Jalan Ponds Desa : Puh - Suro	Kec. Mado	1500 x 3 m	243.000.000,00		Dinas PU Bima
25			Pembangunan Jamban : Gedungretno dan Gedungretno	Kec. Hingbang	9 x 3 m & 4 x 7 x 3m	102.800.000,00		Dinas PU Bima
26			Pembangunan Jalan Kerdjo - Gedungretno	Kec. Hingbang	1500 x 2,5 m	80.000.000,00		Dinas PU Bima
27			Pembangunan Jalan Ponds Desa Papan (Bancan) - Desa Surokembang	Kec. Bulu	2000 x 2,7 m	150.000.000,00		Dinas PU Bima
28			Pembangunan Jalan Mardani / Aspal Wukelan - Suro	Kec. Suro	1500 x 3 m	243.000.000,00		Dinas PU Bima

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERkiraan BIAYA	PETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
			29 Pembangunan Tombok Penahan Tanah Jalan Poros Desa : Sumbardadi - Sumbakunung (Desa Miposari)	Kec. Marauq	25 x 4 m	Rp 42.000.000,00	Baru	Desas PU Birra
			30 Peningkatan Jalan aspal Perintis Karangrahan, Turi, Pringgoboyo, Pengklatrap	Kec. Marauq	2000 x 2,5 m	Rp 267.500.000,00	Lanjutan	Desas PU Birra
			31 Pengaspalan Jalan Jususan Poros desa - Siman	Kec. Sekuran	1000 x 2,7 m	Rp 147.000.000,00	Baru	Desas PU Birra
			32 Pengaspalan Jalan Jususan Kembangpaku - Baturoso	Kec. Kembangpaku	1000 x 3 m	Rp 162.000.000,00	Baru	Desas PU Birra
			33 Peningkatan Jalan Poros Desa Mnggel menuju II PU	Kec. Salozana	900 m x 3 m	Rp 152.000.000,00	Lanjutan	Desas PU Birra
Jumlah Total						Rp 34.095.000.000,00		

BIDANG PERHUBUNGAN

A. PENDAHULUAN

Bidang Perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan, dimana pembangunannya diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang serta menggerakkan dinamika pembangunan dan perekonomian mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa guna lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Disamping itu bidang Perhubungan melalui program transportasi akan mendukung dalam mempercepat pengembangan wilayah. Oleh karena itu, guna mempercepat pengembangan wilayah, Peningkatan ekonomi dan secara makro untuk kesejahteraan masyarakat, maka transportasi pedesaan agar mendapat perhatian secara khusus, sehingga distribusi produksi dari pedesaan dapat berjalan lancar ke pusat-pusat perdagangan maupun distribusi barang dari kota menuju pedesaan dan berikutnya transportasi antar pulau.

Dalam pembangunan bidang Perhubungan ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan transportasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun perkembangan wilayah secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi dan perhubungan ditujukan untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman dan nyaman.

B. KONDISI UMUM

Potensi sumber daya alam yang ada saat ini akan sulit dikembangkan bila tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, terkait bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat tiga sub bidang yakni : sub bidang perhubungan darat, sub bidang perhubungan laut dan sub bidang pos dan telekomunikasi.

Sub bidang perhubungan darat terdiri dari prasarana jalan raya dengan panjang total 486,2332 Km dan jalan baja 41,200 Km yang keberadaannya membentang diwilayah tengah Lamongan sangat menunjang perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sub bidang perhubungan darat pada Tahun 2004 memberikan kontribusi pada PAD sebesar Rp.

1.010.790.000,- sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat pada Tahun 2005 ini mulai dirancang kereta api komuter Surabaya – Lamongan PP dan Jalan Lingkar Utara Kota Lamongan serta terminal terpadu di wilayah pantura.

Sub bidang perhubungan laut, Kabupaten Lamongan memiliki potensi laut dengan panjang pantai ± 35 Km, meskipun saat ini telah terdapat pelabuhan TPI dan Pelabuhan Rakyat Nusantara III, namun untuk kontribusi terhadap PAD secara langsung belum memenuhi harapan. Oleh karenanya saat ini akan dikembangkan pelabuhan penyeberangan ASDP, DOK dan PERKAPALAN, Shore Base Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan untuk sub bidang Pos dan Telekomunikasi meskipun secara umum pelayanan jasa kepada masyarakat meningkat, Pemkab Lamongan hanya sebatas memfasilitasi saja. Karena kewenangannya masih belum diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terwujudnya suatu sistem angkutan manusia dan barang yang berlangsung secara tertib, aman, nyaman dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Sasaran

- a. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan Lalu Lintas karena faktor jalan, alur pelayanan dan fasilitas jalan, di pelabuhan karena faktor manusia.
- b. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten, antar Kecamatan dengan Kabupaten perbatasan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan angkutan sebanyak 20 kendaraan dan dari 14 jaringan trayek pedesaan dari atau mengurangi jumlah angkutan over load trayek Babat – Lamongan.
- d. Terpenuhinya angkutan Pedesaan yang aman dan lancar melalui renovasi kendaraan di jalur trayek Lamongan – Sugio dan Lamongan – Glagah.
- e. Tersedianya tenaga trampil 60 % dari jumlah staf Perhubungan yang tersedia.

- f. Terbukanya jaringan trayek baru rata-rata 5 % dari 14 jaringan trayek yang ada.
- g. Terpeliharanya kondisi Terminal Type B, Pangkalan MPU dan Cargo, serta meningkatnya fasilitas pelayanan.
- h. Terbentuknya titik kawasan baru parkir tepi jalan umum.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Perhubungan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan Penataan Sistem Transportasi Darat dan Laut** dengan strategi dan prioritas a) Penataan Sistem Transportasi Angkutan orang/barang, b) Pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan jalan, c) Pembinaan awak kendaraan umum bagi transportasi darat dan laut. **2. Peningkatan Pelayanan Transportasi** dengan strategi dan prioritas a) Pembangunan fasilitas terminal angkutan umum, b) Peningkatan sarana Pelayanan uji kendaraan bermotor, c) Peningkatan pelayanan perijinan angkutan darat dan laut, d) Penyediaan fasilitas pendukung dermaga penyeberangan antar pulau/ pelabuhan. **3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Transportasi** dengan strategi dan prioritas a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat/ laut, b) Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat, c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut, d) Melaksanakan penertiban kawasan pantai dan laut, e) Pengadaan sarana pendukung kegiatan operasional transportasi darat/ laut. **4. Peningkatan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Postel** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi kawasan terbatas, b) Peningkatan pelayanan jasa Pos dan Giro, c) Penyusunan perangkat lunak Sub sektor Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi. **5. Peningkatan SDM Aparatur Perhubungan Darat/Laut** dengan strategi dan prioritas a) Pengadaan/mengikuti Diklat Fungsional Bidang Perhubungan, b) Melakukan Pembinaan Staf Operasional Sub Sektor Perhubungan Darat/Laut.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Perhubungan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : PERHUBUNGAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROJEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAN	KELOMPOK/INSTANSI
1.	Pemenuhan kebutuhan sarana tabungkapal jalan	P.1.b	1 Rambu 2 Henti jalan 3 RPU 4 Traffic Light - Pemastangan Lampu Pengisian MA Otomatis	Kabupaten Lamongan Kec. Lamongan Kabupaten Lamongan Kec. Lamongan (Diput) Kec. Lamongan 10 Gugur (Kaliak)	100 Unit 2000 m ² 4 Unit 1 Unit 1 Unit	Rp 40.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.	Peningkatan fasilitas terminal angkutan umum	P.2.a	1 Pemb. Terminal Terpadu Paciran 2 Peningk. Fasilitas Terminal Babel: - Lantai Bus/Tray Bus - Jamb. Kakas/masuk (perluasan) - Perbaikan Kanvas - Ruang Tunggu 3 Pemeliharaan Terminal Lamongan - Perbaikan lantai bus parkir - Pagar 4 Pemb. Henti Bus ke SUTPH 1 Dabot 5 Pembangunan Ombak dan Hulo	Kecamatan Paciran Kecamatan Babel Kec. Lamongan Kec. Lamongan	95 x 65 1350 m ² 16 m ² 88 m ² 2 unit 2250 m ² 130 m ² 1 Unit 1 Unit	Rp 500.000.000,00 Rp 850.000.000,00	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
3.	Peningkatan Pelayanan Fasilitas Angkutan Darat	P.2.c	Komputerisasi pengisian peramban Trayek	Kabupaten Lamongan	1 unit	Rp 30.000.000,00	Dinas Perhubungan
4.	Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian	P.3.b	Operasi pemeliharaan tabungkapal jalan	Kabupaten Lamongan	64 hari/th	Rp 12.500.000,00	Dinas Perhubungan
5.	Penyediaan fasilitas pendukung demage penyediaan erasr pulu	P.2.d	Perbaikan jalan masuk ASDP Peningkatan jalan keluar ASDP	Kec. Paciran	1.552 m ² (B=184 m)	Rp 250.000.000,00	Dinas Perhubungan
6.	Soalisasi peraturan perundang-undangan dibidang transportasi laut	P.3.a	Lokasinya ASDP	Lamongan dan Surabaya	2 kali	Rp 50.000.000,00	Dinas Perhubungan
7.	Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas laut	P.3.d	Operasi pemantauan dan pengawasan secara terpadu	Kec. Paciran dan Kec.	4 kali	Rp 20.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERORANGAN BIAYA	KETERANGAN (BIL)	USULAN INSTANSI
6	Pengadaan sarana pendukung kegiatan operasional transportasi laut	P.3.e	1 Pengadaan sarana pengawalan dan pemertan bui lintas laut (1 buah kapal 10 GT + 3 mesin Yamaha 150) 2 Penerapan prototype kapal pemangulangan dan pelayaran di laut	Kab. Lamongan Kab. Ponorogo dan Kab. Bondowoso	1 unit 2 unit	Rp 100,000,000.00 Rp 40,000,000.00	Baru Baru	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah Total						Rp 2,717,500,000.00		

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Peranan aspek lingkungan hidup begitu besar dalam kehidupan manusia, mengingat lingkungan hidup merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia karena kedua komponen tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaan, keseimbangan, serta keselarasannya secara dinamis melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan serta pemeliharaan keseimbangan, antara unsur-unsurnya secara terus menerus agar mutu dan fungsinya dapat dipelihara serta ditingkatkan kemanfaatannya bagi generasi selanjutnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor : 23 tahun 1997.

Disamping itu pembangunan lingkungan hidup juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup dan diharapkan dapat mewujudkan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan konservasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis termasuk flora dan fauna, serta penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terus ditingkatkan guna melindungi segenap komponen makhluk hidup, keaneka ragaman plasma nutfah maupun ekosistemnya.

B. KONDISI UMUM

Secara umum gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup telah mengalami peningkatan hal ini terlihat dengan menurunnya luas lahan kritis yang hingga saat ini luas lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai $\pm 14.060,71$ Ha, yang merupakan keberhasilan program penghijauan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemulihan lingkungan dan pelestarian Sumber Daya Alam.

Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan akibat usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan telah dilaksanakan pembinaan kepada usaha/kegiatan dimaksud guna menyusun Dokumen AMDAL, UKL/UPL, dan saat ini usaha/kegiatan yang telah menyusun dokumen AMDAL sebanyak 8 pengusaha dan dokumen UKL/UPL sebanyak 9 pengusaha.

Untuk mendukung pelestarian pantai telah dilaksanakan program pantai lestari dan telah dilaksanakan rehabilitasi mangrove sepanjang + 8 Km di Pantai Utara Kab. Lamongan. Disamping itu untuk meningkatkan kesadaran bagi

pengusaha/industri dalam menerapkan usaha/industri yang ramah lingkungan maka telah diadakan sosialisasi dan audit lingkungan terhadap jenis usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaksanakann kerjasama dengan BAPEDALPROP, Bejis Project dan adanya dukungan dari LSM pemerhati Lingkungan yaitu KOLILA.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan suatu ekosistim yang mampu menyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

2. Sasaran :

- a. Usaha penyelamatan hutan, tanah, air dan pantai dengan program terpadu antara lain gerakan penghijauan di lahan kritis, penanaman bakau di wilayah pesisir/pantai, dan gerakan penghijauan terpadu.
- b. Meningkatkan kualitas air sungai dan daya guna sungai melalui pembersihan kali disepanjang kali otik, kali dapur, sidoharjo dan Bengawan Jero.
- c. Penerapan AMDAL, UKL/UPL dalam proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan pembangunan dan kegiatan/usaha serta penyusunan dokumen AMDAL/UKL/UPL bagi usaha/kegiatan industri yang belum AMDAL, UKL/UPL.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan strategi dan prioritas** a) Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL dan UPL sesuai kebutuhan, b) Keterlibatan peranserta masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup, c) Penataan hutan kota, kelestarian, keasrian dan keindahan kota, d) Meminimalisasi lahan-lahan kritis/ reboisasi, e) Pembinaan SDM

berwawasan lingkungan. **2. Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam** dengan strategi dan prioritas a) Memfasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan, b) Pengelolaan SDA potensial dan pelestarian lingkungan hidup. **3. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan SDA** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pemerhati lingkungan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KESALURAN (S)	LOKASI	WALUJANG	PERHITUNGAN BIAYA	KELOMPOK MASYARAKAT (G)	URAIAN
1	Penyusunan Dokumen AMDAL UKL & UPL Sesuai kebutuhan	Q 1 a	1 Penyusunan Dokumen UKL / UPL RSUD Dr. Soegri TPA Tembungading Pasar Siboharp TPI Wiwu-Pecoran	Kabupaten Lamongan		Rp 80.000.000,00	Baru	Bag. LH
			2 Penyusunan dokumen AMDAL UKL dan UPL	RSD Dr. Soegri	1 Paket	Rp 15.000.000,00	Baru	RSD Soegri
2	Keterlibatan Peran serta masyarakat (LSM) dalam pengetahuan	Q 1 b	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Petak Penghijauan Nasional (PPXAN) dan Hutan Lingkungan	Kabupaten Lamongan		Rp 200.000.000,00	Baru	Bag. LH
3	Meminimalisasi Limbah - limbah Kritis / Reboisasi	Q 1 d	1 Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Penanaman pohon penghijauan di lahan-lahan kritis	Kabupaten Lamongan		Rp 125.000.000,00	Baru	Bag. LH
4	Pembinaan SGM berorientasi Lingkungan	Q 1 e	1 Pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat pesisir pantai Penyusunan Buku Nemoz Kuates Lingkungan Hidup Pembinaan Program Bangun Praja Monitoring dan Pemantauan lokasi Bangun Praja Konsultasi ke Jakarta	Kabupaten Lamongan				Bag. LH
			2 Penguatan Institut bagi Tim Penilai Dokumen AMDAL dan bantuan operasional komisi AMDAL Kab. Tim Komisi AMDAL Tim UKLUPL	Kabupaten Lamongan		Rp 50.000.000,00	Baru	Bag. LH

NO	PROJEK/DASAR	KODE PROSEDUR	KEHAYATAN/PROYEK	LOKASI	WILAYAH	SERVILAS (Rp)	JENIS BARANG	URILAN INSTANSI
5	Pengerohan Sumber Daya Alam Pemasal dan Pemasaran Lingkungan Hidup	Q.2 b	1 Program Kaki Berahi (Protaksih) Pamberahan Kas Pemb Pagar BRC 2 Audi Lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan Rumah Selaat Industri / Pemasaran	Jero		Rp 85.000.000,00	Baru	Bag. LH
				Kabupaten Lamongan		Rp 15.000.000,00	Baru	Bag. LH
						Rp 100.000.000,00		

BIDANG KEPENDUDUKAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan Sumber Daya Manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Tingkat kepadatan penduduk akan menimbulkan permasalahan sosial ditengah masyarakat termasuk terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia guna mempertahankan kehidupannya. Untuk mengatasi hal tersebut manajemen kependudukan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara profesional dan proporsional dalam mendukung percepatan pertumbuhan penduduk sehingga dapat mengeliminir antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Tantangan untuk meningkatkan pelayanan publik tentunya akan membutuhkan energi dan strategi yang lebih lugas, tuntas dan akurat. Sistem pencatatan, pemutasian serta registrasi kependudukan memerlukan konsentrasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Belum lagi kebijakan kependudukan diharapkan terjadi penyebaran penduduk yang merata pada setiap wilayah dengan mendaya gunakan secara optimal potensi-potensi lokal dengan membangun dan membentuk jaringan pelayanan kependudukan akan lebih memudahkan dalam hal pembinaan, monitoring dan pemotretan manajemen kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha secara optimal mengembangkan dan meningkatkan inisiatif dan inovasi dalam rangka mengelola pembangunan kependudukan yang bersifat majemuk sehingga diharapkan tidak adalagi diskriminasi pelayanan manajemen kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan.

B. KONDISI UMUM

Pembangunan kependudukan diarahkan pada penyiapan Sumber Daya Manusia yang semakin mantap agar mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terekam bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan dari 1.200.103 jiwa yang terdiri dari 585.259 laki-laki dan 614.844 perempuan pada tahun 2000 menjadi 1.224.812 jiwa yang terdiri dari 598.572 laki-laki dan 626.240 perempuan, sehingga terjadi penambahan sebesar 24.709 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan yang sebesar 1.812,80 km², maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 675,6 orang/km². Berkenaan dengan itu untuk menekan pertumbuhan penduduk, maka peran Gerakan Keluarag Berencana sangat menentukan.

Pelaksanaan transmigrasi pada era Otonomi Daerah mengalami banyak hambatan, disatu sisi daerah penampungan kurang dapat menerima para pendatang dari luar daerah karena evoria Otonomi Daerah, disisi lain para calon transmigrasi kurang memiliki keberanian karena isue instabilitas. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2004 melalui proses kerjasama dengan daerah tujuan teiah dapat memberangkatkan para transmigrasi sebanyak 50 kk (200 jiwa) dari 217 KK yang telah mendaftar dengan tujuan Propinsi Jambi melalui transmigrasi umum dan swakarsa.

Dalam upaya tertib administrasi bidang kependudukan, serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, telah dikembangkan melalui Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMDUK) dengan bentuk pelayanan berupa pemberian KTP, KK, LAMPID, Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengembangkan kualitas rasa aman, tenang, bahagia lahir bathin, selain itu masih diupayakan secara terus menerus pengendalian pertumbuhan penduduk dengan menurunkan tingkat kelahiran anak.

2. Sasaran

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas;

- b. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk;
- c. Meningkatnya peserta KB laki-laki;
- d. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien;
- e. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun;
- f. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak;
- g. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
- h. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- i. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- j. Meningkatnya cakupan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kependudukan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Tertib administrasi sistem kependudukan dan peningkatan pelayanan catatan sipil** dengan strategi dan prioritas a) Sosialisasi tentang arti pentingnya catatan sipil dan kependudukan bagi masyarakat, b) Peningkatan akan mutu pelayanan publik terhadap catatan sipil, c) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. **2. Penyiapan, peningkatan serta pemberdayaan kualitas dan kuantitas calon transmigran** dengan strategi dan prioritas a) Melakukan kerjasama inovatif dengan Pemerintah Daerah tempat tujuan transmigran, b) Memberikan pembinaan, pembekalan, dan ketrampilan terhadap calon transmigran, c) Meningkatkan jalinan koordinasi dengan Dinas Terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kependudukan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : KEPENDUDUKAN

NO	PROYAK/DAERAH	KODE PROGRAM	KELOMPOK/REKAYANAN/PROYEK	LOKASI	JUMLAH	PERHITUNGAN BAYAN	JENIS BANGUNAN (BL)	JUMLAH BANGUNAN
1	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung	R.1.a	1. Pembangunan gedung Anap 2. Penambahan sarana dan prasarana	Kantor Cipta Kantor Cipta	3 x 21 x 4 x 2 Pak besi 8 buah 657 oklar	Rp 940,000,000.00 Rp 13,600,000.00 Rp 9,353,600.00	Baru Baru	Cupit Cupit
2	Melakukan kerjasama reaktif dengan Pemersidih Daerah tingkat tujun transmigran	R.2.a	1. Kunjungan Kerja same dalam rangka penempatan cabn transmigran 2. Membaring penempatan transmigran dan Cabn Transmigran	Luar Jawa Luar Jawa	2 bal 2 bal	Rp 175,000,000.00 Rp 50,000,000.00	Baru Baru	Tenaga Kerja Tenaga Kerja
3	Memoritik pembinaan, pertubuhan dan ketampihan terhadap cabn transmigran	R.2.b	1. Pembinaan, pertubuhan dan ketampihan kepada cabn transmigran	Kab. Lamongan	50 KK	Rp 50,000,000.00	Baru	Tenaga Kerja
4	Meningkatkan jalinan koordinasi dengan dinas Terkait baik secara horizontal maupun vertikal	R.2.c	1. Pengarahan dan persiapan kepada cabn transmigran	Kab. Lamongan	50 KK	Rp 50,000,000.00	Baru	Tenaga Kerja
						Rp 1,267,600,000.00		

BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa mendatang, maka salah satu peran penting dan strategis adalah kepedulian dan perhatian kita yang tinggi terhadap pembangunan di Bidang Kepemudaan yang di dukung dengan pembangunan di Bidang Keolahragaan. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat tampilan kehidupan bangsa ini dimasa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya di hari ini, yang ditunjang dengan kegiatan Keolahragaan guna membentuk jasmani dan rohani agar selalu kuat dan energik. Oleh karena itu maka segenap daya upaya harus dilakukan untuk mampu memberdayakan generasi mudanya.

Pembangunan di bidang ini merupakan bidang yang memiliki peranan strategis dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik/generasi muda sebagai generasi penerus dan berkualitas di masa depan, sehingga kegiatan pembangunan yang mendukung ke arah ini meliputi Pembangunan pada : Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan pelajar, Pembinaan Pemuda dan Olahraga Masyarakat, Pembinaan Tenaga Teknis Keolahragaan, dan Pembangunan sarana prasaranan keolahragaan serta mendukung kegiatan Kepramukaan.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga pada 5 tahun dapat disampaikan sebagai berikut : Prestasi yang pernah diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang olahraga pada tahun 2001 atas jerih payah dalam pembinaan di bidang olahraga ini tidak hanya persepakbolaan (PERSELA), yang menjuari divisi II Nasional pada tahun 2001, akan tetapi juga prestasi olahraga yang lain seperti panahan dan balapan sepeda yang berprestasi ditingkat internasional, catur, tenis meja, pecak silat dan gulat yang berprestasi ditingkat regional Jawa Timur, maka pada upaya tersebut Kabupaten Lamongan telah mendapatkan penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik versi SIWO Jawa Timur dalam 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2003 di tingkat internasional pada SEA GAMES di Vietnam melalui Cabang Olahraga Panahan dengan penghargaan medali Perak (putra beregu) atas nama Saudara KUSWANTORO. Balap sepeda di tingkat ASEAN pada even di Bangkok dan Malaysia atas nama RUSDIANA. Pada tingkat nasional cabang Pencak Silat Juara I atas nama SUTRISNA dan 2 orang Juara II putra. Cabang Gulat menempati Juara atas nama Saudara M. ARIF kelas 84 kg, Saudara ZAENAL ARIFIN kelas 74 Kg, Saudara KARYONO pada kelas 60 Kg. Pada tingkat regional Propinsi Jawa Timur Cabang Panahan Juara I dan II Cabang

Balap Sepeda Putri Juara Beregu, Catur Pelajar Juara II. Sedangkan untuk tahun 2004 ini Pesepakbolaan (PERSELA) telah berjuang pada tingkat Divisi Utama.

Dibidang Kepramukaan sesuai dengan jiwa Dasa Darma dan tri Satya Pramuka, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan pada even Jambore Dunia ke 20 di Thailand peserta Kwartir Cabang Kabupaten Lamongan telah memperoleh penghargaan atas dedikasinya di dalam melaksanakan kegiatan paling terbanyak bila dibandingkan dengan utusan dari negara-negara lain. Pada even pelaksanaan Jambore Regional di Jakarta Kwartir Cabang Lamongan juga memperoleh penghargaan masuk nominasi 4 (empat) besar di dalam penyampaian makalah karya ilmiah. Sedangkan tingkat regional Kwartir Cabang Lamongan juga memperoleh penghargaan sebagai Juara Umum dalam pelaksanaan lomba-lomba pada even Hari Ulang Tahun Pramuka di Surabaya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat daerah;
- b. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
- c. Meningkatkan keserasian berbagai kebijakan olahraga ditingkat daerah;
- d. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga dan;
- e. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pembinaan Kepemudaan** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan pembinaan generasi muda melalui pendekatan aspek mental, pikir, fisik baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun luar sekolah, b) Memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, c) Mengikut sertakan pemuda dalam pembangunan daerah, d) Peningkatan pelatih dan pembina, e)

Pengembangan dan pembinaan kegiatan kepramukaan, f) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan pemuda dan pramuka. **2. Pembinaan Keolahragaan** dengan strategi dan prioritas a) Menumbuhkembangkan Pembinaan olahraga yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana masyarakat pada berbagai tingkatan, b) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga serta sumber daya manusia keolahragaan, c) Menjaring atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga melalui penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat daerah, d) Tersedianya sarana dan prasarana berbagai cabang olah raga sebagai fasilitas pengembangan prestasi atlet daerah (pengadaan tanah untuk fasilitas lapangan sepak bola dan lapangan tenis disekitar Stadion Surajaya sebagai solusi pemindahan lokasi fasilitas olah raga yang ada di alon-alon Kota Lamongan), e) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan Persela. **3. Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan, b) Peningkatan pelatih dan pembina.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERUBAHAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
1	Memfasilitas kegiatan organisasi kepemudaan	S.1.b	1 Pembinaan generasi muda dibidang kewirausahaan	Kacamatan	-	Rp 60.000.000,00	Lanjutan	Kecabangkemas
2	Pengembangan dan pembinaan kegiatan kepemudaan	S.1.e	1 Bantuan kegiatan Pramuka	Kab. Lamongan	-	Rp 275.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kemas
3	Terwujudnya dukungan dera untuk menunjang kegiatan Persela	S.2.e	1 Bantuan kegiatan keolahragaan dan Persela	Kab. Lamongan	-	Rp 4.000.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kemas
4	Meningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan	S.3.a	1 Bantuan kegiatan Kepemudaan dan kesenian	Kab. Lamongan	-	Rp 250.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kemas
			2 Bantuan kepada KONE dan keolahragaan lain	Kab. Lamongan	-	Rp 650.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kemas
Jumlah Total						Rp 5.435.000.000,00		

BIDANG PARIWISATA

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Lamongan memiliki objek wisata yang potensial baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Oleh karena itu pembangunan bidang Pariwisata ke depan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termasuk pula kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat dimana pada akhirnya pendapatan daerahpun akan meningkat.

Pembangunan pariwisata dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta akan tanah air dan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur, secara bertahap dan berkesinambungan sehingga Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Timur.

B. KONDISI UMUM

Objek wisata di kabupaten Lamongan mempunyai potensi kepariwisataan yang cukup baik dan dapat diandalkan dalam menunjang kontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Pola pengembangan objek wisata di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan: objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus.

Objek wisata alam diantaranya : Tanjung Kodok dan Maharani yang sekarang akan dijadikan satu paket dalam objek Wisata Bahari Lamongan, dan Waduk Gondang. Objek wisata budaya : Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Dhuwur, dan Makam Nyai Putri Andongsari, selanjutnya untuk objek wisata minat khusus yaitu : TPI Brondong dan Monumen Kapal Van der Wijk, Sumber Air Panas Tepanas dan Pucak Wangi.

Perkembangan bidang pariwisata selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2004 kontribusi dari bidang pariwisata melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.026.500.000,- Hal ini dikarenakan adanya pengembangan objek wisata Tanjung Kodok menjadi Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang saat ini masih dalam tahap akhir persiapan Grand Opening.

Selanjutnya pengembangan bidang pariwisata ke depan diarahkan kepada pengelolaan kepariwisataan yang lebih profesional sehingga akhirnya selain menjadi kontribusi PAD andalan juga menjadi daerah tujuan wisata yang sejalan dengan sapta pesona.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Menjadikan Lamongan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta sekaligus untuk menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

2. Sasaran

- a. Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan arus kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun wisatawan mancanegara.
- b. Meningkatkan pelayanan wisatawan dan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pariwisata memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pengelolaan obyek-obyek wisata** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan dan pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata, b) Peningkatan promosi dan kerjasama kepariwisataan. **2. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan** dengan strategi dan prioritas a) Melaksanakan pemilihan Yak dan Yuk dan sejenisnya secara bertingkat, b) Penyediaan fasilitas/sarana pendukung kawasan obyek wisata, c) Pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana kepariwisataan **3. Penataan Kawasan Wisata** dengan strategi dan prioritas a) Pembuatan Master Plan/DED Kawasan Wisata, b) Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman (RTRP) Lingkungan Kawasan Obyek Wisata berwawasan lingkungan. **4. Peningkatan SDM pengelola kepariwisataan** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan SDM melalui Diklat Fungsional Pelayanan Jasa Wisata, b) Melaksanakan pembinaan Petugas Hotel dan Penginapan

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pariwisata sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : KEPARISWATAAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROJEK	LOKASI	VOLUME	PERIKUAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
1	Peningkatan dan pengembangan fasilitas obyek wisata dan daya tarik wisata	T.2.a	1. Pemb. "Investasi Alam G. Raju" 2. Pembangunan Fasilitas AB OW / Sunan Drajat 3. Survey Gase Airgn dan Sejahternya 4. Peningkatan kegiatan APBN	Des. Sanggalaypac. Kac. Ngimbang Kac. Paciran Kac. Paciran Kac. Paciran	LS 1 Paket 1 Paket	Rp. 200.000.000,00 P/M Rp 157.245.000,00 Rp 200.000.000,00	Lanjutan Baru Lanjutan	Dinas Perhut Dinas Perhut Dinas Perhut
2	Penyediaan fasilitas / sarana pendukung kawasan obyek wisata	T.2.b	1. Pagar tembok 2. Relac Jalan Mestak 3. Penggung lerbua sebeteh barat 4. Dermaga tempat sepeda air & boat 5. Relac pendopo 6. Pucak Wang - Jalan Secepat - Penggung 7. Moronjemplung Jalan Setapak dan main anak - anak, lencana anak dan sangkar burung	Wuduk Gondang Kac. Babak Kac. Kembangohu	2500 m ² 500 x 3 m 300 m ² 500 m ² 1 Paket	Rp 300.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 225.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 139.968.000,00	Lanjutan Lanjutan Baru Baru Lanjutan Baru	Dinas Perhut Dinas Perhut Dinas Perhut Dinas Perhut Dinas Perhut Dinas Perhut
5	Perifasi kawasan wisata	T.3.a	1. Penyusunan master plan kawasan wisata lelepa sumedang	Kac. Lamongan	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Baru	Dinas Perhut Bappeda
Jumlah Total						Rp 1.725.922.000,00		

BIDANG PERTANAHAN

A. PENDAHULUAN

Kegiatan dibidang pertanahan di Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Penyediaan atau pengadaan tanah untuk pembangunan semakin meningkat jumlahnya, bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat, akan tetapi juga untuk memenuhi tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik sebagai akibat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Peranan penataan pertanahan dalam kegiatan pembangunan antara lain : mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang menyangkut pertanahan. Mengingat begitu besarnya peranan aspek pertanahan sebagai daya dukung lahan didalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penunjang kehidupan manusia, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

B. KONDISI UMUM

Kegiatan pembangunan Bidang Pertanahan di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2004 meliputi : 1) Penyuluhan Bidang PPT sebanyak 8 Kecamatan; 2) Pendataan Subyek dan Obyek 1268 Bidang; 3) Ijin Peralihan Hak / Aspek PPT 631 Unit; 4) Survey Pengumpulan Data/Komplikasi Data PGT 1 Kabupaten; 5) Penelitian/Monitoring perubahan penggunaan tanah 1 Kabupaten; 6) Penyusunan Data dan Neraca penggunaan tanah 1 Kabupaten; 7) Pemberian Aspek penatagunaan tanah 141 Unit; 8) Pemberian Klarifikasi rencana perolehan dan penatagunaan tanah 2 Buah; 9) Permohonan Hak Atas Tanah 100 Unit; 10) Permohonan Hak : a. Hak Milik 53 Unit, b. Hak Guna Bangunan 25 Unit, c. Hak Pakai 7 Unit, d. Hak Pengelolaan tidak ada; 11) Penerbitan SPTK Konversi 5388 Unit; 12) Penerbitan SPTK SK Hak 58 Unit; 13) Pemisahan dan Penggabungan 397 Unit; 14) Penerbitan SPTK SK Hak Tanggungan 217 Unit; 15) Sertifikat Pengganti 158 Unit; 16) Peralihan Hak 1602 Unit; 17) Pembuatan S.U / G.U 5715 Unit; 18) Penerbitan SPTK PRONA 300 Unit.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Mewujudkan Tertib Administrasi dan meningkatkan pelayanan pertanahan serta penertiban pemanfaatan tanah di Bidang Pertanahan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat dan menjunjung keamanan.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan dan mempercepat penertiban Surat Keputusan pemberian hak termasuk pula dalam rangka pelaksanaan retribusi tanah obyek Landreform ;
- b. Meningkatkan tertib Sistem Administrasi Pertanahan, seperti pelayanan pendaftaran dan sertifikasi tanah, Sistem penertiban administrasi Landreform, Sistem konsolidasi tanah dan sistem pendayagunaan tanah ;
- c. Tersedianya data pertanahan yang cukup bagi perencanaan dan kegiatan pembangunan baik perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat memberikan data Pertanahan secara cepat dan akurat ;
- d. Peningkatan pembinaan dan penertiban terhadap penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah baik di Perkotaan dan Perdesaan ;
- e. Meningkatkan penyelesaian sertifikat Hak Atas Tanah dan pendaftaran bidang – bidang tanah ;
- f. Melaksanakan pendataan / inventarisasi dan sertifikasi terhadap tanah – tanah aset Pemkab. Lamongan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pertanahan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Penataan dan Pengelolaan Bidang Pertanahan** dengan strategi dan prioritas a) Penataan optimalisasi personal teknis bidang pertanahan, b) Penataan aset-aset dan inventarisasi dokumen agraria. **2. Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah** dengan strategi dan prioritas a) Penginventarisasi tanah-tanah aset milik daerah, b) Pensertifikatan tanah-tanah milik daerah. **3. Pengadaan dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan** dengan strategi dan prioritas a) Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah, b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Hak Atas Tanah kepada masyarakat, c) Peningkatan tertib administrasi Pertanahan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERTAHANAN

NO	PROG/AS DAERAH	KODE PROJEK/ALOKASI	KETERANGAN	LOKASI	NILAI	KETERANGAN (RUP)	USULAN (RUP/ALOKASI)
1	Perawatan operasional personel laksa bidang pertahanan	U.3.e	1 Pengadaan tanah dan sertifikasi tanah bagi lapangan Perada	Kabupaten Lamongan	RM	Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.500.000.000,00
Jumlah Total						Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.500.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang terkait dengan APBD Kabupaten Lamongan, maupun dari partisipasi masyarakat dan swasta, berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD.

Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

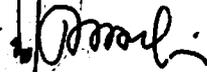
Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keharmonisan segenap pelaku pembangunan memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan pemahaman terhadap tugas masing-masing, untuk itu dalam menyongsong tahun 2006 perlu terus dikembangkan secara profesional agar anggaran tahun 2006 dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Disadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini bukan suatu dokumen yang sempurna melainkan masih banyak memiliki kelemahan, karena memang belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat Lamongan yang

sedang berkembang. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan namun diyakini dapat memberikan landasan berpijak dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan Lamongan kedepan.

Pj. BUPATI LAMONGAN



H. AGUS SYAMSUDDIN, SH, MS